



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 96 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomer 58);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013-2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk priode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannnya RPJMD adalah untuk menetapkan pedoman perencanaan sebagai acuan penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan Perencanaan penganggaran; dan
- (2) Tujuan ditetapkanya RPJMD adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kota dan dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM nasional;
- b. memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- c. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Rencana Program Jangka Menengah Daerah terdiri dari:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Maksud dan Tujuan
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan
	1.4 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
	1.5 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
	2.3 Aspek Pelayanan Umum
	2.4 Aspek Daya Saing Daerah
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
	3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
	3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2007 2012
	3.3 Kerangka Pendanaan
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
	4.1 Permasalahan Pembangunan
	4.2 Isu Strategis
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

BAB V
ISI DAN URAIAN

Pasal 5

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
MASA BERLAKU

Pasal 6

RPJMD berlaku selama 5 (lima) tahun masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2012-2017.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 584

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 96 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2013-2017

ISI DAN URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013-2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan berpedoman kepada Visi RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, yaitu “DENGAN IMAN DAN TAKWA, KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN INDUSTRI TERMAJU DI JAWA BARAT”.

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilaksanakan pada 9 Juli Tahun 2012 yang pelantikannya pada 14 November 2012. Keberadaan RPJMD ini akan menjadi pedoman kerja bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun mendatang.

RPJMD menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD dan dijabarkan dalam RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dalam penyusunan RPJMD

menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yaitu politik, teknokratis, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendekatan politik adalah bahwa perencanaan pembangunan RPJMD yang disusun harus memasukkan program-program pembangunan yang ditawarkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada saat kampanye;
2. Pendekatan teknokratis berarti penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yaitu proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pendekatan partisipatif berarti penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*);
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) adalah perencanaan pembangunan daerah yang disusun diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Proses penyusunan RPJMD meliputi tahapan dan langkah sebagai berikut:

1. Penyiapan Rancangan Awal RPJMD;
Rancangan Awal RPJMD disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota, arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan program. Rancangan Awal RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rancangan Renstra SKPD.
2. Penyiapan Rancangan Renstra SKPD;
Rancangan Renstra SKPD disiapkan SKPD, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMD dan bersifat indikatif.
3. Penyusunan Rancangan RPJMD;

Rancangan Renstra SKPD yang telah diverifikasi oleh Bappeda dijadikan bahan masukan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD. Selanjutnya Rancangan RPJMD dijadikan bahan Musrenbang RPJMD.

4. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;

Musrenbang RPJMD merupakan forum konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk membahas Rancangan RPJMD, diselenggarakan Bappeda. Musrenbang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD, mencakup sasaran; strategi dan sinkronisasi arah kebijakan; kebijakan umum dan program dengan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota; indikasi program prioritas dengan pendanaan; capaian indikator kinerja; komitmen pemangku kepentingan berpedoman pada RPJMD; sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD lainnya.

5. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD;

Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD berdasar berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD dibahas oleh seluruh Kepala SKPD untuk memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta telah tertampung dalam Rancangan Akhir RPJMD.

6. Penetapan RPJMD.

Walikota mengkonsultasikan Rancangan Akhir RPJMD kepada Gubernur, untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, serta keselarasan dengan RPJPD Kota, RTRW Kota, RTRW Provinsi, RPJMD Provinsi dan RPJMN, serta RTRW Kabupaten/ Kota lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik.

1.2. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;

2. Untuk mengidentifikasi perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kota Tasikmalaya dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kota Tasikmalaya;
3. Untuk dijadikan landasan atau pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kota Tasikmalaya dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
4. Untuk memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD dan Renstra SKPD agar penyelenggaraan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan arah pembangunan Provinsi dan Nasional;
5. Sebagai suatu upaya untuk pemecahan dan antisipasi bagi kepentingan dan kebutuhan mutakhir daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan ditambah 1 (satu) tahun masa transisi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 bertujuan:

1. Menentukan arah dan kesinambungan pembangunan Kota Tasikmalaya untuk 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menjamin terciptanya efektivitas, efisiensi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah dan antarfungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kota Tasikmalaya yang efektif, efisien, berkeadilan serta berkelanjutan;
4. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kota Tasikmalaya dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musrenbang RPJMD.
5. Menjamin pelaksanaan pembangunan yang partisipatif;
6. Merupakan bahan acuan utama bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyusun Renstra SKPD;
7. Menyediakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD;
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD ini berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);

36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

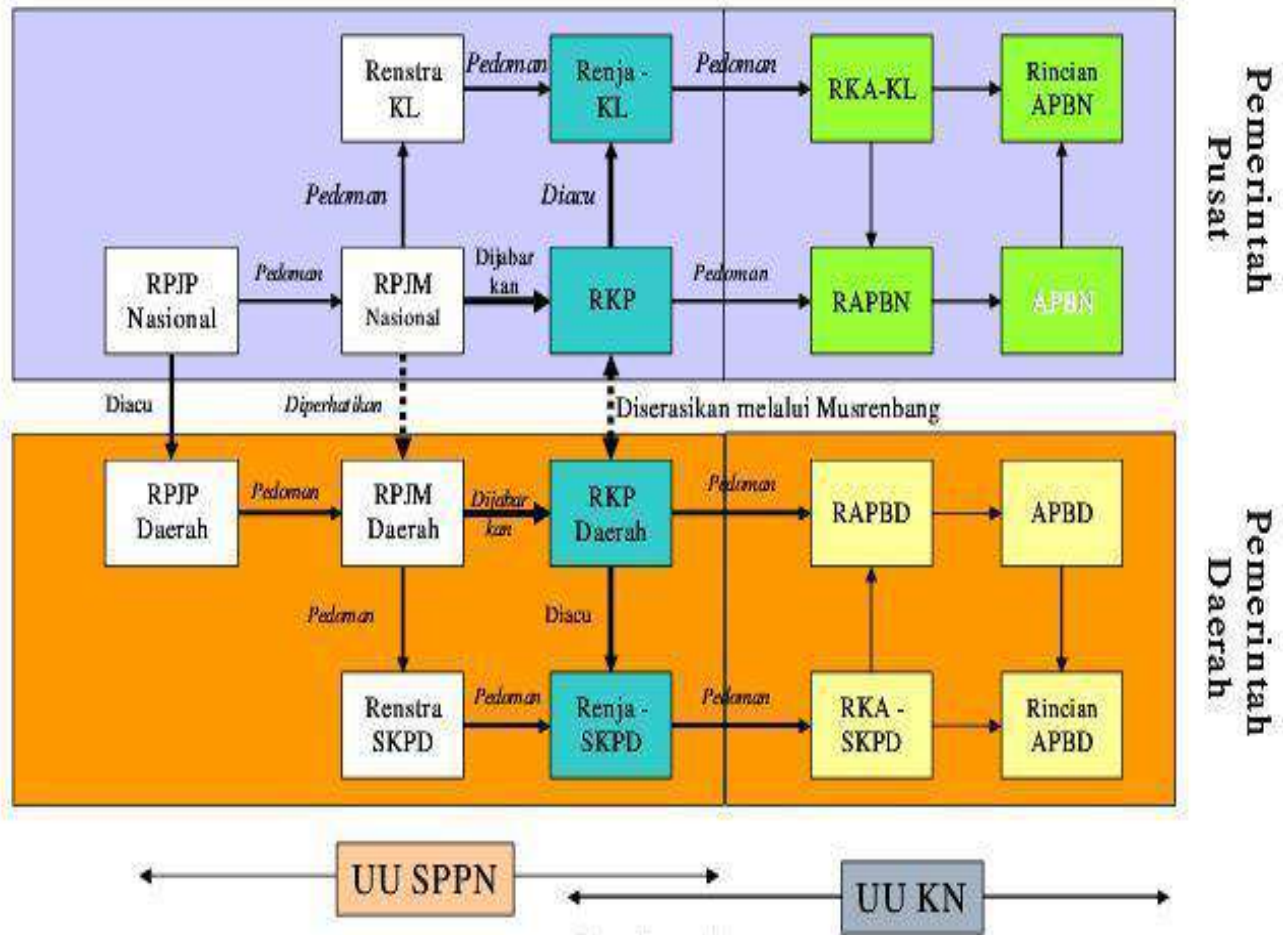
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tatacara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);

38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133).

1.4. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 merupakan satu bagian utuh dari manajemen kerja di Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dengan tetap memperhatikan arahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 serta RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

Gambar 1 .1.
Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, RPJMD ini akan dijabarkan dalam bentuk RKPD Kota Tasikmalaya, yang akan menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun Renja SKPD.

Berkaitan dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, penjabaran RPJMD Kota Tasikmalaya ke dalam RKPD Tahunan Kota Tasikmalaya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tasikmalaya. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 1.1

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013 - 2017, maksud dan tujuan, dasar hukum

penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, dan sistematika penulisan;

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah berdasarkan aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Memuat kinerja keuangan masa lalu berupa uraian dan data pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, kemudian menguraikan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan berupa data proyeksi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan;

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan pembangunan yaitu *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Selain permasalahan pembangunan di Bab ini juga dibahas isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang;

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Tasikmalaya. *Visi* adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. *Misi* adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. *Sasaran* adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya. *Strategi* adalah langkah-langkah berisikan

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. *Kebijakan* adalah arah/ tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat kebijakan umum pembangunan Kota Tasikmalaya yang dituangkan dalam tema atau fokus pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan dilakukan;

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat rencana program prioritas pembangunan daerah disertai pagu indikatif berupa perkiraan belanja dari program-program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat hal berkenaan dengan indikator sebagai penunjuk capaian atas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Bab ini berguna sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB X KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

Memuat dasar atau kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 serta pedoman pada saat Walikota dan Wakil Walikota mengakhiri jabatannya, sementara dokumen perencanaan jangka menengah periode berikutnya belum disusun (program transisi) serta ulasan berkenaan adanya perubahan RPJMD dimaksud.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Letak Geografis

Secara geografis Kota Tasikmalaya terletak antara 108°08'38" BT-108°24'02" BT dan antara 7°10' LS-7°26'32" LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 Km dari Kota Bandung dan ± 255 Km dari Kota Jakarta, dengan luas Wilayah 18.385 Hektar (183,85 Km²) serta batasan administratif pemerintahan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Cisayong, Sukaratu) dan dengan Kabupaten Ciamis (Kecamatan Sindangkasih, Cikoneng, Cihaubeuti), dengan batas fisik Sungai Citanduy;
2. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Jatiwaras dan Sukaraja);
3. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Sukaratu, Leuwisari, Singaparna, Sukarame, Sukaraja) dengan batas fisik Sungai Ciwulan;
4. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Kecamatan Manonjaya dan Gunung Tanjung) dengan batas fisik saluran irigasi Cikunten II dan Sungai Cileuwimunding.

2.1.2. Kondisi Administrasi Kota

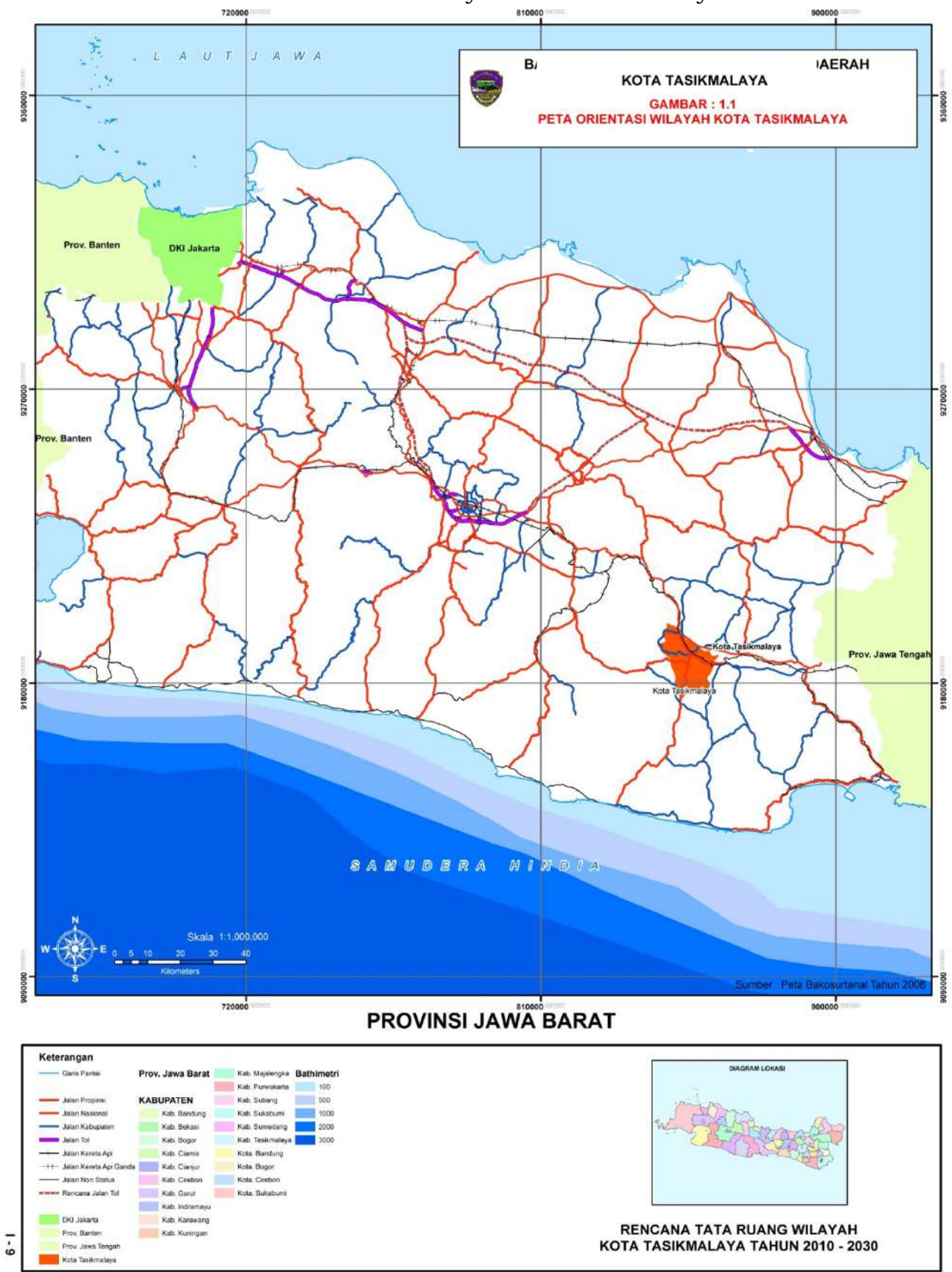
Kota Tasikmalaya menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 memiliki Wilayah seluas 17.156,20 Hektar yang terbagi kedalam 8 (delapan) Kecamatan, terdiri dari 15 Kelurahan dan 54 Desa. Seiring perkembangan Kota Tasikmalaya dan adanya tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sejak tahun 2008 Kota Tasikmalaya menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan dan 69 Kelurahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya adalah 18.385,07 ha (183,85 Km²). Hal ini tidak berarti ada penambahan wilayah, seluas 1.229,07 Ha (12,29 Km²) dari sebelumnya 17.156 Ha

(171,56 Km²) akan tetapi menyangkut metodologi pengukuran yang dilakukan Bakosurtanal pada tahun 2010.

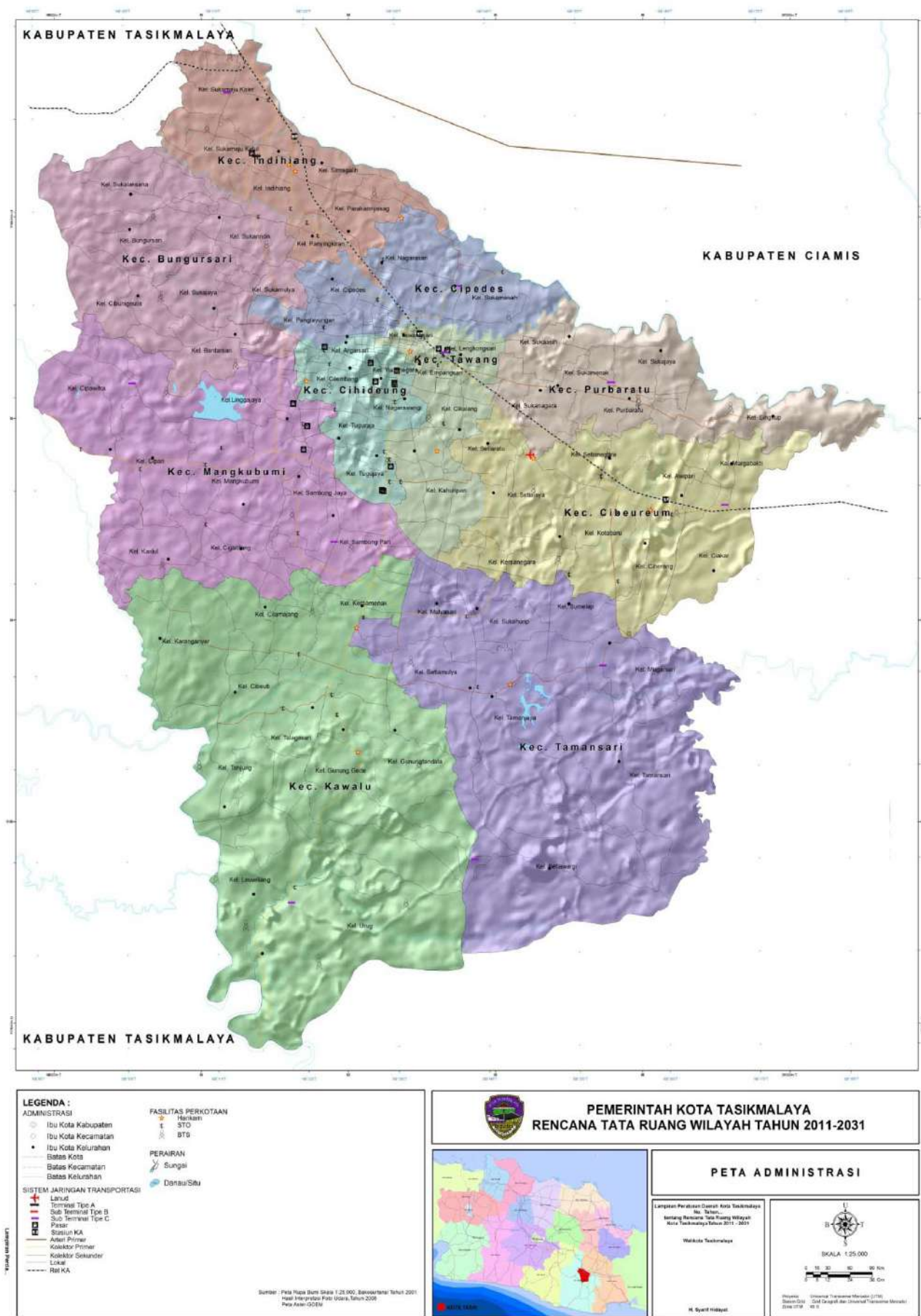
Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1. dan gambar 2.2.

Gambar 2.1
Peta Orientasi Wilayah Kota Tasikmalaya



Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kota Tasikmalaya



Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

Sedangkan luas administratif Kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Wilayah Administratif Kelurahan

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kelurahan
1.	Kawalu	Talagasari	42,77	10
2.	Tamansari	Tamanjaya	35,99	8
3.	Cibeureum	Ciherang	19,04	9
4.	Purbaratu	Purbaratu	12,01	6
5.	Tawang	Kahuripan	7,07	5
6.	Cihideung	Argasari	5,49	6
7.	Mangkubumi	Mangkubumi	24,53	8
8.	Indihiang	Sukamaju Kidul	11,04	6
9.	Bungursari	Bungursari	16,90	7
10.	Cipedes	Nagarasari	8,96	4
Jumlah			183,85	69

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

2.1.3. Kondisi Topografi

Kota Tasikmalaya berdasarkan bentang alamnya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl.

Ditinjau dari fisiografi wilayah, tempat tertinggi di Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Cibeureum, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3.

Tabel 2.2
Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya

No.	Kelas Lereng	Keterangan	Luas (Hektar)	Luas (%)
1.	0 – 2	Datar	4659,00	25,34
2.	2 – 5	Landai	6443,14	35,04
3.	5 – 15	Sedang	6221,24	33,83
4.	15 – 40	Curam	1061,69	05,77
Total			18.385,07	100,00

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya 2011-2031

Tabel 2.3
Ketinggian Tempat Wilayah Kecamatan di Kota Tasikmalaya

No	Kecamatan	Tinggi dari muka laut (mdpl)
1.	Kawalu	201 mdpl (Kelurahan Urug) - 445 mdpl (Kelurahan Gunung Tandala)
2.	Tamansari	347 mdpl (Kelurahan Setiamulya) - 448 mdpl (Kelurahan Setiawargi)
3.	Cibeureum	250 mdpl (Kelurahan Singkup) - 362 mdpl (Kelurahan Setiajaya)
4.	Purbaratu	320 mdpl
5.	Tawang	340 mdpl (Kelurahan Lengkongsari) - 359 mdpl (Kelurahan Kahuripan)
6.	Cihideung	349 mdpl (Kelurahan Nagarawangi) - 365 mdpl (Kelurahan Cilembang)
7.	Mangkubumi	343 mdpl (Kelurahan Sambongjaya) - 473 mdpl (Kelurahan Cipawitra)
8.	Indihiang	410 mdpl (Kelurahan Sukajaya)
9.	Bungursari	503 mdpl (Kelurahan Bungursari)
10.	Cipedes	333 mdpl (Kelurahan Sukamanah) - 398 mdpl (Kelurahan Cipedes)

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya 2011-2031

2.1.4. Kondisi Klimatologi

Menurut klasifikasi iklim *Mohr*, terdapat tiga jenis pembagian bulan dalam kurun waktu satu tahun, disebut bulan basah apabila curah hujan > 100 mm per bulan, bulan lembab bila curah hujan berkisar antara 100-60 mm dan bulan kering bila curah hujan < 60 mm per bulan. Berdasarkan tabel 2.4, setiap tahunnya Kota Tasikmalaya memiliki 3 sampai 4 bulan kering dan 8 sampai 9 bulan basah, dengan rata-rata curah hujan di Kota Tasikmalaya sekitar 302,67 mm.

Tabel 2.4

Curah Hujan Rata-rata Bulanan Kota Tasikmalaya (mm)

No.	Bulan	Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011	
		Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
1.	Januari	633	25	573	20	171	11
2.	Februari	571	18	568	17	280	12
3.	Maret	525	16	538	17	411	20
4.	April	368	12	228	15	652	25
5.	Mei	258	17	197	11	692	23
6.	Juni	215	9	232	15	63	4
7.	Juli	54	3	196	13	379	5
8.	Agustus	0	0	312	15	0	0
9.	September	10	2	0	0	5	1
10.	Oktober	378	18	0	0	365	11
11.	November	358	13	0	0	1192	21
12.	Desember	316	12	0	0	156	17
Jumlah		3686	145	2844	123	4366	150
Rata-rata		307,17	12,08	237,00	10,25	363,83	12,5

Sumber :BPSDA Provinsi Jawa Barat (Stasiun Cimulu)

2.1.5. Kondisi Geologi

Berdasarkan hasil kajian peta geologi lembar Tasikmalaya (T. Budhitrisona, 1982), struktur geologi Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara. Sedangkan pada bagian utara, tengah dan selatan terdapat sesar normal, sesar naik, serta lipatan berupa antiklin dan siklin.

Pola struktur sesar normal akan menimbulkan pemotongan pada bagian tubuh batuan dan umumnya membentuk gawir, sedangkan sesar naik disamping dapat membentuk gawir juga perlapisan batuan menjadi berlipat-lipat dan hancur, bidang pemotongan ini merupakan bidang lemah yang biasanya membentuk gawir-gawir curam dan terjal

dimana proses gerakan tanah ini dapat berkembang, hal ini sering terlihat pada bantaran sungai akibat pengikisan dan penyempitan.

Secara umum daerah Kota Tasikmalaya dapat dibagi menjadi tiga satuan geomorfologi. Satuan geomorfologi perbukitan landai menempati bagian Barat Laut Kota Tasikmalaya, dengan ketinggian berkisar 280-475 meter di atas permukaan laut. Satuan Geomorfologi ini membentuk perbukitan-perbukitan soliter dengan ukuran bervariasi berkisar puluhan meter. Satuan geomorfologi pedataran menempati bagian tengah dan timur Kota Tasikmalaya, dengan ketinggian berkisar 201-350 mdpl. Kedua satuan geomorfologi ini tersusun atas litologi breksi vulkanik, lava andesit, tuff dan endapan pasir tufaan yang termasuk ke dalam Endapan Breksi Vulkanik Gunung Galunggung yang berumur Holosen. Endapan ini merupakan hasil letusan dan longsoran saat terjadi erupsi Gunung Galunggung, sedangkan satuan geomorfologi perbukitan curam menempati bagian selatan Kota Tasikmalaya. Satuan ini memiliki ketinggian berkisar 300-503 mdpl, dan tersusun atas litologi breksi gunung api, lahar, tuff yang bersifat andesitis sampai basaltis yang termasuk ke dalam endapan Gunung api Muda yang berumur Holosen.

2.1.6. Kondisi Hidrogeologi dan Hidrologi

Ditinjau dari kondisi hidrogeologi, Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai daerah akuifer, alirannya didasarkan melalui celahan dan ruang antara butir yang merupakan ciri dari lereng gunung api strato. Sistem akuifer di Kota Tasikmalaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu; sistem akuifer tunggal pada unit vulkanik, sistem akuifer pada celahan-celahan batuan sedimen tersier serta sistem akuifer rekahan-rekahan yang dibentuk oleh batu gamping. Sumber daya air, sebagai ciri utama kondisi hidrologi wilayah Kota Tasikmalaya dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Air permukaan

Air permukaan dapat diartikan sebagai aliran air yang mengalir permukaan Kota Tasikmalaya maupun dalam bentuk genangan yang cukup luas, bentuknya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ).

2. Air hujan

Air permukaan jenis air hujan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber daya air setempat cukup besar. Di Kecamatan Tamansari potensi air tersebut mencapai 49-416 juta m³/hari, sementara di Kecamatan Mangkubumi mencapai 59-501 juta m³/hari.

3. Air sungai dan air waduk

Sungai-sungai yang mengalir Kota Tasikmalaya adalah Citanduy, Ciloseh, Ciwulan serta Cibanjaran. Sedangkan anak sungainya yaitu beberapa anak sungai dari Sungai Cibanjaran yang meliputi Sungai Cihideung/Dalem Suba, Cipedes, Ciromban, Cidukuh, Cicacaban, Cihadodon, Cikalang, Tonggong Londok, Cibeureum dan Cimulu. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun dan bermuara di Sungai Citanduy, kecuali Sungai Ciwulan. Kota Tasikmalaya termasuk ke dalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citanduy dan DAS Ciwulan. DAS Citanduy memiliki limpasan air sungai rata-rata bulanan sebesar 17 m³/detik atau rata-rata harian sekitar 5,5 m³/detik, sedangkan DAS Ciwulan memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar 13,7 m³/detik. Jumlah kedua limpasan adalah 1.658.880 m³/hari. Sedangkan waduk/situ di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi menyediakan air sebesar 1.646.750 m³. Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi (6.000 m³/detik), Situ Cibeureum, Situ Cibanjaran, Situ Malingping, Situ Bojong dan Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari (6.000 m³/detik).

4. Air Tanah

Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal, karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 3,00-10,00 m. Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara 1,50-7,00 m. Sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Bungursari (mata air Cibunigeulis), Kecamatan Tamansari (mata air Cibangbay) serta Kecamatan Mangkubumi (mata air Cianjur II).

2.1.7. Penggunaan Lahan

Menurut hasil interpretasi foto udara tahun 2008, penggunaan lahan di Kota Tasikmalaya terdiri dari 1.884,82 Ha (10,90%) luas lahan terbangun dan sekitar 15.411,34 Ha (89,10%) luas lahan tidak terbangun.

1. Lahan Terbangun, meliputi:
 - a. Lahan perumahan/permukiman, mencapai sekitar 1.539 Ha (8,90%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
 - b. Lahan jasa dan perdagangan sekitar 122,23 Ha (0,71%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
 - c. Lahan Lapangan Udara Wiriadinata mencapai 111,55 Ha (0,65%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
 - d. Sisanya sekitar 112,04 Ha (0,65%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya dimanfaatkan untuk perkantoran, pusat pemerintah, fasilitas sosial dan transportasi, militer, industri, fasilitas olahraga, sarana olahraga, terminal dan stasiun.
2. Lahan Non Terbangun
 - a. Lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian sekitar 6.300,92 Ha (36,45%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
 - b. Lahan kebun campuran sekitar 6.157,19 Ha (35,62%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
 - c. Lahan ladang sekitar 1.776,07 Ha (10,28%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
 - d. Lahan hutan seluas 409,06 Ha (2,37%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
 - e. Lahan kosong seluas 338,11 Ha (1,96%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya;
 - f. Sisanya seluas 418,13 Ha (2,42%) dari total luas lahan Kota Tasikmalaya merupakan lahan galian pasir, TPU, taman, situ, lahan tidak produktif, belukar dan lahan lainnya.

Berdasarkan informasi di atas, Kota Tasikmalaya masih memiliki lahan cukup luas untuk pengembangan fisik kota ke depan. Meskipun demikian, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terdapat lahan yang harus disiapkan untuk lahan ruang terbuka hijau sebesar 30% dari total luas lahan Kota Tasikmalaya, terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik meliputi taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan dan sungai, dan 10% ruang terbuka hijau privat meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang harus disediakan dibandingkan pola penggunaan lahan

Kota Tasikmalaya, maka penyediaannya diperoleh/dikonversi dari penggunaan lahan sebagai berikut:

1. Sumber daya lahan untuk ruang terbuka hijau publik diperoleh dari lahan taman dan taman pemakaman umum yang sudah ada serta dari lahan hutan, lahan tidak produktif, tanah kosong, belukar dan lahan lainnya.
2. Sumber daya lahan untuk ruang terbuka hijau privat diperoleh dari lahan pertanian, lahan kebun campuran, lahan sawah, tanah kosong dan tegalan.

Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan lahan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 2.5. sebagai berikut.

Tabel 2.5.

Distribusi Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya Tahun 2011(Ha)

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
1.	Belukar	90.62	0.49
2.	Danau	117.68	0.64
3.	Fasilitas Sosial	0.30	0.00
4.	Fasilitas Olah Raga	13.35	0.07
5.	Galian Pasir	27.58	0.15
6.	Hutan	395.59	2.15
7.	Kebun	6024.06	32.77
8.	Kolam	168.16	0.91
9.	Ladang	1663.73	9.05
10.	Lanud	0.49	0.00
11.	Militer	81.77	0.44
12.	Pabrik	30.22	0.16
13.	Pasar	14.07	0.08
14.	Pendidikan	9.27	0.05
15.	Perkantoran	20.07	0.11
16.	Permukiman	230.57	1.25
17.	Pertamina	7.58	0.04
18.	Prasarana Umum	2.61	0.01
19.	Pusat Pemerintahan	1.22	0.01
20.	Rawa	6.33	0.03
21.	Sawah	6146.83	33.43
22.	Stasiun	0.14	0.00

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	(%)
23.	Tanah Kosong	3291.33	17.90
24.	Terminal	1.33	0.01
25.	TPU/Makam	40.17	0.22
Jumlah		18.385,07	100,00

Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Di Kota Tasikmalaya terdapat beberapa potensi rawan bencana, diantaranya bencana alam geologi aliran lahar dan rawan gerakan tanah skala menengah. Wilayah rawan bencana tersebut diantaranya:

1. Rawan bencana alam geologi aliran lahar

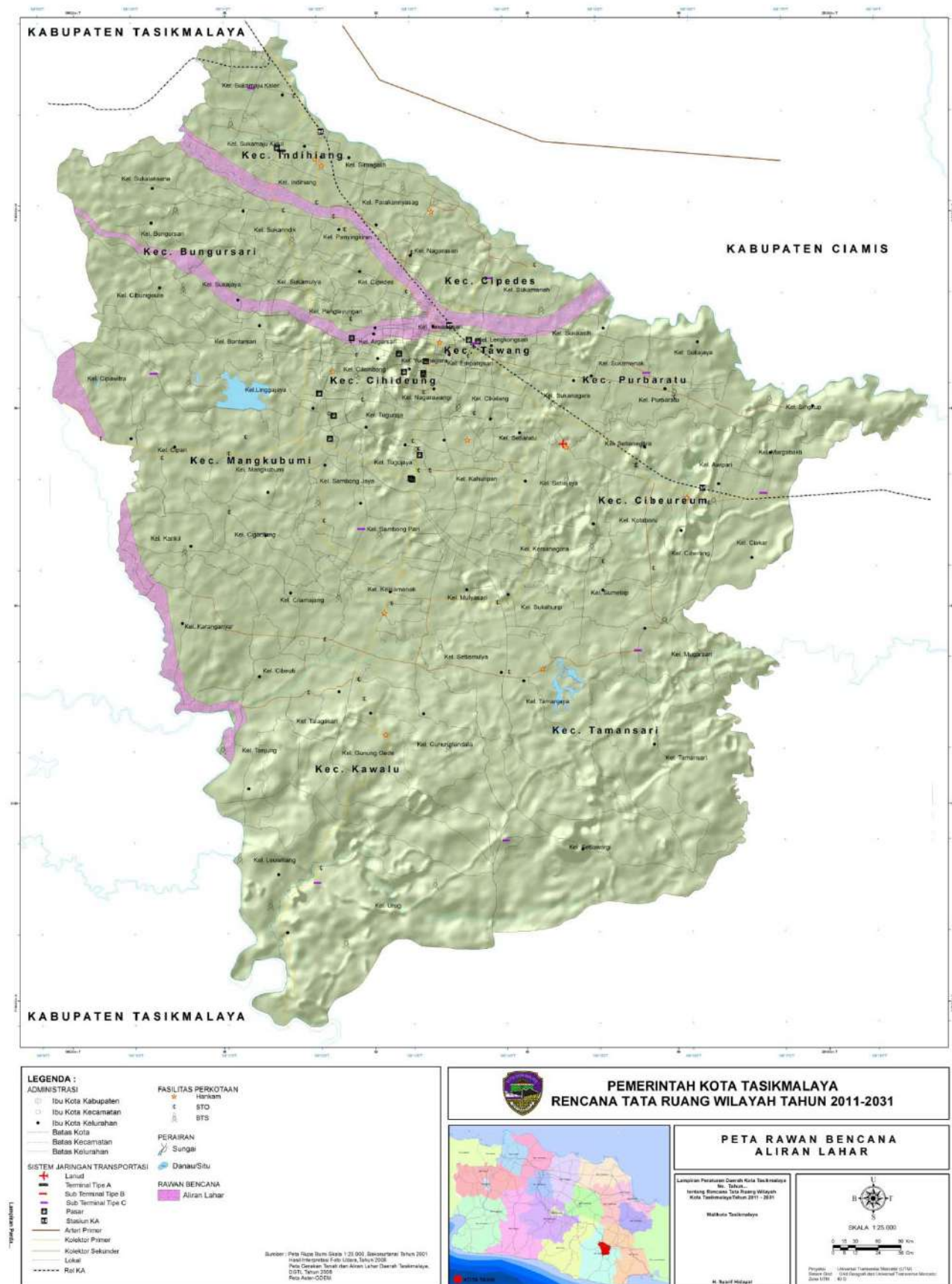
Gunung api terdekat dengan Kota Tasikmalaya adalah Galunggung, sekitar 19 km dari pusat kota. Gunung ini merupakan gunung api tipe A yang masih aktif, letusan terakhir terjadi pada tahun 1982 mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Berdasarkan data dasar gunung api di Indonesia (Direktorat Vulkanologi, 1978) beberapa lokasi yang termasuk daerah waspada antara lain sekitar alur Sungai Ciwulan, Cimulu serta di bagian timur dan utara Kota Tasikmalaya.

2. Rawan bencana gerakan tanah skala menengah

Kawasan rawan bencana ini berada di daerah yang sering terjadi gerakan tanah, seperti daerah yang berbatasan dengan sungai, gawir, tebing jalan atau lereng yang aktif akibat curah hujan yang tinggi. Luas keseluruhan kawasan ini kurang lebih 1.588 Ha, meliputi sebagian Kecamatan Kawalu di sekitar bantaran sungai Ciwulan, sebagian Kecamatan Purbaratu di sekitar bantaran sungai Citanduy dan sebagian Kecamatan Tamansari di sekitar bantaran sungai Cikembang.

Untuk lebih jelasnya mengenai potensi bencana yang terjadi di Kota Tasikmalaya maka dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3.
Peta Rawan Bencana Aliran Lahar Kota Tasikmalaya



Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031

2.1.9. Kondisi Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 646.216 jiwa terdiri dari laki-laki 326.965 jiwa dan perempuan 319.251 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mangkubumi sebanyak 86.713 jiwa, diikuti Kecamatan Kawalu dan Kecamatan Cipedes sebanyak 86.581 jiwa dan 76.219 jiwa.

Dilihat dari tingkat kepadatannya, kecamatan dengan penduduk terpadat ialah Kecamatan Cihideung sebanyak 13.681 jiwa/Km² diikuti Tawang dan Cipedes mencapai 11.986 jiwa/Km² dan 7.714 jiwa/Km². Sedangkan 7 (tujuh) kecamatan lainnya berkisar 1.500 sampai dengan 5.500 jiwa/Km², berada dibawah rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Tasikmalaya sebesar 3.704 jiwa/Km² artinya terdapat ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan kawasan perkotaan dan 7 Kecamatan lainnya. Untuk lebih lengkapnya mengenai jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.

Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
		L	P	Jumlah		
1.	Kawalu	44.161	42.420	86.581	42,77	2024.339
2.	Tamansari	32.718	31.731	64.449	35,99	1790.747
3.	Cibeureum	31.403	30.638	62.041	19,04	3258.456
4.	Purbaratu	19.656	18.992	38.648	12,01	3217.985
5.	Tawang	31.842	32.043	63.885	7,07	9036.068
6.	Cihideung	36.823	35.821	72.644	5,49	13232.06
7.	Mangkubumi	44.008	42.705	86.713	24,53	3534.978
8.	Indihiang	24.433	24.035	48.468	11,04	4390.217
9.	Bungursari	23.341	23.227	46.568	16,90	2755.503
10.	Cipedes	38.580	37.639	76.219	8,96	8506.585
Kota Tasikmalaya		326.965	319.251	646.216	183,85	3514.909

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya dan Bappeda Kota Tasikmalaya

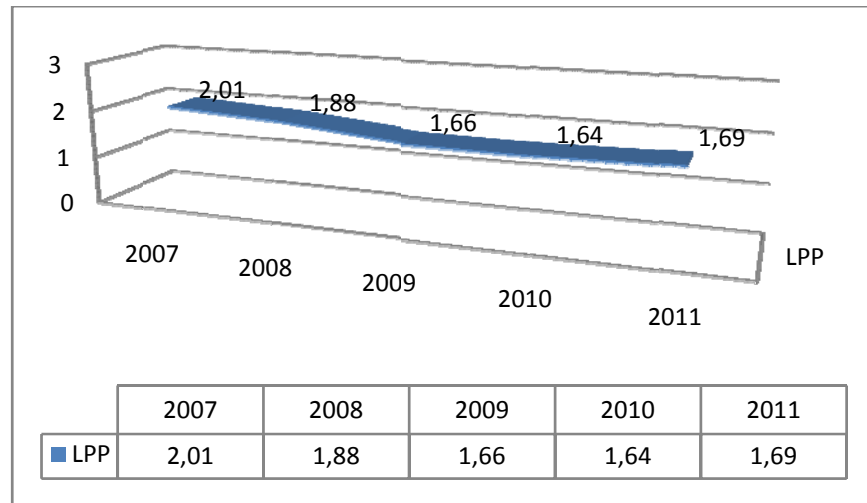
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Tasikmalaya dalam 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 1,77%.

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2007 (2,01%) sedangkan LPP terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 1,66%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 2.1.

Grafik 2.1.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Tasikmalaya
Tahun 2007 -2011



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2011

2.1.10. Potensi Pengembangan Wilayah

Arah perkembangan wilayah tidak terlepas dari perkembangan penduduk. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,11% berdasarkan Tabel 2.6., pada tahun 2025 penduduk Kota Tasikmalaya diprediksi mendekati 1 juta jiwa (menuju sebagai *Kota Metropolitan*). Pembangunan kota berkelanjutan mensyaratkan bahwa prinsip-prinsip pembangunan harus berwawasan dan ramah lingkungan. Oleh sebab itu pembangunan kota diusahakan tidak mengganggu lahan hutan dan sawah irigasi. Dengan prinsip tersebut diprediksi perkembangan kota hanya akan menempati tambahan 30,2% sisa lahan kota yang ada (5.181,33 ha). Sementara itu hingga tahun 2005 wilayah terbangun sudah mencapai 23,02%; sehingga pada tahun 2025 jumlah wilayah terbangun di Kota Tasikmalaya akan mencapai 53,22%.

Tabel 2.7.
Proyeksi Penduduk Kota Tasikmalaya
dan Kemungkinan Pengembangan Lahan Kotanya

No.	Kecamatan	2005	LPP 90- 05	2010	2015	2020	2025	Lahan yang mungkin dikembang kan (Ha)
1.	Kawalu	82.332	1,76	89.837	98.026	106.961	116.711	1.400,50
2.	Tamansari	58.292	0,02	58.350	58.409	58.467	58.526	1.456,34
3.	Cibeureum	93.671	3,21	109.702	128.476	150.464	176.214	700,20
4.	Tawang	65.957	0,44	67.421	68.917	70.447	72.010	36,12
5.	Cihideung	71.829	0,01	71.865	71.901	71.937	71.973	63,45
6.	Mangkubumi	77.337	4,53	96.514	120.447	150.315	187.589	414,13
7.	Indihiang	82.379	2,58	93.569	106.278	120.714	137.110	638,77
8.	Cipedes	76.486	2,47	86.410	97.622	110.289	124.600	471,83
Jumlah		608.283	2,11	673.668	750.076	839.593	944.732	5.181.33

Sumber: RPJPD Kota Tasikmalaya, 2005-2025

Berdasarkan tabel 2.7. terlihat bahwa tanpa kebijakan Pemerintah Kota, Kecamatan Mangkubumi akan mengalami tekanan penduduk terbesar sebagai dampak perkembangan di pusat kota, padahal kecamatan tersebut memiliki kendala pada luas ketersediaan lahan yang mungkin dikembangkan. Kecamatan lain yang akan mengalami tekanan penduduk adalah Indihiang dan Cipedes (arah utara Kota Tasikmalaya), berdasar pada potensi lahan yang bisa dikembangkan sebagai wilayah terbangun. Jika hal ini terus dibiarkan, kemungkinan besar akan terjadi disparitas wilayah utara-selatan Kota Tasikmalaya.

Kecamatan Cibeureum memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (kedua, setelah Mangkubumi) tetapi perkembangannya terkendala aspek alam yaitu banyaknya sungai yang perlu diperhatikan terkait dengan masalah lingkungan. Selain itu jika arah pertumbuhan penduduk di kecamatan ini tidak dikendalikan, kondisi ketimpangan utara-selatan Kota Tasikmalaya akan semakin parah. Berdasarkan potensi lahan, sebenarnya Kecamatan Tamansari dan Kawalu memiliki potensi untuk menjadi area perluasan kota di masa mendatang. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pengembangan kota ke arah Kecamatan Tamansari dan Kawalu, diantaranya adalah:

1. Pemerintah Kota Tasikmalaya secara konsisten melaksanakan RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, dimana pembagian wilayah kota berdasar kepada masing-masing fungsinya;
2. Menambah prasarana dan sarana yang dibutuhkan agar pola persebaran penduduk bisa tertarik ke kedua kecamatan tersebut dan juga dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi;
3. Berdasarkan potensi lahan, kedua daerah tersebut masih mencukupi untuk menampung peningkatan penduduk kota, dan ini akan berdampak pada adanya keseimbangan dan pemerataan penduduk di wilayah Kota Tasikmalaya;
4. Namun perlu dipertimbangkan faktor mitigasi bencana di kedua kecamatan tersebut, karena sebagian area wilayah tersebut memiliki gerakan tanah yang cukup tinggi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp. 7.769.681,60 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 8.469.035,95 juta pada tahun 2010 dan menjadi Rp. 9.274.754,67 juta pada tahun 2011. Begitu pula dengan PDRB Kota Tasikmalaya atas dasar harga konstan tahun 2000 meningkat dari Rp. 3.668.628,20 juta pada tahun 2009 menjadi Rp. 3.878.723,40 juta pada tahun 2010 dan menjadi Rp. 4.104.241,73 juta pada tahun 2011. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.8 dan tabel 2.9.

Tabel 2.8.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011
I.	<i>Primer</i>	541.974,04	564.551,56	588.821,96
	1. Pertanian	541.561,03	564.114,73	588.362,27
	2. Pertambangan dan Penggalian	413,01	436,83	459,69
II.	<i>Sekunder</i>	2.150.169,27	2.364.373,24	2.678.562,85
	3. Industri Pengolahan	1.116.396,52	1.218.452,56	1.352.023,91
	4. Listrik Gas dan Air Bersih	146.283,06	159.504,72	173.995,31
	5. Bangunan	887.489,69	986.415,96	1.152.543,63

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011
III.	<i>Tersier</i>	5.077.538,30	5.540.111,14	6.007.369,87
	6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.473.419,35	2.747.793,42	3.026.903,36
	7. Pengangkutan dan Komunikasi	1.023.726,61	1.085.815,65	1.153.971,55
	8. Keuangan, Persewaan & JasaPerusahaan	677.459,82	734.715,32	796.053,10
	9. Jasa-jasa	902.932,52	971.786,75	1.030.441,86
PDRB		7.769.681,60	8.469.035,95	9.274.754,67

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2011

Tabel 2.9.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2009-2011 (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011
I.	<i>Primer</i>	297.299,01	300.582,49	304.455,75
	1. Pertanian	297.098,93	300.380,14	304.248,96
	2. Pertambangan dan Penggalian	200,08	202,35	206,79
II.	<i>Sekunder</i>	1.112.719,17	1.188.325,67	1.275.520,30
	3. Industri Pengolahan	653.935,23	685.918,42	719.085,75
	4. Listrik Gas dan Air Bersih	61.088,95	64.158,75	67.432,54
	5. Bangunan	397.695,00	438.348,50	489.002,01
III.	<i>Tersier</i>	2.258.610,02	2.389.715,21	2.524.265,67
	6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.122.539,13	1.215.773,81	1.309.905,71
	7. Pengangkutan dan Komunikasi	313.552,15	321.258,72	331.219,27
	8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	385.273,79	406.033,52	426.744,31
	9. Jasa-jasa	437.244,95	446.649,18	456.396,38
PDRB		3.668.628,20	3.878.723,40	4.104.241,73

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2011

2. Struktur Perekonomian

Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap sektor dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase sektoral terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak

sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10.

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
menurut Kelompok Sektor di Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2011

No.	Sektor	2009	2010	2011
I.	<i>Primer</i>	6,98	6,67	6,35
	1. Pertanian	6,97	6,66	6,34
	2. Pertambangan dan Penggalan	0,01	0,01	0,01
II.	<i>Sekunder</i>	27,67	27,92	28,89
	3. Industri Pengolahan	14,37	14,39	14,58
	4. Listrik Gas dan Air Bersih	1,88	1,88	1,88
	5. Bangunan	11,42	11,65	12,43
III.	<i>Tersier</i>	65,35	65,42	64,77
	6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	31,83	32,45	32,64
	7. Pengangkutan dan Komunikasi	13,18	12,82	12,44
	8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	8,72	8,68	8,58
	9. Jasa-jasa	11,62	11,47	11,11
PDRB		100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappeda dan BPS Kota Tasikmalaya

Dari tabel 2.10, selama tahun 2009-2011, sektor yang paling besar kontribusinya adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran kemudian sektor Industri Pengolahan. Berdasarkan kelompok sektor, maka sektor-sektor yang produksinya bukan dalam bentuk fisik (Tersier) berkontribusi dominan dalam penciptaan nilai tambah di Kota Tasikmalaya, sekitar 65%, disusul sektor-sektor yang mengolah bahan baku menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya (Sekunder) sekitar 28%. Sedangkan sektor-sektor yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam (Primer) kontribusinya semakin kecil, sekitar 7%.

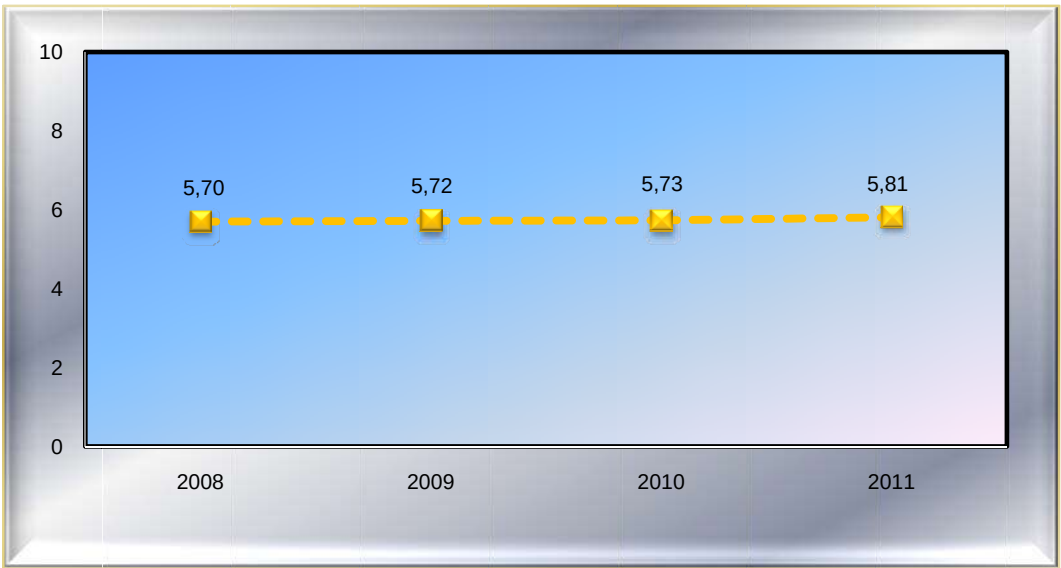
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. LPE Kota Tasikmalaya tahun 2009 sebesar 5,72 %, dan sebesar 5,73 % pada tahun 2010. Pada tahun 2011 LPE Kota Tasikmalaya

mengalami peningkatan yakni 5,81 %. Hal itu menunjukkan perekonomian Kota Tasikmalaya dalam keadaan terkendali dan diperkuat oleh angka inflasi yang berada dibawah 2 digit.

Grafik 2.2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2011



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2011

4. PDRB Menurut Penggunaan

Dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dari PDRB. Besarnya konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 sebesar Rp. 7,8 triliun, tahun 2010 sebesar Rp. 8,5 triliun, meningkat signifikan menjadi Rp. 9,2 triliun pada tahun 2011. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini dipengaruhi tingkat harga (inflasi), pertumbuhan penduduk serta pendapatan rumah tangga. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.11. berikut.

Tabel 2.11.

Persentase Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011

No.	Uraian	Tahun		
		2009	2010	2011
1.	PDRB adh berlaku (juta rupiah)	7.769.681,60	8.469.035,95	9.274.754,67
2.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga adh berlaku (juta rupiah)	4.074.646,24	4.392.975,81	4.671.305,39
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga thd PDRB (persen)		52,44	51,87	50,37

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2011

Selama tahun 2009-2011, konsumsi pemerintah cenderung stabil. Persentase Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2009 sebesar 9.77%, tahun 2010 sebesar 9,73% dan tahun 2011 sebesar 9,49%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pemerintah dalam tiga tahun terakhir relatif stabil proporsinya terhadap penggunaan dari dalam daerah dan penggunaan yang bersumber dari luar daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12.

Persentase Konsumsi Pemerintah Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Kota Tasikmalaya
Tahun 2009-2011

No.	Uraian	Tahun		
		2009	2010	2011
1.	Konsumsi Pemerintah adh berlaku (juta rupiah)	759.098,66	823.989,80	880.437,92
2.	Konsumsi Pemerintah adh konstan 2000 (juta rupiah)	456.221,30	482.409,53	508.597,76
3.	PDRB adh Berlaku (juta rupiah)	7.769.681,60	8.469.035,95	9.274.754,67
Persentase Konsumsi Pemerintah adh berlaku terhadap PDRB adh berlaku (persen)		9,77	9,73	9,49
Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah adh konstan (persen)		5,80	5,74	5,43

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2011

Kota Tasikmalaya memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel 2.13, PMTB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 3,4 trilyun pada tahun 2009 menjadi Rp. 3,8 trilyun pada tahun 2010 dan tahun 2011 menjadi Rp. 4,2 trilyun. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi sektor bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan sektor swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

Tabel 2.13.

Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Terhadap PDRB Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009-2011

No.	Uraian	Tahun		
		2009	2010	2011
1.	PDRB adh Berlaku (Juta rupiah)	7.769.681,60	8.469.035,95	9.274.754,67
2.	PMTB (Juta rupiah)	3.441.365,10	3.826.081,24	4.210.797,38
Persentase PMTB terhadap total PDRB (persen)		44,29	45,18	45,40

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2011

5. PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Tahun 2009, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 7.769.681,60; tahun 2010 sebesar Rp. 8.469.035,95; dan tahun 2011 menjadi Rp. 9.197.918,49. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Tasikmalaya karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat bisa digunakan PDRB perkapita atas dasar harga konstan. Tahun 2009 sebesar Rp. 5.867.833,53 menjadi sebesar Rp. 6.103.765,76 pada tahun 2010; sedangkan tahun 2011 sudah mencapai Rp. 6.372.651,87 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14.

Pendapatan Perkapita Kota Tasikmalaya dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2009-2011

No.	Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Rp.)	Pertumbuhan (%)
1.	2009	12.427.314,99	6,88	5.867.833,53	3,99
2.	2010	13.327.326,08	7,24	6.103.765,76	4,02
3.	2011	14.233.504,73	6,80	6.372.651,87	4,41

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2011

6. Laju Inflasi

Angka inflasi mencerminkan stabilitas perekonomian, jika angkanya dibawah 2 digit (dibawah 10%) mencerminkan relatif stabilnya perekonomian di wilayah tersebut dan sebaliknya. Selama tahun 2009 sampai 2011, secara umum inflasi di tingkat konsumen di Kota Tasikmalaya sekitar 4% sampai 5%, menunjukkan perekonomian Kota Tasikmalaya cukup terkendali dan stabil.

Menurut kelompok pengeluaran, hanya kelompok bahan makanan pada tahun 2010 yang inflasinya di atas 2 digit, menunjukkan terjadinya sedikit ketidakseimbangan dalam perekonomian. Sementara itu, terjadi deflasi pada tahun 2009 untuk kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, serta pada tahun 2010 untuk kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga.

Tabel 2.15.
Laju Inflasi Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2011

No.	Kelompok Pengeluaran	Laju Inflasi (%)		
		2009	2010	2011
	Umum	4,17	5,56	4,17
1.	Bahan makanan	2,79	16,73	6,38
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	8,15	3,53	3,27
3.	Perumahan, Air, Gas, dan Bahan Bakar	6,47	3,30	4,95
4.	Sandang	4,63	5,66	5,97
5.	Kesehatan	0,77	2,48	4,01
6.	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	2,45	-2,84	1,63
7.	Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-3,68	0,94	0,31

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dipahami dari sudut manusia, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan manusia memiliki dimensi pembangunan yang lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), pembangunan manusia secara holistik berupa proses untuk

memperluas pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*). Ini berarti fokus pembangunan adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara/wilayah.

IPM pertama kali diperkenalkan sebagai indikator yang komprehensif untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia pada *Human Development Report* (HDR) 1990. Indikator ini, disamping mengukur kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup juga mengukur kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat; tercermin dari nilai *purcashing power parity* (PPP). Indeks tersebut merupakan pendekatan yang mencakup dimensi-dimensi dari berbagai pilihan yang dimiliki manusia.

IPM dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga komponen yaitu (1) Indeks harapan hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) Indeks pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua pertiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); dan (3) Indeks standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (PPP).

Hasil penghitungan IPM berdasarkan data hasil survei IPM Kota Tasikmalaya tahun 2011 menunjukkan bahwa pencapaian IPM Kota Tasikmalaya tahun 2011 telah mencapai 74,82 yang terbentuk dari indeks kesehatan sebesar 75,05, indeks pendidikan sebesar 86,62 dan indeks daya beli sebesar 62,80.

Tabel 2.16.

IPM Kota Tasikmalaya dan Komponennya Tahun 2007-2011

No.	Komponen	2007	2008	2009	2010	2011*)
I.	NILAI					
	1. Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,78	69,13	69,49	69,86	70,03
	2. Angka Melek Huruf (Persen)	99,20	99,42	99,45	99,55	99,59
	3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,40	8,40	8,59	8,83	9,10
	4. Purchasing Power Parity (ribu Rupiah)	621,65	626,35	629,71	630,24	631,75

No.	Komponen	2007	2008	2009	2010	2011*)
II.	INDEKS					
	1. Indeks Kesehatan	72,97	73,55	74,15	74,77	75,05
	2. Indeks Pendidikan	84,80	84,95	85,39	85,99	86,62
	a. Indeks AMH	99,20	99,42	99,45	99,55	99,59
	b. Indeks RLS	56,00	56,00	57,27	58,87	60,67
	3. Indeks Daya Beli	60,47	61,55	62,33	62,45	62,80
	IPM	72,74	73,35	73,96	74,40	74,82

Sumber: BPS, diolah dari Susenas 2007-2010

**) Angka regional, diolah dari hasil Survei IPM Kota Tasikmalaya 2011*

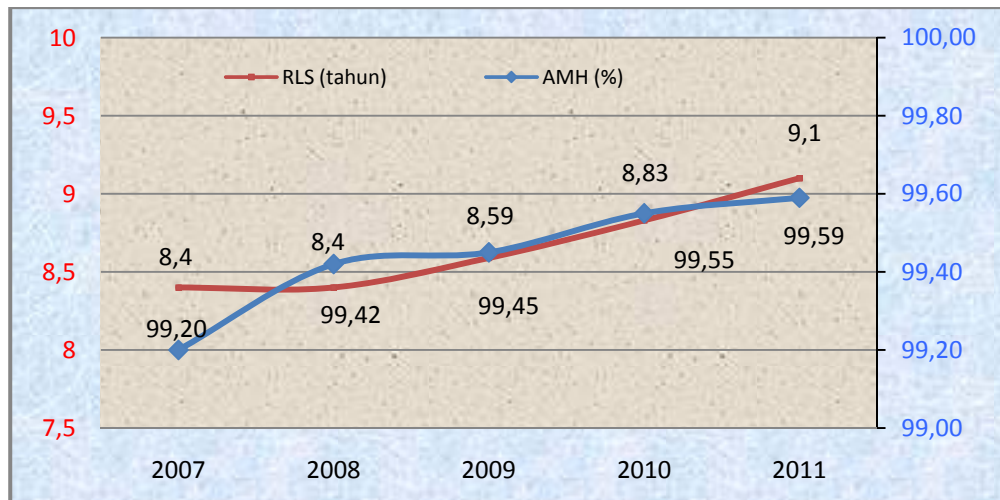
Tabel 2.16. memperlihatkan pencapaian IPM selama tahun 2007-2011. Dalam kurun waktu tersebut, pada seluruh komponen IPM terjadi peningkatan. IPM Kota Tasikmalaya bergerak naik dari 72,74 pada tahun 2007 menjadi 74,82 pada tahun 2011. Pergerakan yang sama terjadi pada ketiga komponen IPM yaitu indeks kesehatan meningkat dari 72,97 pada tahun 2007 menjadi 75,05 pada tahun 2011, indeks pendidikan meningkat dari 84,80 pada tahun 2007 menjadi 86,62 pada tahun 2011, sedangkan indeks daya beli meningkat dari 60,47 pada tahun 2007 menjadi 62,80 pada tahun 2011.

2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari media, menunjukkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angka melek huruf mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Grafik 2.3.

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah
di Kota Tasikmalaya Tahun 2007-2011



Sumber: BPS, Susenas 2007-2010, dan Survei IPM Kota Tasikmalaya 2011

Grafik 2.3. mengilustrasikan perkembangan angka melek huruf Kota Tasikmalaya periode 2007-2011 yang terus bergerak naik mendekati angka 100%, dari 99,20% pada tahun 2007, merangkak menuju 99,42% di tahun 2008, 99,45% di tahun 2009, 99,55% di tahun 2010 dan 99,59% di tahun 2011. Belum tercapainya angka melek huruf sebesar 100% karena adanya penduduk usia tua/56 tahun ke atas yang belum bisa baca-tulis karena belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali.

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Sejalan dengan angka melek huruf, capaian rata-rata lama sekolah di Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan meskipun cenderung melambat. Pada tahun 2007 capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di Kota Tasikmalaya sebesar 8,4 tahun meningkat perlahan setiap tahun hingga menembus 9 tahun pada tahun 2011. Masih besarnya proporsi penduduk yang hanya berpendidikan SD ke bawah mempunyai kontribusi sebagai penyebab lambatnya kemajuan rata-rata lama sekolah di Kota Tasikmalaya.

2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah. Jumlah grup

kesenian per 10.000 penduduk Kota Tasikmalaya, dari tahun 2007 sampai 2011, sekitar 2 grup. Gedung kesenian per 10.000 penduduk Kota Tasikmalaya sangat kecil yakni 0,02; secara riil hanya terdapat 1 gedung kesenian.

Tabel 2.17.

Perkembangan Seni dan Budaya di Kota Tasikmalaya Tahun 2007-2011

No	Capaian Pembangunan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah grup kesenian	125	130	132	159	163
2.	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Penduduk	603.449	615.011	625.210	635.464	646.216
4.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	2,07	2,11	2,11	2,50	2,52
5.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan BPS Kota Tasikmalaya

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya klub olahraga. Dari tahun 2007 sampai dengan 2011, jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk sekitar 2 sampai 3 klub. Sementara jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk hanya sekitar 0,6 gedung, artinya gedung olahraga masih kurang.

Tabel 2.18.

Perkembangan Olah Raga di Kota Tasikmalaya Tahun 2007-2011

No.	Capaian Pembangunan	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah klub olahraga	160	180	185	186	200
2.	Jumlah gedung olahraga	37	38	39	40	42
3.	Jumlah Penduduk	603.449	615.011	625.210	635.464	646.216
4.	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	2,65	2,93	2,96	2,93	3,09
5.	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	0,61	0,62	0,62	0,63	0,65

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dan BPS Kota Tasikmalaya

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia sekolah yang sedang bersekolah dibagi

seluruh jumlah penduduk usia sekolah. Usia sekolah SD adalah 7-12 tahun; usia sekolah SMP adalah 13-15 tahun dan usia sekolah SMU/K adalah 16-18 tahun.

Pada tahun 2011, APS SD/MI/Paket A sebesar 99,91% artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah sebesar 99,71%, sisanya 0,29% ada yang tidak/belum sekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah). Sementara itu, APS SMP/MTs/Paket B sebesar 98,63% dan APS SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 89,08%. Semakin tinggi tingkatan sekolah semakin turun APS-ya. Alasan yang melatarbelakangi antara lain kekurangan biaya, keterbatasan akses ke sekolah, keharusan mencari nafkah, menikah dan lain-lain.

Tabel 2.19.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2011

No.	Indikator	2008	2009	2011
1.	APS usia 7-12 tahun (SD)	99,61	99,69	99,91
2.	APS usia 13-15 tahun (SLTP)	93,19	93,42	98,63
3.	APS usia 16-18 tahun (SMU/K)	87,51	89,03	89,08

Sumber: Suseda Kota Tasikmalaya 2008, Survei IPM Kota Tasikmalaya 2009 & 2011

2. Ketersediaan Sekolah

Sebaran sekolah perkecamatan dapat terlihat pada tabel 2.20, untuk tingkat SD dan SMP relatif sebaran antarkecamatan cukup merata, namun sebaran SMA agak sedikit timpang, Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Cipedes dan Kecamatan Indihiang jumlahnya lebih banyak dibanding kecamatan lain. Persebaran ini dirasa masih kurang dalam menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan, rasio guru-murid dan rasio kelas-murid dapat melengkapinya.

Tabel 2.20.

Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya Tahun 2011

No.	Kecamatan	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK /MA	Jumlah
1.	Kawalu	42	15	11	68
2.	Tamansari	29	9	8	46
3.	Cibeureum	34	11	8	53
4.	Purbaratu	19	4	5	28

No.	Kecamatan	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK /MA	Jumlah
5.	Tawang	34	12	19	65
6.	Cihideung	36	10	12	58
7.	Mangkubumi	39	11	4	54
8.	Indihiang	21	10	13	44
9.	Bungursari	24	6	2	32
10.	Cipedes	38	8	10	56
Kota Tasikmalaya		316	96	92	504

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2011 (diolah dari data Dinas Pendidikan)

3. Rasio Guru-Murid

Besarnya rasio guru-murid (per 10.000) di Kota Tasikmalaya Tahun 2010, dihitung sebesar 525,69 untuk SD/MI, 780,26 untuk SMP/MTs, dan 864,10 untuk SMU/SMK/MA. Hal ini berarti jumlah beban murid yang harus diawasi, dibimbing serta diajar oleh seorang guru adalah sebanyak 20 orang murid di tingkat SD/MI, 14 orang murid di tingkat SMP/MTs dan 12 murid di tingkat SMU/SMK/MA. Adapun rasio kelas-murid terlihat masih sangat besar, baik untuk tingkat SD/MI maupun tingkat SMP/MTs yaitu sebesar 1:40, sedangkan pada tingkat SMU/SMK/MA terhitung sebesar 1:37. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21.

Rasio Guru-Murid dan Kelas-Murid di Kota Tasikmalaya Tahun 2010

No.	Tingkatan Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Kelas/Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Kelas-Murid
1.	1. SD/MI	3.782	77.606	1.909	525,69	1:40
2.	2. SMP/MTs	2.461	34.543	862	780,26	1:40
3.	3. SMU/SMK/MA	2.443	28.529	765	864,10	1:37

Sumber: Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2011 (diolah dari data Dinas Pendidikan)

Berdasarkan tabel 2.21, secara umum dapat dikatakan bahwa ketersediaan jumlah guru dan kelas dibandingkan dengan jumlah murid yang ada untuk seluruh jenjang pendidikan telah memadai. Ke depan upaya yang perlu dilakukan adalah penambahan Ruang Kelas/Rombongan Belajar atau bahkan penambahan jumlah sekolah, penataan guru dalam rangka pemerataan penyebaran dan peningkatan kualitas/kompetensi guru, peningkatan kualitas

sarana dan prasarana pendidikan, serta regulasi pendidikan sehingga pendidikan dapat dinikmati atau dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jika diamati secara rinci, semakin tinggi jenjang/tingkat pendidikan maka rasio murid-guru dan murid-kelas juga semakin menurun. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat partisipasi sekolah penduduk yang juga semakin menurun seiring dengan kenaikan jenjang/tingkat pendidikan. Dengan memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, maka kesempatan untuk memperoleh pendidikan, terutama pendidikan dasar, semakin terbuka karena pemerintah telah banyak menyediakan sarana dan prasarana. Oleh karena itu tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah juga harus ditingkatkan.

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

1. Nilai Investasi

Nilai investasi di Kota Tasikmalaya pada tahun 2011 sebesar Rp. 228.944.769.000,00 menurun hampir 9 milyar dibandingkan pada tahun 2010 sebesar Rp. 238.022.936.000,00. Penurunan investasi berasal dari komoditi industri agro dan hasil hutan serta industri tekstil, kulit dan aneka industri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.22.

Tabel 2.22.

Nilai Investasi di Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2011

No	Komoditi	2010 (000 Rp)	2011 (000 Rp)
1.	Industri Agro dan Hasil Hutan	53.181.787	48.636.645
2.	Industri Tekstil, Kulit dan Aneka Industri	181.281.721	176.624.095
3.	Industri Logam dan Bahan Galian	-	-
4.	Industri Kimia	3.559.428	3.684.029
Nilai Total		238.022.936	228.944.769

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2010-2011 (diolah dari data Dinas KUKM Perindag)

2. Ketenagakerjaan

Gambaran ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja, dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah dimana pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh faktor produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau faktor lain.

Berdasarkan data Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya, pada tahun 2011 jumlah pencari kerja tercatat sebanyak 5.425 orang, terdiri dari 2.956 orang laki-laki dan 2.469 orang perempuan; berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, pencari kerja tersebut terdiri dari Sarjana sebanyak 471 orang, Sarjana Muda sebanyak 272 orang, SLTA sebanyak 4.110 orang, SLTP sebanyak 182 orang, tamat SD dan tidak tamat SD sebanyak 34 orang. Sedangkan lowongan kerja yang terdaftar di Kota Tasikmalaya pada tahun 2011 sebanyak 899 orang, terdiri dari 105 laki-laki dan 794 perempuan, sedangkan lowongan kerja yang terpenuhi sebanyak 227 orang, terdiri dari 38 laki-laki dan 189 perempuan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Angka konsumsi rumah tangga perkapita di Kota Tasikmalaya selama periode 2009-2011 fluktuatif, pada tahun 2009 rasio angka konsumsi rumah tangga perkapita sebesar Rp. 516.107,00 meningkat menjadi Rp. 567.964,00 pada tahun 2010 namun menurun kembali menjadi Rp. 525.337,00 pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.23.

Tabel 2.23.

Angka Konsumsi Rumah Tangga perkapita di Kota Tasikmalaya
Tahun 2009-2011

No.	Uraian	Tahun		
		2009	2010	2011
1.	Total Pengeluaran RT	85.187.073.100	94.105.387.200	88.715.235.200
2.	Jumlah RT	165.057	165.689	168.873
3.	Rata-rata Pengeluaran RT	516.107	567.964	525.337

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya

2. Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Perkapita

Persentase konsumsi rumah tangga non pangan perkapita di Kota Tasikmalaya selama periode 2009-2011 fluktuatif, pada tahun 2009 rasio angka konsumsi rumah tangga perkapita sebesar 53,61%, menurun menjadi 48,35% pada tahun 2010

namun meningkat kembali menjadi 49,16% pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel 2.24.

Persentase Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan perkapita
di Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2011

No.	Uraian	Tahun		
		2009	2010	2011
1.	Rata-rata Pengeluaran RT Non Pangan	276.685	274.584	258.242
2.	Rata-rata pengeluaran RT	516.107	567.964	525.337
3.	Persentase	53,61	48,35	49,16

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya

2.4.2. Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Tasikmalaya menurun dari angka 10,45 pada tahun 2010 menjadi angka 7,81 pada tahun 2011. Penurunan terjadi pada kasus penganiayaan, pencurian dan penipuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.25.

Angka Kriminalitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2011

No.	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1.	Jumlah Kasus Narkoba	73	59
2.	Jumlah Kasus Pembunuhan	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	11	26
4.	Jumlah Kasus Penganiayaan	118	31
5.	Jumlah Kasus Pencurian	234	218
6.	Jumlah Kasus Penipuan	228	170
7.	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	-	1
8.	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun	664	505
9.	Jumlah Penduduk	635.464	646.216
10.	Angka Kriminalitas	10,45	7,81

Sumber : Polres Kota Tasikmalaya

2. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi di Kota Tasikmalaya pada tahun 2009 sebanyak 30 kasus, pada tahun 2010 sebanyak 31 kasus, dan

pada tahun 2011 sebanyak 31 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.26.

Tabel 2.26.

Jumlah Demonstrasi di Kota Tasikmalaya Tahun 2009-2011

No.	Uraian	Tahun		
		2009	2010	2011
1.	Bidang Politik	14	12	16
2.	Ekonomi	11	14	9
3.	Lainnya	5	5	6
	Jumlah	30	31	31

Sumber : Polres Tasikmalaya Kota dan Kantor Satpol PP (diolah)

2.4.3. Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

Pada tahun 2011, persentase penduduk Kota Tasikmalaya berusia 10 tahun ke atas yang berpendidikan SD/ sederajat sebesar 46,22%; tamat SLTP/ sederajat sebesar 16,14%; tamat SMU/ sederajat sebesar 17,94%; dan hanya 5,44% yang tamat pendidikan tinggi (akademi/ perguruan tinggi) artinya dari 1.000 penduduk usia 10 tahun ke atas, hanya 54 orang yang berkesempatan menyelesaikan pendidikan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.27.

Tabel 2.27.

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kota Tasikmalaya Tahun 2011

No.	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Penduduk 10 Tahun Keatas		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
1.	< SD	12,55	15,95	14,25
2.	SD/ sederajat	44,09	48,35	46,22
3.	SLTP / sederajat	17,23	15,05	16,14
4.	SMU/ sederajat	20,86	15,02	17,94
5.	Akademi/ PT	5,26	5,62	5,44
Kota Tasikmalaya		100	100	100

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2011

2. Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk adalah perbandingan penduduk yang belum/tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Pada tahun 2011, angka ketergantungan penduduk di Kota Tasikmalaya sebesar 52,30 artinya dari 100 orang penduduk usia produktif di Kota Tasikmalaya menanggung sekitar 52 orang penduduk usia tidak produktif.

Angka beban ketergantungan penduduk laki-laki sebesar 52,52 relatif lebih tinggi dibanding penduduk perempuan yang mencapai 52,07. Kondisi ini disebabkan relatif lebih banyaknya penduduk laki-laki usia di bawah 15 tahun dibandingkan penduduk perempuan, walaupun peluang hidup penduduk perempuan di usia lanjut relatif lebih baik dibanding penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.28.

Tabel 2.28.

Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Penduduk

Kota Tasikmalaya Tahun 2011

No	Kecamatan	Dependency Rasio		Laki-laki + Perempuan
		L	P	
1.	Kawalu	76,92	62,22	69,40
2.	Tamansari	45,60	57,89	51,41
3.	Cibeureum	56,43	48,32	52,32
4.	Purbaratu	54,29	51,49	52,90
5.	Tawang	54,26	48,00	51,06
6.	Cihideung	43,57	40,91	42,25
7.	Mangkubumi	41,12	50,00	45,36
8.	Indihiang	36,89	62,75	48,58
9.	Bungursari	63,25	38,73	50,01
10.	Cipedes	57,54	60,38	58,93
Kota Tasikmalaya		52,52	52,07	52,30

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2011

Tabel 2.29.

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tasikmalaya

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1.	Pertumbuhan PDRB (%)	5,98	5,70	5,72	5,73	5,81	
1.2.	Laju inflasi Kota(%)	7,72	12,07	4,17	5,56	4,17	
1.3.	PDRB per kapita adh konstan (Rp)	5.209.937,64	5.642.568,83	5.867.833,53	6.103.765,76	6.372.651,87	
1.4.	Indeks Gini (point)	-	-	-	0,3178	0,375	
1.5.	Indeks Pembangunan Manusia/IPM (point)	72,74	73,35	73,96	74,40	74,82	
1.5.1.	Indeks Kesehatan	72,97	73,55	74,15	74,77	75,05	
1.5.2.	Indeks Pendidikan	84,80	84,95	85,79	85,99	86,62	
1.5.3.	Indeks Daya Beli	60,47	61,55	62,33	62,45	62,80	
1.5.3.1	Purchasing Power Parity/PPP (Ribu Rupiah)	621,65	626,45	629,71	630,24	631,75	
Fokus Kesejahteraan Masyarakat							
1.	Pendidikan						
1.1.	Angka melek huruf (%)	99,20	99,42	99,45	99,55	99,59	99,61
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (thn)	8,40	8,40	8,59	8,83	9,10	9,32
1.3.	Angka partisipasi kasar						
1.3.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	107,1	108,79	108,33	110,34	111,44	112,77
1.3.2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	93,98	101,37	100,38	100,01	100,75	101,89
1.3.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	70,99	89,11	89,32	91,43	91,94	93,37
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan						
1.4.1.	Angka pendidikan yang ditamatkan (%) SD/MI/Paket A (%)	-	-	-	-	46,22	47,19
1.4.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan (%) SMP/MTs/Paket B (%)	-	-	-	-	16,14	17,11

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.4.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan (%) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	-	-	-	-	17,94	18,91
1.5.	Angka Partisipasi Murni						
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,64	99,58	99,52	99,46	99,40	99,34
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	93,81	93,75	93,69	93,63	93,57	93,51
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	75,19	75,13	75,07	75,01	74,95	74,89
2.	Kesehatan						
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000) Registrasi	989,91	991,16	988,69	989,11	989,54	989,63
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000) Survai	961,68	964,66	964,94	-	965,36	965,57
2.3.	Harapan Hidup (thn)	68,78	69,13	69,49	69,86	70,03	70,26
2.4.	balita gizi buruk (%)	1,044	0,696	0,542	0,148	0,149	0,19
2.5	Angka Kematian Bayi (per 1.000) Registrasi	10,09	8,84	11,31	10,89	10,46	10,37
2.6.	Angka Kematian Bayi (per 1.000) Survai	38,32	35,34	35,06	-	34,64	34,43
2.7.	atian Ibu (per 100.000)	-	-	158,3	161,3	202,2	182,2
3.	Ketenagakerjaan						
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja	89,84	89,13	91,59	91,84	90,86	
Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
1.	Kebudayaan						
1.1.	Jumlah grup kesenian (buah)	125	130	132	159	163	173
1.2.	Jumlah gedung (unit)	1	1	1	1	1	1
2.	Pemuda dan Olahraga						
2.1.	Jumlah klub olahraga (buah)	160	180	185	186	200	210
2.2.	Jumlah gedung olahraga (unit)	37	38	39	40	42	44
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Fokus Layanan Urusan Wajib							
1.	Pendidikan						
1.1.	Pendidikan dasar:						
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah						
1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A (%)	99,54	99,61	99,69	-	99,91	99,93

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.1.1.2	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B (%)	92,30	93,19	93,42	-	98,63	98,73
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (per 10.000)	38,02	39,06	40,16	42,02	43,29	46,08
1.1.3.	Rasio guru/murid (per 10.000)						
1.1.3.1	Rasio guru/murid SD/MI/Paket A (per 10.000)	-	512,05	520,44	525,69	535,80	543,70
1.1.3.2	Rasio guru/murid SMP/MTs/Paket B (per 10.000)	-	743,75	745,91	780,26	783,63	786,05
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (per 10.000)						
1.1.4.1	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI/Paket A (per 10.000)	-	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27
1.1.4.2	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs/Paket B (per 10.000)	-	0,85	0,81	0,80	0,79	0,79
1.2.	Pendidikan menengah:						
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA/Paket C (%)	85,35	87,51	89,03	-	89,08	89,19
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (per 10.000)	20,58	23,61	25,28	25,32	25,32	25,32
1.2.3.	Rasio guru/murid SMA/SMK/MA/Paket C (per 10.000)	-	835,46	851,35	864,10	933,93	944,14
1.2.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA/Paket C (per 1.000)	-	0,90	0,90	0,90	0,92	0,92
1.2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	99,00	99,00	99,52	99,59	99,65	99,75
1.3.	Fasilitas Pendidikan:						
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	1392	1415	1452	1602	1802	1852
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	1010	1199	1356	1447	1554	1654
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):						
1.4.1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	37,46	51,57	69,07	69,26	70,89	70,72
1.5.	Angka Putus Sekolah:						

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,6	0,63	0,58	0,51	0,46	0,35
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,44	0,41	0,39	0,37	0,25	0,46
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	0,72	0,61	0,56	0,42	0,38	0,31
1.6.	AngkaKelulusan:						
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100	100	100
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,25	99,50	99,84	100	100	100
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	99,80	99,82	99,83	98,89	99,95	99,97
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	98,48	98,82	99,53	99,63	99,79	99,83
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	99,48	97,82	98,53	99,59	99,62	99,79
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	49,51	50,82	54,50	62,37	68,68	72,11
2.	Kesehatan						
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000)#	12,36	13,68	14,54	14,99	15,28	14,86
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 1.000)	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 1.000)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	0,50	0,51	0,51	0,51	0,55	0,55
2.5.	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk (per 1.000)	1,90	1,92	2,11	2,49	2,49	2,49
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	21,22	22,5	23,18	69,94	64,71	74
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	75,00	75,56	77,55	87,35	90,49	86,85
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	39,13	47,83	100	100	85,51	90
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	59,67	62,03	71,59	79,8	85,01	85,01

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	-	-	-	-	100	100
2.13.	Cakupan kunjungan bayi (%)	68,00	69,50	70,56	56,43	90	94,78
2.14.	Cakupan puskesmas (per kecamatan) (%)	200	200	200	200	200	200
2.15.	Cakupan puskesmas pembantu (per kelurahan) (%)	28,98	28,98	28,98	28,98	30,43	30,43
3.	Pekerjaan Umum						
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (point)	0,14	0,19	0,28	0,44	0,50	0,52
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi (point)	-	0,004	0,006	0,009	0,01	0,01
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1.000)	5,17	5,09	5,17	5,24	5,46	5,46
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	27,51	24,50	22,57	51,75	55,57	64,41
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum milik pemerintah per satuan penduduk (per 1.000)	59,66	58,54	89,57	88,12	86,66	85,25
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (M ³ per 1.000)	234,82	249,91	272,53	272,53	277,74	267,07
3.7.	Rasio rumah layak huni (point)	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19
3.8.	Rasio permukiman layak huni (point)	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km/orang)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
3.10.	Persentase pemukiman penduduk yang belum dilalui mimal roda 4 (%)	0	0	0	0	0	0
3.11.	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	53,00	58,00	67,00	82,00	89,00	91,00
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	-	-	-	-	-	5,3
3.13.	Panjang jalan yang memiliki trotoar (%)	16	16	18	20	23	25
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	39,79	39,81	39,84	39,86	39,90	39,91

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	50	50	50	50	50	50
3.16.	Luas irigasi Kota dalam kondisi baik (%)	-	39	56	63	63	64
3.17.	Lingkungan Pemukiman (%)	0,45	0,42	0,39	0,37	0,34	0,32
4.	Perumahan						
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	92	92	93	94	96	97
4.2.	Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	33,94	30,06	26,05	52,59	55,92	61,78
4.3.	Lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,40	0,39	0,37	0,35	0,33	0,31
4.4.	Rumah layak huni (%)	92,54	93,11	93,87	94,33	94,75	95 ,32
5.	Penataan Ruang						
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	18,35	19,35	19,85	20,85	21,35	21,85
5.2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	27,68	30,68	33,97	34,24	45,38	49,87
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	1,25	1,25	1,25	2,5	2,5	2,5
6.	Perencanaan Pembangunan						
6.1.	Tersedianya RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersedianya RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Tersedianya RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Perhubungan						
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	758.040	747.224	730.709	723.160	713.367	647.501
7.2.	Rasio ijin trayek (per 10.000 penduduk)	22,9	22,5	22,1	22,9	21,1	21,5
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum (buah)	12.534	12.562	12.870	13.009	13.361	13.834
7.4.	Jumlah Terminal Bis (unit)	5	5	5	5	5	5
7.5.	Angkutan darat (%)	0,380	0,384	0,392	0,399	0,377	0,428
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum (%)	1,46	2,33	16,16	25,43	19,36	16,71
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	40	40	40	40	40	40

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	85.000
7.9.	Pemasangan Rambu-rambu (%)	10,00	9,07	6,73	25,40	4,47	16,40
8.	Lingkungan Hidup						
8.1.	Persentase penanganan sampah (%)	28	28	28	27	28	38
8.2.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	21,92	23,10	24,36	25,68	27,08	28,56
8.3.	Persentase luas pemukiman yang tertata (%)	64,83	65,39	65,79	66,37	66,95	67,52
8.4.	Pemantauan pencemaran status mutu air (%)	8,33	8,33	58,33	83,33	55,00	60,00
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah Sumber Mata Air (%)	-	-	-	-	-	26,78
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	100	100	100	100	100	100
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	23	25	27	27	28	27
8.8.	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100	100
9.	Pertanahan						
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	25	27	30	33	35	38
9.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	0	0	0	0	0	0
9.3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	100	100	100	100
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil						
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	65,00	68,00	70,40	75,50	80,00	85,00
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	58,81	44,13	55,83	57,49	62,63	58,44
10.3.	Jumlah pasangan yang membuat akte nikah non muslim (buah)	62	64	83	91	132	136
10.4.	Kepemilikan KTP (orang)	242.078	266.088	276.472	299.778	326.335	410.660
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (per 1.000)	471	468	492	526	599	611
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
11.1.	Persentase partisipasi PNS perempuan Pemkot per angkatan kerja perempuan (%)	-	-	-	-	2,37	2,37
11.2.	Jumlah KDRT yang dilaporkan (kasus)	-	-	-	-	12	38
11.3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	32,22	35,23	48,40	43,94	41,08	42,06
11.4.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
12.1.	Total Fertility Rate (TFR) (point)	-	2,72	2,62	2,56	2,55	2,54
12.2.	Rasio akseptor KB (%)	-	73,13	74,16	75,04	74,75	75,00
12.3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	-	73,13	74,16	75,04	74,75	75,00
12.4.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK)	-	76.451	73.717	70.931	70.419	63.377
13.	Sosial						
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (%)	0,25	1,40	3,21	4,25	5,21	5,42
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)#	3,2	4,3	3,2	4,2	4,91	5,61
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1,25	2,40	3,40	2,15	3,15	4,10
14.	Ketenagakerjaan						
14.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	54,13	54,55	64,67	63,18	61,15	-
14.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	2,17	3,35	3,91	4,21	4,50	2,25
14.3.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	8,66	5,17	0,89	3,58	4,18	6,67
14.4.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	10,16	10,87	8,41	8,16	9,14	-
14.5.	Keselamatan dan perlindungan (%)	1,8	2,9	3,4	2,7	2,1	5,6
14.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	0	0	0	0
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
15.1.	Persentase koperasi aktif (%)	72,07	74,87	77,04	65,04	66,16	67,49

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)	1.051	2.062	3.124	4.295	5.933	7.131
15.3.	Jumlah BPR/LKM (unit)	318	340	372	355	368	389
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil (%) (terdaftar)	113,60	99,80	93,79	90,13	88,13	86,49
16.	Penanaman Modal						
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit)	2	2	2	2	2	2
16.2.	Jumlah nilai investasi (Rp.000)	-	-	-	238.022.936	228.944.769	-
17.	Kebudayaan						
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	3	3	4	5	5
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	3	4	6	7	8	9
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	2	2	3	4	4	13
18.	Kepemudaan dan Olahraga						
18.1.	Jumlah organisasi pemuda (buah)	50	50	56	60	64	64
18.2.	Jumlah organisasi olahraga (buah)	17	17	24	28	33	33
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	6	6	7	10	10	13
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga yang dilakukan pemerintah (kali)	3	4	5	2	3	1
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah)	1	1	1	1	1	1
18.6.	Lapangan olahraga (buah)	70	71	73	75	78	80
19.	Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri						
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)	-	1	1	1	1	2
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)	-	-	-	-	4	4
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (per 10.000)	1,7	1,5	1,3	1,3	1,7	1,1
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (per 10.000)	48	45	46	45	44	37

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan (%)	21	22	23	23	24	24
20.4.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,98	5,70	5,72	5,73	5,81	-
20.5.	Persentase Penduduk Miskin(%)	-	26,08	23,55	20,71	19,98	-
20.6.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah (ada/tidak)	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada
20.7.	Penegakan PERDA (%)	69	72	83	87	90	92
20.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP (orang)	20	17	17	16	15	14
20.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota (%)	80	82	86	81	82	84
20.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Wilayah Kota (%)	0,0048	0,0045	0,0046	0,0045	0,0044	0,0037
20.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%)	4,97	4,88	4,79	4,72	6,19	6,09
20.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	51,7	62,5	46,51	39,47	62,5	43,11
20.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik (%)	-	8,70	14,49	33,33	42,03	49,28
20.14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda (buah)	2	2	3	6	6	11
20.15.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (point)	-	-	-	-	-	-
21.	KetahananPangan						
21.1.	Ketersediaan pangan utama (%)	77,38	73,42	83,74	90,46	79,28	73,58
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (buah)	-	-	-	207	207	207
22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (buah)	-	-	-	207	207	207
22.3.	Jumlah LSM (buah)	54	13	29	14	26	18
22.4.	LPM Berprestasi (%)	-	-	-	-	13	20
22.5.	PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	100
22.6.	Posyandu aktif (unit)	700	716	729	746	776	787

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
22.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	-	-	-	70	70	60
23.	Statistik						
23.1.	Buku "kota dalam angka" (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2.	Buku "PDRB kota" (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24.	Kearsipan						
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku (%)	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	1	1	1	-	-	1
25.	Komunikasi dan Informatika						
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi (unit)	-	-	0,079	0,079	0,078	0,059
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk (per 1.000)	-	-	0,306	0,315	0,309	0,309
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal (buah)	-	-	21	21	21	21
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (buah)	-	-	32	33	34	34
25.5.	Web site milik pemerintah daerah (ada/tidak)	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada
25.6.	Pameran/expo (kali)	-	-	1	1	1	1
26.	Perpustakaan						
26.1.	Jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah (buah)	45	50	55	60	84	94
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	2,53	2,59	2,74	3,19	3,67	3,96
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	34,37	34,28	35,48	35,30	35,06	39,91
26.4.	Eksemplar buku per jumlah penduduk Kota Tasikmalaya (%)	1,31	2,30	2,84	3,03	3,42	3,70
Fokus Layanan Urusan Pilihan							
1.	Pertanian						
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)	55,46	56,82	58,14	60,68	61,32	62,05
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/tanaman bahan makan terhadap PDRB (%)	3,57	3,39	3,25	3,11	2,92	-

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.3.	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	-
1.4.	Cakupan bina kelompok petani (%)	-	-	11,29	39,37	35,56	39,80
2.	Kehutanan						
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	64,84	-	-	13,70	8,55	6,68
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	0	0	0	0	0	0
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral						
3.1.	Pertambangan tanpa ijin (%)	-	-	-	68,78	55,94	38,84
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-
4.	Pariwisata						
4.1.	Kunjungan wisata (orang)	13.097	228.678	354.886	256.659	257.557	328.076
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	7,86	7,72	7,80	7,73	7,67	7,67
5.	Kelautan dan Perikanan						
5.1.	Produksi perikanan (%)	82,92	89,03	98,03	94,82	100,01	95,00
5.2.	Konsumsi ikan (%)	97,00	95,71	93,62	92,29	98,05	97,54
6.	Perdagangan						
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	21,22	22,07	22,80	23,61	24,65	25,13
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan (Rp.)	(71,705 M)	(223,216 M)	(144,095 M)	(96,070 M)	(226,592 M)	(51,381 M)
7.	Perindustrian						
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	18,03	17,91	17,83	17,68	17,52	-
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	18,03	17,91	17,83	17,68	17,52	-
7.3.	Pertumbuhan Industri (%).	3,05	2,23	3,92	3,02	2,99	1,42
7.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	24,62	3,68	4,82	6,30	12,57	12,12
8.	Ketrasmigrasian						
8.1.	Transmigran swakarsa (%)	0	0	0	0	0	0
8.2.	Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	-	-	-	-	-	-
ASPEK DAYA SAING DAERAH							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	-	-	516.107	567.964	525.337	535.337
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	-	-	53,61	48,35	49,16	-
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur							
1.	Perhubungan						
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km/buah)	0,00810	0,00530	0,00500	0,00440	0,00400	0,00400
1.2.	Jumlah penumpang yang terangkut angkutan umum (orang)	6.325.678	6.494.363	6.437.010	6.199.165	6.078.564	4.924.763
1.3.	Jumlah penumpang melalui terminal per tahun (orang)	380.124	375.843	368.477	364.365	361.507	271.130
2.	Penataan Ruang						
2.1.	Luas wilayah industri (%)	0	0	0	0	0	0
2.2.	Luas wilayah banjir (%)	0	0	0	0	0	0
2.3.	Luas wilayah perkotaan (%)	100	100	100	100	100	100
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang (buah)	-	-	-	-	30	44
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (buah)	-	-	-	-	-	8
3.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (buah)	30	41	45	69	76	81
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel (buah)	28	30	33	33	35	35
4.	Lingkungan Hidup						
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%)#	21,85	23,03	24,29	25,61	27,00	28,47
5.	Komunikasi dan Informatika						

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
5.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)#	-	99,24	99,53	-	99,51	-
5.2.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)#	0	0	69,59	72,46	72,75	75,00
Fokus Iklim Berinvestasi							
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1.	Angka kriminalitas (per 10.000)#	-	19	12	23	5	7
1.2.	Jumlah demo (kali)	-	15	30	31	31	20
1.3.	Lama proses perijinan(hari)	-	-	14	14	14	14
1.4.	Jumlah pajak dan retribusi daerah (buah)	30	31	31	31	33	26
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah)	2	3	5	2	2	-
Fokus Sumber Daya Manusia							
1.	Ketenagakerjaan						
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (per 10.000)#	0,06	0,48	0,41	0,54	0,07	0,11
1.2.	Rasio ketergantungan (%)	-	-	-	-	52,30	-

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN KERANGKA PENDANAAN

Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas. Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2007- 2011

Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBD dan neraca keuangan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah.

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dengan kekayaannya tersebut pemerintah daerah membuat program/kegiatan belanja untuk menjawab kebutuhan pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam isu strategis baik jangka pendek/tahunan maupun jangka menengah dan jangka panjang.

Struktur Pendapatan Daerah, berdasarkan peraturan yang berlaku terdiri dari:

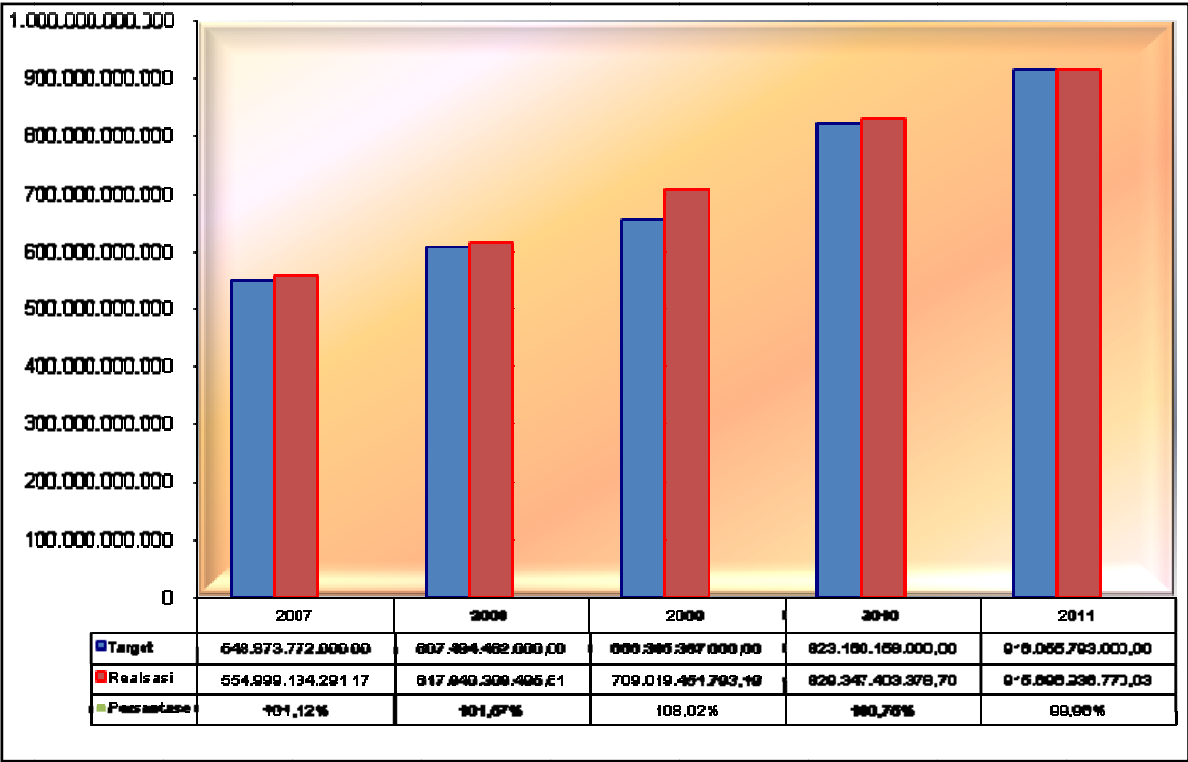
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan daerah lain, dana

penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam pencapaian realisasi pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah tahun 2007 yaitu sebesar 548,873 milyar rupiah atau 101,12% dari target, meningkat menjadi 915,696 milyar rupiah atau 99,96% dari target pada tahun 2011. Selengkapnya rincian target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2007-2011 dapat dilihat pada grafik 3.1.

Grafik 3.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007-2011

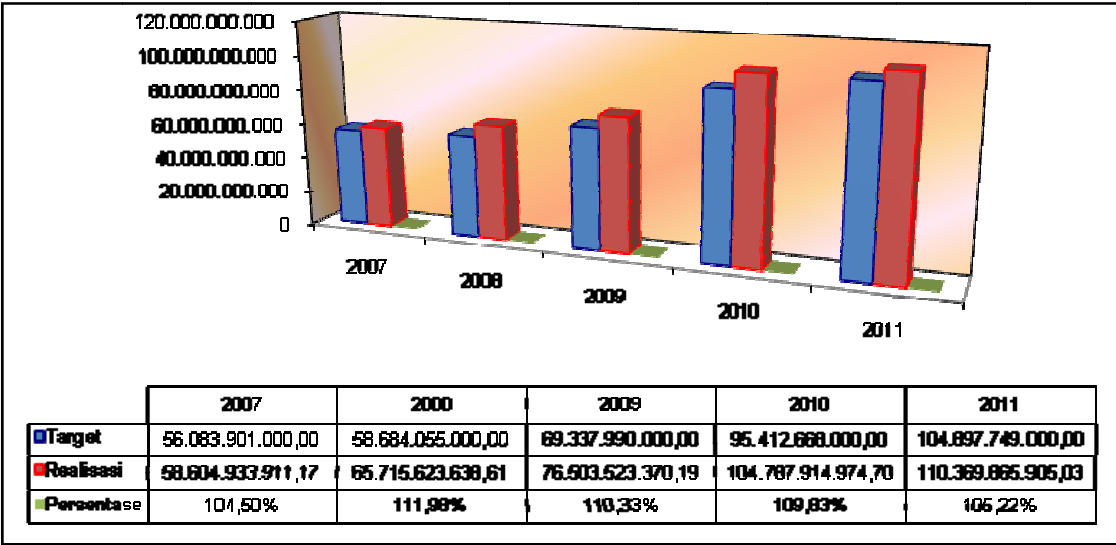


3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2007, Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya dari target 56,083 milyar rupiah realisasinya 58,604 milyar rupiah (104,50%), selanjutnya meningkat cukup signifikan pada tahun 2011 dari target sebesar 104,897 milyar rupiah realisasinya sebesar 110,369 milyar rupiah (105,22%). Untuk lebih jelasnya lihat grafik 3.2.

Grafik 3.2.

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2007-2011

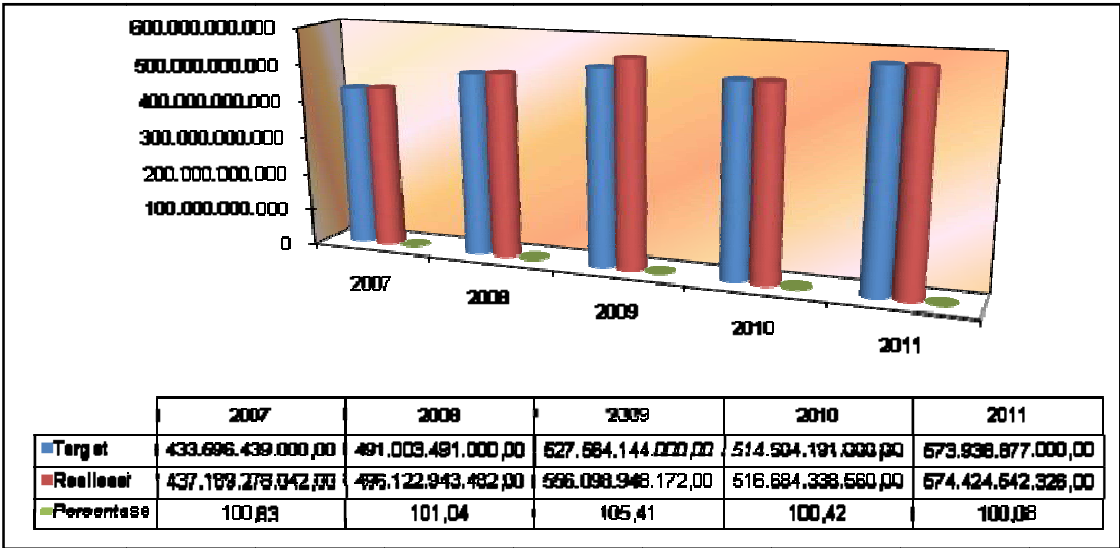


3.1.1.2. Dana Perimbangan

Selama tahun 2007-2011, realisasi dana perimbangan mengalami peningkatan positif, hal ini terlihat dari target dana perimbangan tahun 2007 sebesar 433,596 milyar rupiah realisasinya 437,189 milyar rupiah (100,83%); dan tahun 2011 dari target sebesar 573,938 milyar rupiah realisasinya 574,424 milyar rupiah (100,08%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.3.

Grafik 3.3.

Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2007-2011



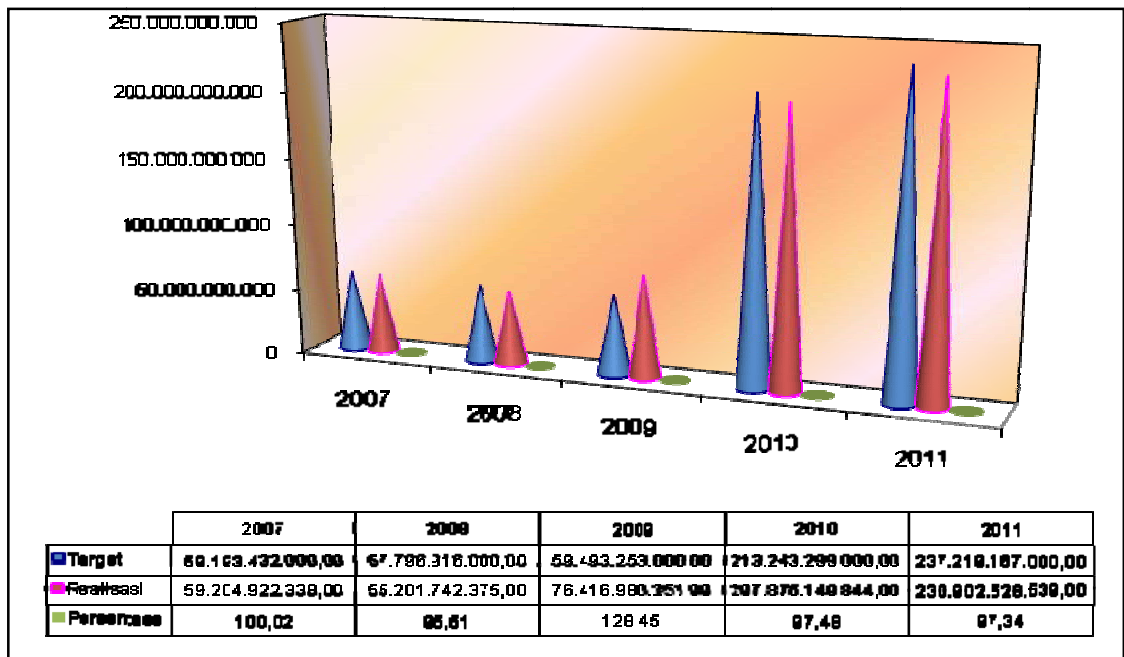
3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun 2007, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan 59,193 milyar rupiah terealisasi sebesar 59,204 milyar rupiah (100,02%), tahun 2008 ditargetkan 57,796 milyar rupiah realisasinya sebesar 55,201 milyar rupiah (95,51%), tahun 2009

ditargetkan 59,493 milyar rupiah realisasinya 76,416 milyar rupiah (128.45%), tahun 2010 di targetkan 213,243 milyar rupiah realisasinya 207,875 milyar rupiah (97,48%), tahun 2011 di targetkan 237,219 milyar rupiah realisasinya 230,902 milyar rupiah (97,34%). Terdapat kenaikan yang signifikan dari tahun 2009 ke 2010 dan 2011 karena penambahan sumber pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.4.

Grafik 3.4.

Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Tahun 2007-2011



3.1.2. Belanja Daerah

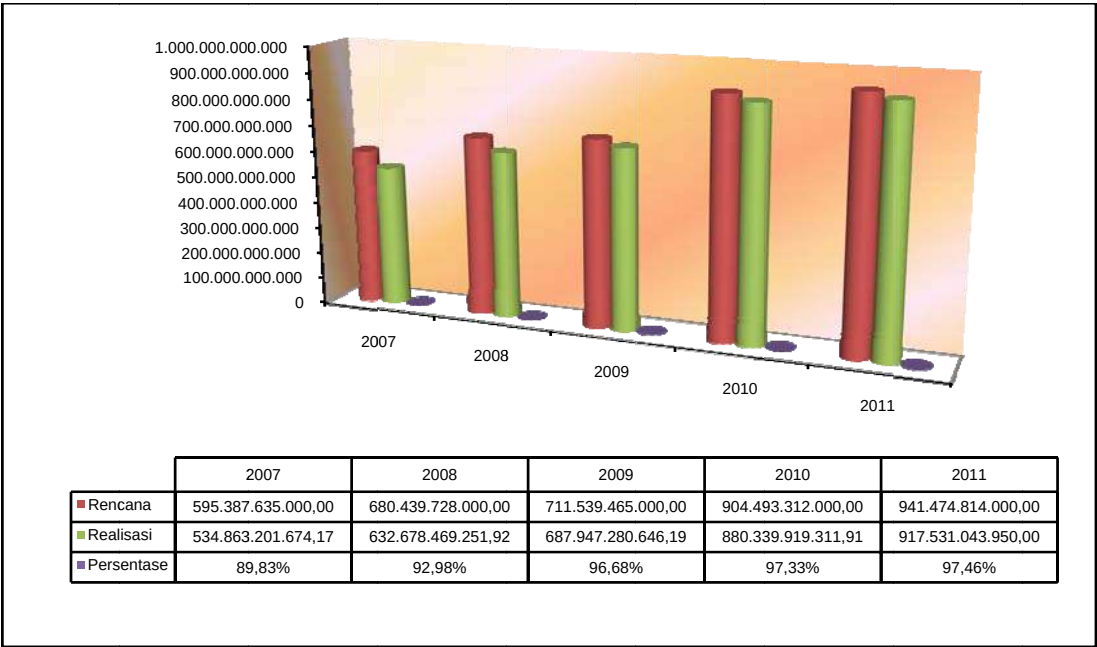
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari tahun 2007-2011, total akumulasi realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 3,653 triliun rupiah dari rencana sebesar 3,833 triliun rupiah (95,31%). Belanja daerah tersebut terbagi atas 2 jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu belanja pegawai; bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. Adapun kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.5.

Grafik 3.5.

Target dan Realisasi Belanja Tahun 2007-2011

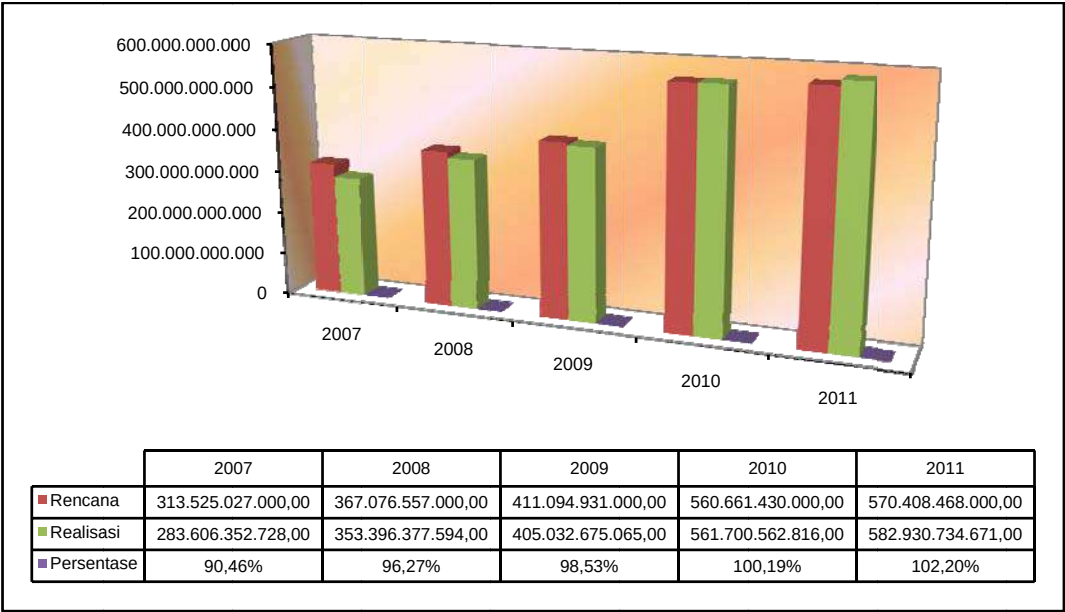


3.1.2.1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi belanja tidak langsung dari tahun 2007-2011 sebesar 2,187 triliun rupiah dari rencana sebesar 2,223 triliun rupiah. Rincian rencana dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada grafik 3.6.

Grafik 3.6.

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2007-2011

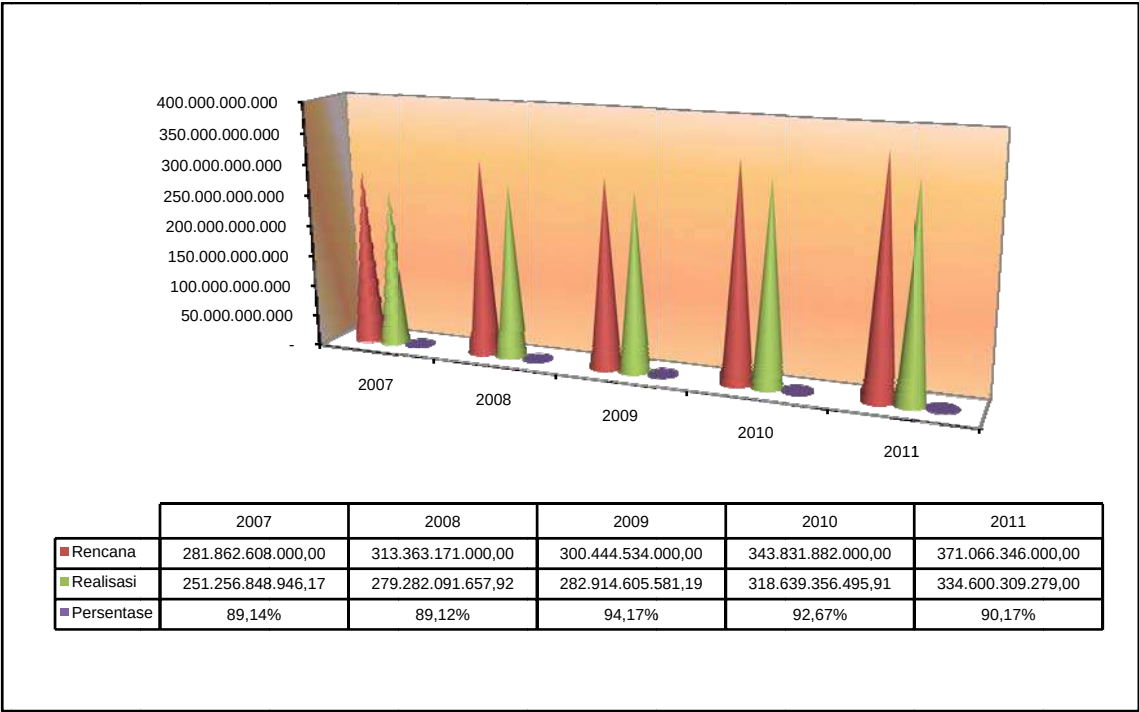


3.1.2.2. Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung dari Tahun 2007-2011 sebesar 1,467 triliun rupiah. Rincian rencana dan realisasi belanja langsung dapat dilihat pada grafik 3.7.

Grafik 3.7.

Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2007-2011



3.1.3. Neraca Daerah

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran; laporan arus kas; neraca; dan catatan atas laporan keuangan. Neraca menggambarkan posisi

keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Neraca Pemerintah Kota Tasikmalaya Per 31 Desember Tahun 2007-2011

NO	URAIAN	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010	TAHUN 2011
1	ASET					
2	ASET LANCAR					
3	Kas di Kas Daerah	69.991.039.266,00	48.238.314.974,00	71.178.950.945,00	17.931.669.669,00	15.756.291.798,14
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.736.400.540,75	4.282.332.682,21	1.624.657.792,21	1.380.713.421,00	2.758.781.534,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	6.358.533.576,00	11.028.256.368,00	9.512.104.605,11	0,00
6	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	473.187.553,00	26.248.125,00
7	Piutang Retribusi	0,00	0,00	233.316.855,00	377.015.015,00	257.312.225,00
8	Piutang Lainnya	7.793.179.256,00	5.245.987.914,15	16.352.104.329,00	7.350.119.159,00	9.808.553.387,00
9	Persediaan	2.300.281.407,00	6.031.331.158,00	5.444.407.400,00	5.231.726.148,00	8.593.045.620,76
10	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 9)	81.820.900.469,75	70.156.500.304,36	105.861.693.689,21	42.256.535.570,11	37.200.232.689,90
11						
12	INVESTASI JANGKA PANJANG					
13	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jumlah Investasi Nonpermanen (13 s/d 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Investasi Permanen					
16	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	15.700.000.000,00	17.000.000.000,00	68.137.457.722,48
17	Jumlah Investasi Permanen (16 s/d 16)	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	15.700.000.000,00	17.000.000.000,00	68.137.457.722,48
18	Jumlah Investasi Jangka Panjang (13 + 16)	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	15.700.000.000,00	17.000.000.000,00	68.137.457.722,48
19						
20	ASET TETAP					
21	Tanah	31.384.983.680,00	130.111.386.279,00	363.826.372.350,00	407.772.955.006,43	376.701.863.815,43
22	Peralatan dan Mesin	59.624.024.640,60	85.446.979.905,50	176.169.444.470,00	384.154.242.720,00	376.165.127.626,47
23	Gedung dan Bangunan	149.329.118.697,00	200.423.193.116,14	284.306.308.120,00	403.972.170.974,00	415.160.374.130,01
24	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	110.921.958.392,17	881.212.463.810,88	952.003.385.060,00	1.016.231.080.951,65	1.066.956.835.204,67
25	Aset Tetap Lainnya	7.748.642.214,00	5.584.920.670,00	12.759.693.570,00	149.016.226.794,00	36.129.405.303,35
26	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	3.960.094.000,00	4.874.276.000,00	0,00
27	Jumlah Aset Tetap (21 s/d 26)	359.008.727.623,77	1.302.778.943.781,52	1.793.025.297.570,00	2.366.020.952.446,08	2.271.113.606.079,93
28						
29	DANA CADANGAN					
30	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.973.179,29
31	Jumlah Dana Cadangan (30 s/d 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.973.179,29
32						
33	ASET LAINNYA					
34	Tuntutan Perbendaharaan	385.562.500,00	375.962.500,00	572.856.844,00	355.600.000,00	344.600.000,00
35	Tuntutan Ganti Rugi	137.523.500,00	119.893.000,00	98.605.500,00	86.055.500,00	84.405.500,00
36	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	3.478.378.078,00	3.478.378.078,00
37	Jumlah Aset Lainnya (34 s/d 36)	523.086.000,00	495.855.500,00	671.462.344,00	3.920.033.578,00	3.907.383.578,00
38	JUMLAH ASET (10 + 18 + 27 + 31 + 37)	454.352.714.093,52	1.386.431.299.585,88	1.915.258.453.603,21	2.429.197.521.594,19	2.385.360.653.249,60
39						
40						
41	KEWAJIBAN					
42	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
43	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Utang Bunga	6.600.500,60	4.828.989,69	0,00	0,00	0,00
45	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	18.709.712,14	18.709.712,14	18.709.712,14	18.709.702,84	0,00
46	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.676.091.670,00	10.746.643.358,00	8.560.785.035,00	11.781.490.675,56	13.617.116.469,40
47	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (43 s/d 46)	3.701.401.882,74	10.770.182.059,83	8.579.494.747,14	11.800.200.378,40	13.617.116.469,40
48						
49	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
50	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	56.129.136,42	37.419.424,28	18.709.702,84	0,00	0,00
51	Utang Jangka Panjang Lainnya	9.222.913,61	4.393.923,92	0,00	0,00	0,00
52	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (50 s/d 51)	65.352.050,03	41.813.348,20	18.709.702,84	0,00	0,00
53	JUMLAH KEWAJIBAN (47 + 52)	3.766.753.932,77	10.811.995.408,03	8.598.204.449,98	11.800.200.378,40	13.617.116.469,40
54						
55						
56	EKUITAS DANA					
57	EKUITAS DANA LANCAR					
58	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	71.727.439.806,75	52.520.647.656,21	72.803.608.737,21	19.312.383.090,00	18.515.073.332,14
59	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	6.358.533.576,00	11.028.256.368,00	9.512.104.605,11	0,00
60	Cadangan Piutang	7.793.179.256,00	5.245.987.914,15	16.585.421.184,00	8.200.321.727,00	10.092.113.737,00
61	Cadangan Persediaan	2.300.281.407,00	6.031.331.158,00	5.444.407.400,00	5.231.726.148,00	8.593.045.620,76
62	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(3.701.401.882,74)	(10.770.182.059,83)	(8.579.494.747,14)	(11.800.200.378,40)	(13.617.116.469,40)
63	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (58 s/d 62)	78.119.498.587,01	59.386.318.244,53	97.282.198.942,07	30.456.335.191,71	23.583.116.220,50
64						
65	EKUITAS DANA INVESTASI					
66	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	15.700.000.000,00	17.000.000.000,00	68.137.457.722,48
67	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	359.008.727.623,77	1.302.778.943.781,52	1.793.025.297.570,00	2.366.020.952.446,08	2.271.113.606.079,93
68	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	523.086.000,00	495.855.500,00	671.462.344,00	3.920.033.578,00	3.907.383.578,00
69	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(65.352.050,03)	(41.813.348,20)	(18.709.702,84)	0,00	0,00
70	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (66 s/d 69)	372.466.461.573,74	1.316.232.985.933,32	1.809.378.050.211,16	2.386.940.986.024,08	2.343.158.447.380,41
71						
72	EKUITAS DANA CADANGAN					
73	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.973.179,29
74	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (73 s/d 73)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.973.179,29
75						
76	JUMLAH EKUITAS DANA (63 + 70+74)	450.585.960.160,75	1.375.619.304.177,85	1.906.660.249.153,23	2.417.397.321.215,79	2.371.743.536.780,20
77	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (53 + 76)	454.352.714.093,52	1.386.431.299.585,88	1.915.258.453.603,21	2.429.197.521.594,19	2.385.360.653.249,60

Dari tabel 3.1, rata-rata pertumbuhan aktiva atau aset Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2007-2011 sebesar 61,76% yang menandakan bahwa jumlah aktiva/aset Pemerintah Kota Tasikmalaya meningkat cukup signifikan. Aset tersebut terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Namun dari tahun 2010 ke 2011 total aset mengalami penurunan. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan di aset lancar, tanah, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset lancar yang terdiri atas kas, piutang, dan persediaan tetap tumbuh cukup baik walaupun rata-rata pertumbuhannya hanya 0,83%. Investasi jangka panjang berupa penyertaan modal pemerintah daerah rata-rata tumbuh sebesar 69,61%. Aset tetap yang terdiri atas tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan rata-rata pertumbuhannya mencapai 74,05%. Kemudian rata-rata pertumbuhan aset lainnya berupa tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi mencapai 101,29%.

Prinsip neraca menunjukkan angka-angka yang secara keseluruhan menunjukkan keseimbangan prinsip dari tiga unsur yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam rumus persamaan ($\text{aset} = \text{kewajiban} + \text{ekuitas dana}$) atau ($\text{aktiva} = \text{pasiva}$). Rata-rata pertumbuhan pasiva berupa kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2007-2011 sebesar 61,76%.

Rata-rata pertumbuhan kewajiban Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 55,71% yang terdiri atas kewajiban/utang jangka pendek dan kewajiban/utang jangka panjang. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekuitas dana Pemerintah Kota Tasikmalaya yang terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan mencapai 63,81%. Dari data ini terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekuitas dana Pemerintah Kota Tasikmalaya masih lebih tinggi dibanding kewajiban yang harus ditanggungnya.

Tabel 3.2.

Rasio Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2007-2011

No.	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Rasio likuiditas					
	▪ Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	22,11	6,51	12,34	3,58	2,73
	▪ Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	21,48	5,95	11,70	3,14	2,10
2	Rasio solvabilitas					
	▪ Rasio total hutang terhadap total aset	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
	▪ Rasio hutang terhadap modal	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
3	Rasio aktivitas					
	▪ Rata-rata umur piutang	3,09	3,86	5,62	5,45	3,65
	▪ Rata-rata umur persediaan	15,34	14,36	20,36	16,00	15,29

Selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Dari tabel 3.2 bahwa rasio lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya berfluktuasi, dari 22,11 pada tahun 2007 menjadi 6,51 pada tahun 2008, naik lagi menjadi 12,34 pada tahun 2009, kemudian turun sekitar angka 3 pada tahun 2010. Pada tahun 2011, rasio lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 2,73 artinya setiap Rp. 1 kewajiban jangka pendek/hutang lancar Pemerintah Kota Tasikmalaya dijamin oleh aktiva lancarnya sebesar Rp. 2,73. Fluktuasi rasio cepat Pemerintah Kota Tasikmalaya polanya sama dengan rasio lancar, yang

secara implisit berarti Pemerintah Kota Tasikmalaya mampu membayar kewajiban jangka pendeknya.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*).

Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya.

Dari tabel 3.2, rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2007 sampai dengan 2011 berkisar 0,00 dan 0,01. Pada tahun 2011 rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 0,01 artinya sebesar Rp.0,01 dari setiap Rp.1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva Pemerintah Kota Tasikmalaya yang didanai oleh hutang sebesar 0,01%, sisanya dari modal sendiri (ekuitas).

Dari tahun 2007-2012, rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang sama dengan rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2011, rasio hutang terhadap modal sebesar 0,01 menunjukkan bahwa Rp.0,01 dari setiap Rp.1,00 modal sendiri menjadi jaminan hutang, dengan kata lain menunjukkan tingginya modal sendiri dari Pemerintah Kota Tasikmalaya (dibelanjai pihak sendiri). Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas juga dimaknai merupakan rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam pendayagunaan aktiva yang dimiliki dan dalam pengelolaan sumber-sumber dananya.

Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk pemerintah daerah antara lain rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa

lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang dan sebaliknya. Cara perhitungan rata-rata umur piutang adalah 365 dibagi perputaran piutang, dimana perputaran piutang sendiri adalah pendapatan daerah dibagi rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah adalah saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang kemudian dibagi 2.

Dari tabel 3.2 bahwa rata-rata umur piutang Pemerintah Kota Tasikmalaya cukup singkat, artinya Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menagih piutang atau merubah piutang menjadi kas, yaitu dalam tempo hanya 3,09 dan 3,86 hari pada tahun 2007 dan 2008, kemudian 5,62 dan 5,45 hari pada tahun 2009 dan 2010, serta 3,65 hari pada tahun 2011.

Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik). Semakin besar periode rata-rata, semakin besar risiko kemungkinan persediaan berada di gudang dan sebaliknya. Cara menghitung rata-rata umur persediaan adalah 365 dibagi perputaran persediaan, dimana perputaran persediaan adalah nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun dibagi rata-rata nilai persediaan. Sedangkan, rata-rata nilai persediaan adalah saldo awal persediaan ditambah saldo akhir persediaan lalu hasilnya dibagi 2.

Berdasar tabel 3.2 bahwa rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebesar 15,34 hari pada tahun 2007; 14,36 hari pada tahun 2008; meningkat menjadi 20,36 hari pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2010, sebesar 16,00 hari dan 15,29 hari pada tahun 2011. Data tersebut bermakna bahwa dana tertanam dalam bentuk persediaan hanya bertahan sekitar setengah bulanan.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2007-2012

APBD merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah. Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya mengandung makna bahwa :

1. Arah belanja APBD Kota Tasikmalaya digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, 5 (lima) tahunan.
2. Untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang kontinyu dan jumlahnya memadai. Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda, maka kebijakan keuangan daerah dirinci pada masing-masing komponen yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan, dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Kota Tasikmalaya, pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan. Belanja yang tidak strategis dan tidak memiliki nilai tambah (*non value-added*) harus diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBD harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Mengingat bahwa komponen anggaran menggunakan struktur surplus/defisit maka selisih antara pendapatan dan belanja dihitung sebagai surplus/defisit dan dialokasikan ke pembiayaan. Dalam hal suatu APBD mengalami defisit maka jumlah pembiayaan neto (penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan) harus dapat menutup defisit tersebut. Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

3.2.1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Era Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan daerah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan esensi

otonomi, secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian daerah otonom adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga mengelola keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni melampaui kisaran 60%. Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha.

Demikian pula dengan sumber-sumber pendapatan lainnya perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Sehingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah kebijakan umum pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali timbul permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan:

a. Perbaikan manajemen

Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhaan sistem dan prosedur.

b. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan:

- 1) Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
- 2) Menyederhanakan prosedur perijinan;
- 3) Mempertegas peraturan/kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota, maupun antar sektor;
- 4) Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha;
- 5) Menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- 6) Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
- 7) Meniadakan tumpang tindih pemungutan;
- 8) Menyederhanakan prosedurnya.

c. Optimalisasi Aset Daerah

Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset dan peningkatan turn over. Optimalisasi aset juga dilaksanakan dengan bekerjasama dengan swasta. Selain itu, diperlukan perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha baru.

2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak Provinsi dan Pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

3.2.2. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun kedepan ditambah satu tahun

transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang infrastruktur, daya beli, kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Kota Tasikmalaya.

3. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta

bila memungkinkan.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui publikasi masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasilnya.

3.2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah, tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 3,5% dari pendapatan daerah. Selain itu, besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini tercermin dari besaran rasio kemampuan membayar kembali pinjaman atau *Debt Services Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 2,5 *coverage*.

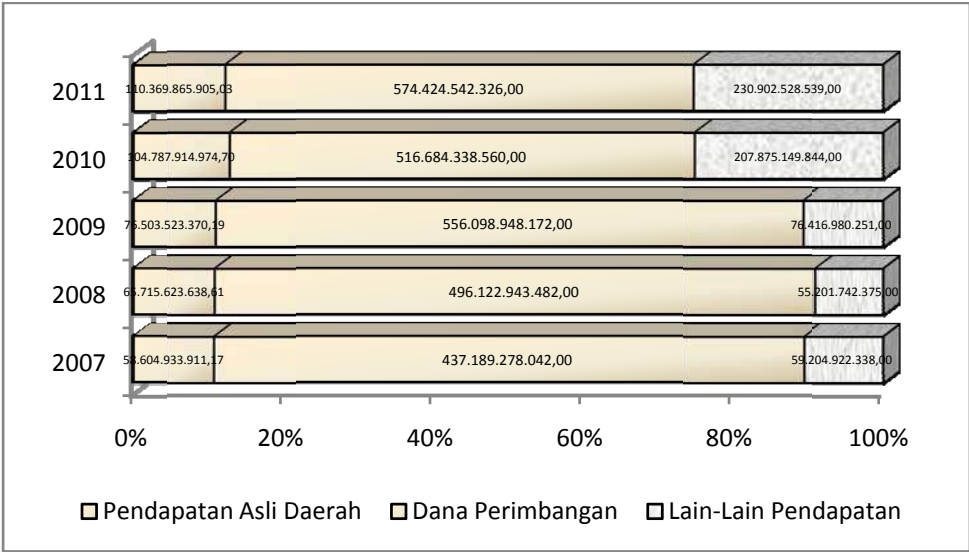
3.2.4. Proporsi Perolehan Pendapatan

Sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2007-2011 Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil meningkatkan sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dan mendanai pembangunan di Kota Tasikmalaya.

Ditinjau dari nilai atau besaran perolehannya masing-masing sumber pendapatan daerah mengalami peningkatan. Ditinjau dari proporsinya, pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan walaupun tetap di bawah dana perimbangan. Proporsi perolehan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2007-2011 dapat dilihat pada grafik 3.8.

Grafik 3.8.

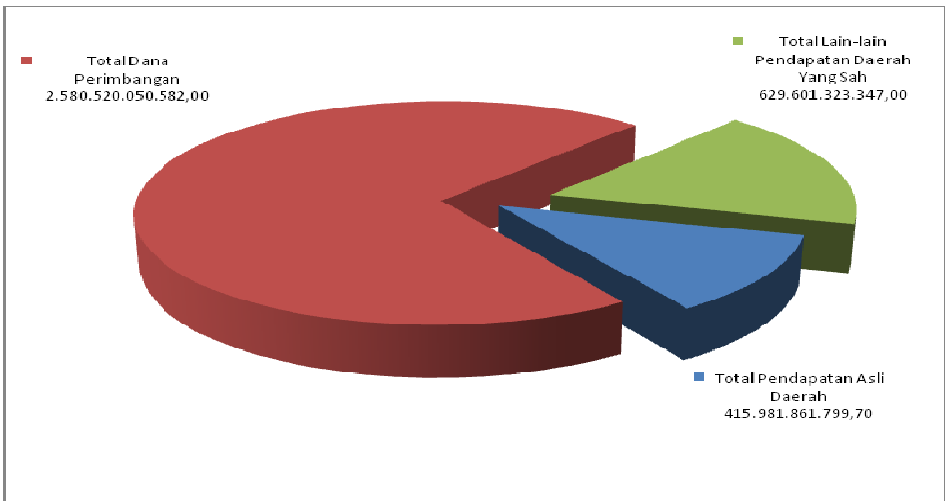
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007-2011



Bila dihitung secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2007-2011, kontribusi keseluruhan pendapatan daerah sebesar 11,47%; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 17,36%. Sementara itu dana perimbangan memberi kontribusi terbesar pada pendapatan daerah Kota Tasikmalaya yakni 71,17% hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi kepada dana-dana dari pusat dan provinsi. Secara skematik proporsi total dari ketiga sumber pendapatan tersebut dapat dilihat pada grafik 3.9.

Grafik 3.9.

Proporsi Agregat Realisasi Pendapatan Tahun 2007-2011

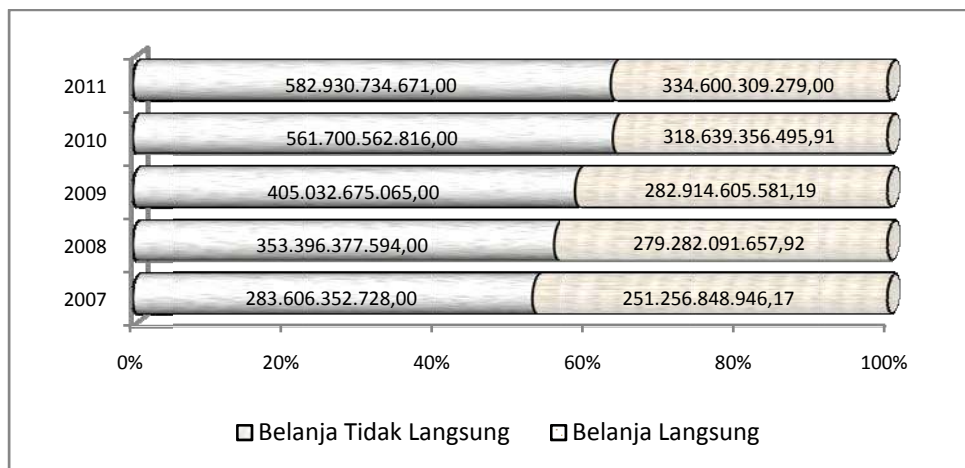


3.2.5. Proporsi Penggunaan Anggaran

Realisasi belanja Pemerintah Kota Tasikmalaya dari tahun 2007-2011 terus mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh makin meningkatnya pendapatan daerah. Secara nilai, masing-masing komponen belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung mengalami peningkatan; namun dari proporsi, belanja tidak langsung memiliki proporsi yang lebih besar dibanding belanja langsung dan terus meningkat setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.10.

Grafik 3.10.

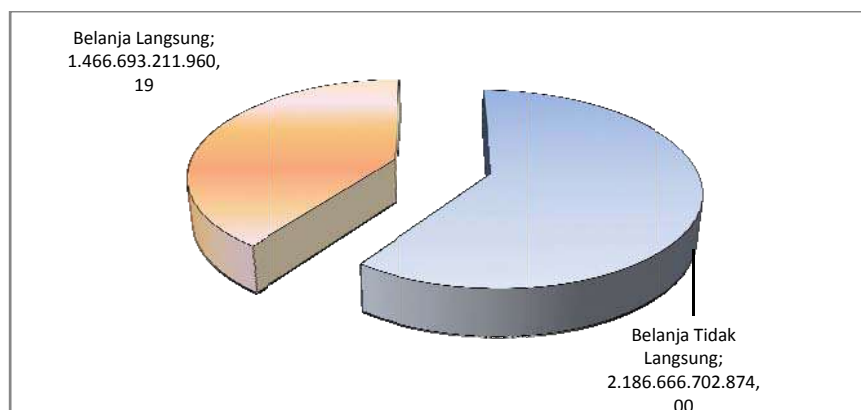
Proporsi Realisasi Belanja Tahun 2007-2011



Secara agregat selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2007-2011, proporsi belanja langsung hanya 40,15%. Sementara itu, proporsi realisasi belanja tidak langsung sebesar 59,85%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang ada lebih banyak untuk belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu belanja pegawai; bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. Secara skematik proporsi belanja dapat dilihat pada grafik 3.11.

Grafik 3.11.

Proporsi Agregat Realisasi Belanja Tahun 2007-2011



3.2.6. Analisa Pembiayaan Daerah

Berdasarkan tabel 3.3 pada tahun 2007-2009, APBD Kota Tasikmalaya mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah, masing-masing sebesar 20,135 milyar rupiah; 11,897 milyar rupiah dan 53,795 milyar rupiah. Namun pada tahun 2010 dan 2011 mulai mengalami defisit artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah yakni sebesar 50,992 milyar rupiah dan 1,834 milyar rupiah.

Tabel 3.3.
Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah Tahun 2007-2011

Nomor Urut	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
	Surplus/ (Defisit)	20.135.932.617,00	11.897.153.243,69	53.795.891.548,00	(50.992.515.933,21)	(1.834.107.179,97)
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN DAERAH					
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	49.424.468.557,83	66.655.687.141,83	52.305.840.120,21	72.803.608.737,21	28.824.487.695,11
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	3.000.000.000,00	2.315.879.000,00	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	2.240.758.580,00	1.778.320.096,00	-	-	-
	Jumlah	51.665.227.137,83	71.434.007.237,83	54.621.719.120,21	72.803.608.737,21	28.824.487.695,11
3.2	PENGELUARAN DAERAH					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	5.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	-	2.700.000.000,00	1.300.000.000,00	750.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	145.472.613,00	18.709.712,00	18.709.713,00	18.709.714,00	2.536.057.183,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	2.315.879.000,00	-	-	-
3.2.5	Pembayaran Kegiatan Lanjutan Tahun Lalu	-	951.010.000,00	171.571.817,00	-	-
3.2.6	Pengembalian Kelebihan Penerimaan Tahun Lalu	-	951.010.000,00	171.571.817,00	1.180.000.000,00	189.250.000,00
	Jumlah	5.145.472.613,00	4.236.608.712,00	3.061.853.347,00	2.498.709.714,00	8.475.307.183,00
	Pembiayaan Neto	46.519.754.524,83	67.197.398.525,83	51.559.865.773,21	70.304.899.023,21	20.349.180.512,11
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	66.655.687.141,83	79.094.551.769,52	105.355.757.321,21	19.312.383.090,00	18.515.073.332,14

Ket : SiLPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Untuk mendapatkan surplus atau

defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu.

Dari tabel 3.3 terlihat bahwa pada tahun 2007-2009 Pemerintah Kota Tasikmalaya mempunyai surplus riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil, sehingga pada tahun tersebut surplus riilnya mencapai 66,655 milyar rupiah; 79,094 milyar rupiah; dan 105,355 milyar rupiah. Sementara pada tahun 2010 dan 2011 surplus riilnya hanya 19,312 milyar rupiah dan 18,515 milyar rupiah, sebab pada tahun tersebut pada awalnya mengalami defisit anggaran. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsungnya.

3.3. Kerangka Pendanaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (25), kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Oleh sebab itu perlu dihitung dulu kemampuan anggaran dari Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk 5 (lima) tahun kedepan. Salah satu metode sederhana untuk memperkirakan kemampuan anggaran tersebut adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan hubungan 2 (dua) kumpulan data, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Untuk kepentingan perencanaan diperkirakan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hasil *forecasting* menurut data eksisting dan asumsi, didapat proyeksi pendapatan daerah tahun 2013-2017 sebagai berikut:

Tabel 3.5.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 201-2017

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Jumlah
2012	137.853.811.629,00	684.929.857.049,00	244.690.109.473,00	1.067.473.778.151,00
2013	149.393.838.500,00	726.025.648.471,94	239.595.629.416,50	1.115.015.116.388,44
2014	159.133.851.640,00	769.587.187.380,26	251.575.410.887,33	1.180.296.449.907,59
2015	178.406.951.408,00	815.762.418.623,07	264.154.181.431,69	1.258.323.551.462,76
2016	192.105.188.403,00	864.708.163.740,46	277.361.890.503,28	1.334.175.242.646,74
2017	204.334.186.980,00	916.590.653.564,88	291.229.985.028,44	1.412.154.825.573,32

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 (lima) tahun ke depan di atas adalah:

1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
 - a. Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi;
 - c. Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB.
2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. DAU cenderung meningkat setiap tahun seiring kebijakan kenaikan gaji pegawai;
 - b. DAK cenderung meningkat setiap tahun;
 - c. Pemerataan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan setiap tahun.
3. Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat menganggarkan defisit.
4. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun.

3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah

Demikian juga untuk menentukan pagu indikatif maka harus dibuat proyeksi atas belanja daerah yang akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11, pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia

untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara membuat proyeksi untuk belanja daerah sama dengan cara seperti yang digunakan untuk proyeksi pendapatan.

Tabel 3.6.

Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012-2017

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2012	685.005.217.898,00	404.964.923.512,00	1.089.970.141.410,00
2013	720.523.666.062,77	418.112.736.747,62	1.138.636.402.810,39
2014	760.362.080.445,80	444.736.720.204,84	1.205.098.800.650,64
2015	805.985.096.092,00	478.380.923.650,96	1.284.366.019.742,96
2016	851.458.556.340,94	510.061.278.000,01	1.361.519.834.340,95
2017	898.539.812.475,69	542.326.834.376,56	1.440.866.646.852,24

Proyeksi belanja daerah tersebut diatas memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Kebutuhan belanja pegawai selalu meningkat setiap tahun sebagai akibat dari kenaikan gaji dan penambahan jumlah pegawai;
2. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat sebagai upaya pencapaian visi misi Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2013-2017;
3. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Untuk memperkirakan penyaluran surplus dan menutup defisit yang diperkirakan terjadi maka perlu dibuat proyeksi pembiayaan daerah Kota Tasikmalaya. Asumsi yang digunakan linear dengan asumsi yang digunakan dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 3.7.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2012-2017

Tahun	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit
2012	1.067.473.778.151,00	1.089.970.141.410,00	22.496.363.259,00
2013	1.115.015.116.388,44	1.138.636.402.810,39	23.621.286.421,95
2014	1.180.296.449.907,59	1.205.098.800.650,64	24.802.350.743,05
2015	1.258.323.551.462,76	1.284.366.019.742,96	26.042.468.280,20

2016	1.334.175.242.646,74	1.361.519.834.340,95	27.344.591.694,21
2017	1.412.154.825.573,32	1.440.866.646.852,24	28.711.821.278,92
Tahun	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	Pembiayaan Neto
2012	23.515.073.259,00	1.018.710.000,00	22.496.363.259,00
2013	25.621.286.421,95	2.000.000.000,00	23.621.286.421,95
2014	29.802.350.743,05	5.000.000.000,00	24.802.350.743,05
2015	29.042.468.280,20	3.000.000.000,00	26.042.468.280,20
2016	30.344.591.694,21	3.000.000.000,00	27.344.591.694,21
2017	29.711.821.278,92	1.000.000.000,00	28.711.821.278,92

Proyeksi pembiayaan daerah tersebut di atas memperhatikan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Kewajiban penyertaan modal dalam bentuk modal disetor kepada PT. BPRS Al-Madinah menjadi 8 milyar rupiah sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
2. Rencana penambahan penyertaan modal dalam bentuk modal disetor kepada PD. Pasar Resik sebesar 1 milyar rupiah;
3. Rencana penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Jabar Banten (Tbk) sebesar 2 milyar rupiah pada tahun 2014;
4. Penyediaan dana cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2017;
5. Proyeksi penerimaan pembiayaan didasarkan pada perkiraan SiLPA dan pencairan dana cadangan.

BAB IV

ANALISIS ISU STRATEGIS

Isu strategis dalam RPJMD Kota Tasikmalaya 2013-2017 dirumuskan terlebih dahulu menggali dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kota Tasikmalaya lalu dikaitkan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal. Isu strategis RPJMD tersebut akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.

4.1.1. Bidang Sosial Budaya

4.1.1.1. Pendidikan

1. Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan;

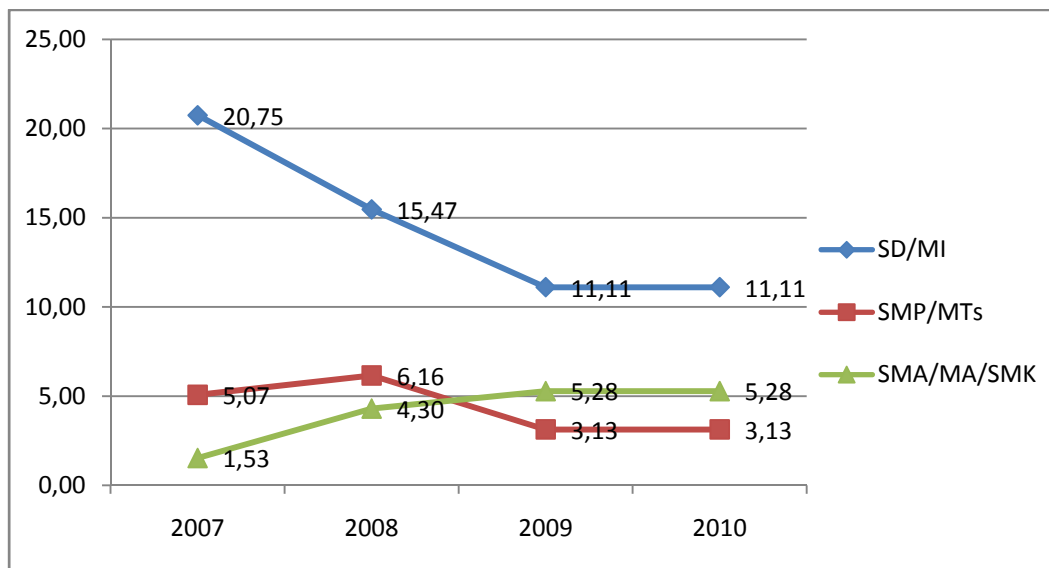
- a. Ada 10,91% penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah di jenjang SMA/SMK/MA;
- b. Sebaran sekolah untuk tingkat SMA/SMK/MA timpang, jumlah sekolah di Kecamatan Tawang, Cihideung, Cipedes, Kawalu dan Mangkubumi jumlahnya lebih banyak dibanding kecamatan lain;
- c. Rasio kelas murid untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs masih sangat besar yaitu 1:40, artinya satu kelas/rombongan belajar terdiri atas 40 orang murid, sedangkan pada tingkat

SMA/SMK/MA terhitung sebesar 1:37; idealnya berdasarkan standar pendidikan 1:28;

- d. Ketersediaan sarana prasarana pendukung pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan bengkel kerja masih terbatas;
- e. Selain ketersediaan ruang kelas yang belum memadai, kualitas ruang kelas sendiri belum sepenuhnya ideal. Ruang kelas dalam kondisi rusak berat tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dapat dilihat pada Grafik 4.1;

Grafik 4.1.

Kondisi Ruang Kelas Rusak Berat di Kota Tasikmalaya Tahun 2007-2010



Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2010 (diolah dari data Dinas Pendidikan)

- f. Kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah belum optimal dalam pembentukan karakter peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
- g. Pembiayaan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA masih relatif belum terjangkau oleh semua kalangan.

2. Tata Kelola Pendidikan.

- a. Kualifikasi tenaga pendidik belum seluruhnya memenuhi standar. Masih terdapat guru yang ijazah terakhirnya setingkat SMA sebanyak 1.247 orang (12,94%) dari 9.639 orang pada tahun 2010;

- b. Pengangkatan Kepala Sekolah tidak diikuti pendidikan dan pelatihan manajerial;
 - c. Tingkat partisipasi komite sekolah, orang tua dan masyarakat masih kurang.
 - d. Kuantitas tenaga kependidikan seperti tenaga administrasi dan penjaga sekolah masih kurang terutama di tingkat SD.
- Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.1;

Tabel 4.1.

Jumlah Tenaga Kependidikan di Kota Tasikmalaya Tahun 2010

Jenis Sekolah	Jumlah Sekolah	Kepala TU	Bendahara	Petugas Instalasi	Laboran	Pustakawan	Juru Bengkel	Staf TU	Penjaga
SLB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TK	-	-	-	-	-	-	-	23	4
RA	-	-	-	-	-	-	-	12	14
SD	-	-	-	-	-	10	-	45	234
MI	-	-	-	-	-	4	-	16	20
SMP	44	39	61	1	3	19	1	117	84
MTs	37	22	21	-	3	11	-	35	16
SMA	26	24	32	2	5	14	-	86	59
MA	26	12	15	-	6	11	-	25	14
SMK	29	23	34	5	7	16	2	86	42
Jumlah		120	163	8	24	85	3	445	487

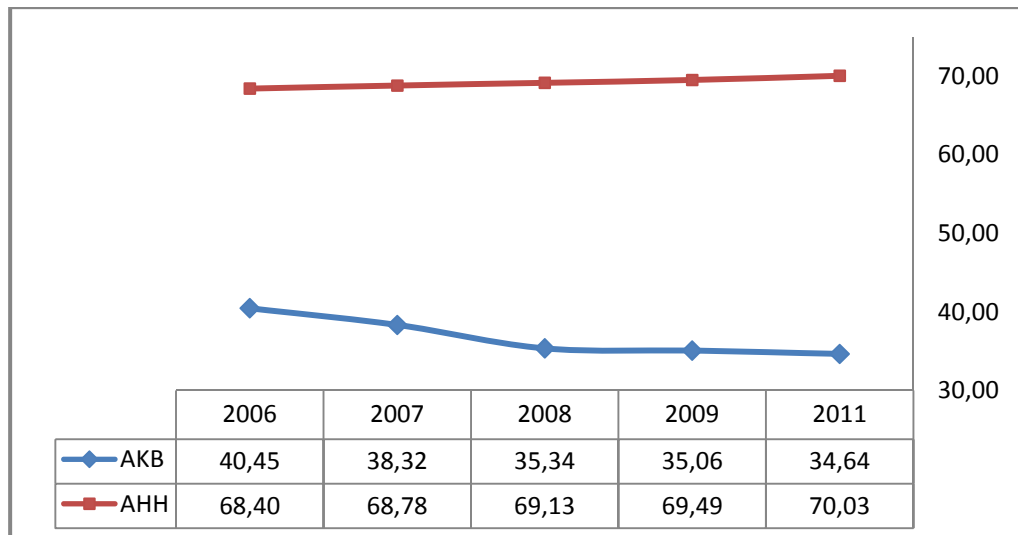
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

4.1.1.2. Kesehatan

- 1. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI);
 - a. AKB Kota Tasikmalaya sebesar 34,64 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2011. Angka tersebut masih jauh dari target MDGs (*Millenium Development Goals*) Nasional yaitu 23 kematian bayi per 1000 kelahiran pada tahun 2015;

Grafik 4.2.

Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup
Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2011



Sumber : Suseda Kota Tasikmalaya 2006 & 2008,

Survei IPM Kota Tasikmalaya 2007, 2009 & 2011

- b. AKI di Kota Tasikmalaya masih tinggi. Pada tahun 2009 sebanyak 19 orang dari 12.020 kelahiran (158,3 orang per 100.000 kelahiran), tahun 2010 menjadi 23 dari 14.286 kelahiran (161,3 orang per 100.000 kelahiran) serta tahun 2011 meningkat lagi menjadi 28 orang dari 13.878 kelahiran (202,2 orang per kelahiran).
2. Aksesibilitas, Sarana Prasarana, Tenaga dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - c. Jangkauan Puskesmas/Pustu di Kota Tasikmalaya dalam memberikan layanan kesehatan masih belum memadai karena masih jauh dari target layanan kesehatan ideal. Standar pelayanan kesehatan 1 Puskesmas untuk 10.000 penduduk sementara di Kota Tasikmalaya 1 Puskesmas melayani 16.149 penduduk;
 - d. Tarif pelayanan kesehatan relatif masih mahal, tidak semua lapisan masyarakat mampu menjangkau dan memanfaatkannya;
 - e. Sarana di Rumah Sakit Umum Daerah maupun di Puskesmas masih terbatas, misalnya alat bedah, alat cuci darah, laboratorium dan sebagainya;

- f. Masih terbatasnya tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang ada dibanding jumlah penduduk masih jauh di bawah standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
- 3. Pengendalian Penyakit Menular Terutama HIV/AIDS.
 - g. Masih tingginya penderita TB. Pada tahun 2011, angka keberhasilan pengobatan pasien TB dari 488 kasus yang ditangani adalah 410 kasus atau 84,02% sedangkan target nasional 91%, berarti masih ada kesenjangan sebesar 6,98%;
 - h. Angka perkembangan kasus HIV/AIDS makin tinggi. Sampai dengan September 2011, penemuan kasus secara kumulatif tercatat 208 orang positif HIV teregister dengan orang yang meninggal 48 orang;
 - i. Kota Tasikmalaya masih termasuk wilayah endemik penyakit demam berdarah.

4.1.1.3. Pemberdayaan Perempuan

- 1. Kesetaraan Gender;
 - a. Tingkat partisipasi perempuan masih rendah. Pada tahun 2011, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Tasikmalaya sebesar 66,76 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 53,18;
 - b. Kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender masih lemah.
- 2. Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - a. Kasus KDRT makin meningkat. Hal ini ditunjukkan dari kasus yang terjadi pada tahun 2011 sebanyak 12 kasus meningkat menjadi 38 kasus pada tahun 2012;
 - b. Masih terjadi perdagangan perempuan dan anak. Pada tahun 2011 terdapat 1 kasus dan tahun 2012 sebanyak 3 kasus;
 - c. Perlindungan anak terhadap pengaruh negatif media masih lemah.

4.1.1.4. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- 1. Laju pertumbuhan penduduk masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat;
- 2. Tingkat kesertaan ber-KB;
Tingkat kesertaan ber-KB pasangan usia subur masih belum optimal. Pada tahun 2011 tercatat 90.628 peserta KB Aktif atau

74,75% dari Pasangan Usia Subur, sedangkan peserta KB aktif tahun 2010 tercatat 90.578 atau 75,05%.

3. Pengendalian Usia Perkawinan;

Belum terpenuhinya anjuran pemerintah untuk melakukan perkawinan di atas 20 tahun. Pada tahun 2010 dan 2011, rata-rata usia perkawinan pertama dari perempuan di Kota Tasikmalaya sebesar 19,66 dan 19,13.

4. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi masih rendah.

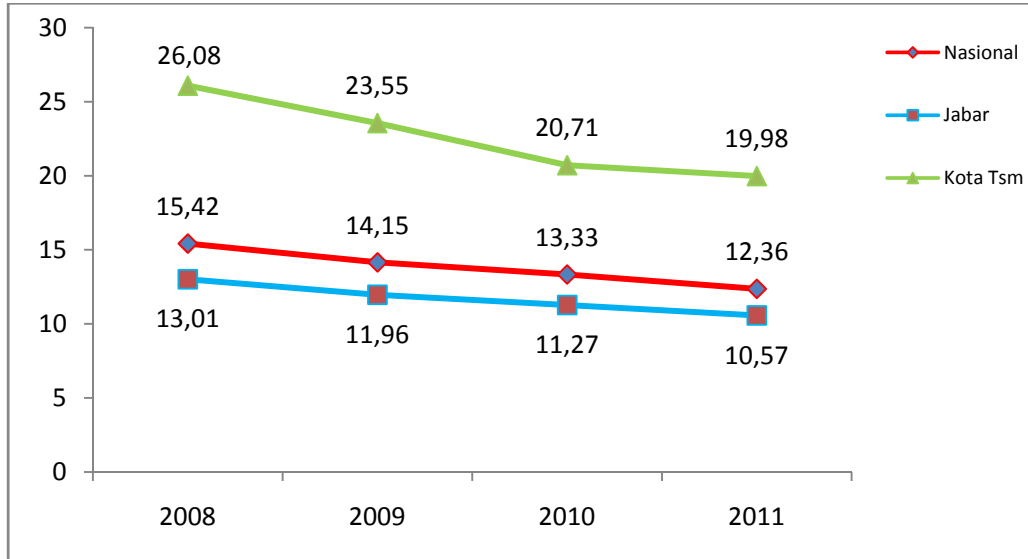
4.1.1.5. Sosial

1. Penanggulangan Kemiskinan;

Angka kemiskinan masih sangat tinggi. Jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya tahun 2008, 2009, 2010 dan 2011 secara berturut-turut adalah 154,54 ribu jiwa (26,08%), 140,11 ribu jiwa (23,55%), 131,5 ribu jiwa (20,71%) dan 129,8 ribu jiwa (19,98%).

Grafik 4.3.

Perbandingan Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2011



Sumber : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2017

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

a. Gelandangan, pengemis, anak terlantar, anak jalanan, penyandang cacat, tunasusila dan penyandang AIDS/HIV makin meningkat. Jumlah PMKS tahun 2009 sebanyak 81.619

orang, tahun 2010 sebanyak 76.857 orang, dan tahun 2011 sebanyak 87.077 orang;

- b. Aksesibilitas layanan bagi PMKS masih terbatas;
 - c. Penanganan masyarakat lanjut usia belum optimal.
3. Penanggulangan Bencana;
- a. Belum ada regulasi penanggulangan bencana;
 - b. Belum ada kelembagaan khusus menangani bencana;
 - c. Rendah kesadaran terhadap risiko bencana;
 - d. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana masih terbatas;
 - e. Sumber daya aparaturnya terlatih untuk penanggulangan bencana masih terbatas.

4.1.1.6. Tenaga Kerja

- 1. Pengangguran dan Kesempatan Kerja serta Berusaha;
 - a. Pengangguran terbuka masih tinggi. Tahun 2008 angka pengangguran terbuka berada pada angka 10,87%; tahun 2009 sebesar 8,41%; 2010 turun menjadi 8,16%; namun naik kembali menjadi 9,14% pada tahun 2011;
 - b. Kesempatan kerja dan lapangan usaha tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
 - c. Sistem informasi ketenagakerjaan masih terbatas.
- 2. Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - a. Motivasi dan daya saing calon tenaga kerja masih rendah, digambarkan dengan data pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya tahun 2010 sebagian besar (5.064 orang dari 10.108 orang) adalah lulusan SLTA;
 - b. Kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai pekerja masih rendah;
 - c. Perlindungan terhadap tenaga kerja masih lemah.

4.1.1.7. Kebudayaan

- 1. Terbatasnya sarana prasarana pengembangan seni dan budaya. Hal ini ditunjukkan hanya terdapat 1 gedung kesenian untuk menampung kreatifitas seni dari seniman yang ada di Kota Tasikmalaya;
- 2. Lunturnya nilai budaya daerah akibat pengaruh budaya asing/globalisasi;

3. Pendataan, perlindungan dan pelestarian cagar budaya belum mendapat perhatian serius. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdapat 13 benda cagar budaya;
4. Hambatan regulasi soal pengelolaan cagar budaya;
5. Pelestarian seni budaya daerah masih lemah.

4.1.1.8. Pemuda dan Olahraga

1. Peran Pemuda dalam Pembangunan;
 - a. Peran pemuda dalam pembangunan belum optimal;
 - b. Sikap apatis dan kohesi sosial pemuda terhadap pembangunan lemah;
 - c. Aktivitas organisasi kemasyarakatan pemuda kurang optimal;
 - d. Pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan kepemudaan belum optimal;
 - e. Sarana pengembangan aktivitas pemuda belum memadai.
2. Sarana, Prasarana dan Prestasi Olah Raga;
 - a. Sarana dan prasarana olah raga masyarakat masih kurang;
 - b. Pencarian dan pembinaan bibit atlet masih lemah;
 - c. Fasilitasi dan penghargaan terhadap atlet yang berprestasi masih kurang.

4.1.2. Bidang Ekonomi

4.1.2.1. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

1. Kuantitas dan Kualitas Koperasi;
 - a. Tata kelola koperasi masih lemah;
 - b. Akses terhadap permodalan dan pasar lemah.
 - c. Kesadaran berkoperasi rendah.
 - d. Tingkat aktifitas koperasi masih rendah, dari 486 koperasi pada tahun 2011 hanya 66,16% yang masih aktif.
2. Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - a. Kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha masih kurang;
 - b. Minim dan sulit mengakses permodalan dari perbankan;
 - c. Sebagian besar UMKM belum memiliki sertifikat/ijin usaha secara formal;
 - d. Kurangnya promosi/event pameran untuk mempromosikan produk UMKM;

- e. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan UMKM;
- f. Pelaku UMKM belum memiliki peralatan dan mesin yang memadai;
- g. Kurangnya bahan baku lokal yang diperlukan dalam proses produksi UMKM menyebabkan ketergantungan pada daerah lain;
- h. Lemahnya daya saing produk UMKM dibanding produk daerah/negara lain.

4.1.2.2. Penanaman Modal

- 1. Belum optimalnya prosedur pelayanan perijinan;
- 2. Lemahnya kepastian hukum;
- 3. Adanya dinamika masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal;
- 4. Kurangnya informasi serta promosi potensi ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

4.1.2.3. Statistik

- 1. Belum ada kelembagaan pengolahan data yang terintegrasi;
- 2. Sumber daya manusia pengelola data statistik masih kurang;
- 3. Pengelolaan data masih lemah;
- 4. Masih rendahnya kesadaran aparaturnya terhadap pentingnya data.

4.1.2.4. Pertanian

- 1. Kesejahteraan Petani;
 - a. Kepemilikan lahan rendah, mayoritas petani penggarap dan buruh tani.
 - b. Lemahnya proteksi pemerintah terhadap pengendalian harga produk pertanian.
- 2. Ketahanan Pangan;
 - a. Ketersediaan pangan utama belum dapat dipenuhi secara mandiri. Produksi beras di Kota Tasikmalaya hanya 51.229,20 ton, sehingga rasio realisasi produksi terhadap kebutuhan beras di Kota Tasikmalaya sebesar 77,56%;
 - b. Kebiasaan dan ketergantungan masyarakat terhadap pangan utama sangat tinggi;
 - c. Diversifikasi konsumsi masyarakat terhadap pangan non beras belum membudaya.

3. Diversifikasi Pertanian dan Agribisnis;
 - a. Kurangnya pemahaman dan perilaku petani untuk melakukan penganeekaragaman komoditas pertanian;
 - b. Belum adanya perubahan orientasi dari bertani secara konvensional menuju pola bertani yang berorientasi profit.
4. Lahan Pertanian;
 - a. Makin berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan;
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan tidur.
5. SDM Pertanian.
 - a. Kualitas petani masih rendah;
 - b. Kurangnya penyuluh pertanian. Jumlahnya hanya 31 orang dan Tenaga Harian Lepas bantuan dari Pusat/Provinsi sebanyak 38 orang.

4.1.2.5. Kehutanan

Lahan kritis di hutan rakyat masih luas. Pada tahun 2011, dari kawasan hutan rakyat seluas 4.755,58 ha, terdapat lahan kritis seluas 1.315,71 ha.

4.1.2.6. Pariwisata

1. Pengembangan budaya lokal untuk menarik wisatawan belum optimal;
2. Promosi kegiatan kepariwisataan dan potensi objek wisata belum optimal;
3. Jaringan mitra usaha kepariwisataan baik dengan pengusaha lokal maupun investor luar belum optimal;
4. Belum ada paket wisata yang melibatkan keberadaan UMKM di sentra produksi;
5. Pengembangan destinasi (termasuk sarana prasarana) wisata belum optimal;
6. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana obyek wisata masih kurang.

4.1.2.7. Perindustrian dan Perdagangan;

1. Pasar Tradisional;
 - a. Pengelolaan pasar yang belum profesional;
 - b. Sarana prasarana pasar belum representatif;

- c. Budaya pelaku pasar belum mendukung terhadap penciptaan daya saing pasar tradisional;
- 2. Perindustrian dan Perdagangan;
 - a. Pengembangan industri kreatif belum optimal;
 - b. Belum adanya pusat promosi produk industri;
 - c. Belum adanya jejaring usaha yang kuat antarpelaku industri;
 - d. Rendahnya dukungan infrastruktur ke sentra produksi;
 - e. Belum tersedianya sarana pergudangan terpadu;
 - f. Kurang sehatnya persaingan usaha;
 - g. Lemahnya perlindungan konsumen;
 - h. Belum meratanya sebaran pusat fasilitas perdagangan.

4.1.3. Bidang Fisik

4.1.3.1. Pekerjaan Umum

- 1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan
 - a. Proporsi jalan dalam kondisi rusak masih tinggi. Pada tahun 2010, jalan kota dalam kondisi rusak berat sepanjang 70.144 m dan rusak sepanjang 127.442 m. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Kondisi Jalan di Kota Tasikmalaya Tahun 2010

Keadaan Jalan	Status Jalan											
	Jalan Nasional				Jalan Propinsi				Jalan Kota			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Jenis Permukaan												
Diaspal	9.520	9.250		9.472	31.890	31.890		32.238	454.114	454.114		397.286
Kerikil	-	-			-	-			113.017	113.017		
Tanah	-	-			-	-			83.809	83.809		2.677
Lainnya	-	-			-	-			-	-		
Jumlah	9.520	9.250	-	9.472	31.890	31.890	-	32.238	650.940	650.940	-	399.963
Kondisi Jalan												
Baik	8.568	9.520		2.425	23.918	31.330		9.917	247.820	262.499		174.404
Sedang	952	-		7.047	7.972	560		22.321	137.280	208.743		27.973
Rusak	-	-			-	-			163.389	91.927		127.442
Rusak Berat	-	-			-	-			102.450	82.770		70.144
Jumlah	9.520	9.520	-	9.472	31.890	31.890	-	32.238	650.939	645.939	-	399.963

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi (diolah)

2. Kondisi jembatan antarwilayah kurang representatif. Terdapat 3 (tiga) jembatan antarwilayah diantaranya jembatan Leuwibudah, jembatan Tonjong dan jembatan Gobang.
3. Drainase dan Irigasi;
 - a. Rendahnya prasarana air kotor/drainase, ditunjukkan angka rasio panjang saluran drainase terhadap panjang jalan 50% pada tahun 2012;
 - b. Tidak optimalnya pemanfaatan saluran irigasi untuk pertanian dan perikanan sebagai akibat alih fungsi lahan;
 - c. Kurangnya partisipasi masyarakat (P3A Mitra Cai) dalam tata kelola irigasi.
4. Permukiman;
 - a. Ketersediaan perumahan tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Kota Tasikmalaya mengalami kekurangan rumah sebanyak 40.048 unit;
 - b. Fasilitas sosial dan umum masih banyak yang belum diserahkan kepada Pemerintah.

4.1.3.2. Perumahan Rakyat

1. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih banyak, pada tahun 2010 sebanyak 7.478 unit;
2. Pemerintah Kota Tasikmalaya belum mampu menyediakan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) sebagai penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
3. Pemerintah Kota Tasikmalaya belum mampu menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun.

4.1.3.3. Penataan Ruang

1. Belum tersedianya produk hukum mengenai rencana tata ruang yang lebih operasional, baik berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Rinci Kawasan Strategis, serta perangkat pengendalian pemanfaatan ruang berupa Peraturan Zonasi, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan standar-standar teknis lainnya;
2. Belum adanya strategi yang tepat menyangkut konversi lahan pertanian produktif sebagai akibat perkembangan kota yang pesat;

3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang, antara lain diindikasikan dengan masih kurangnya kesadaran dalam mengurus perizinan sebelum pelaksanaan pembangunan;
4. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk mekanisme perizinan dan pengawasan pelaksanaannya.

4.1.3.4. Perhubungan

1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan seperti marka jalan, rambu lalu lintas, cakupan pelayanan angkutan umum, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
2. Terbatasnya sarana parkir, terutama pada ruas jalan pusat kota;
3. Adanya terminal bayangan di beberapa titik mengakibatkan tidak optimalnya fungsi pelayanan terminal dan sub terminal;
4. Belum meratanya pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU);
5. Ketidakteraturan moda transportasi becak/delman di pusat kota;
6. Manajemen rekayasa lalu lintas belum optimal;
7. Terdapat ruas jalan yang belum memiliki nama dan kelas jalan;
8. Belum adanya aturan pembatasan tonase kendaraan.

4.1.3.5. Lingkungan Hidup

1. Pengelolaan Sampah;
 - a. Rendahnya kesadaran masyarakat Kota Tasikmalaya untuk melakukan pemilahan sampah, ditunjukkan dengan hasil survai EHRA (*Environment Health Risk Area*) tahun 2012, baru 34,3% melakukan pemilahan sampah;
 - b. Adanya industri rumah tangga/masyarakat yang membuang sampah/limbah ke sungai;
 - c. Terbatasnya masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah mandiri dengan metode 3R (*reduce, reuse, recycle*);
 - d. Rendahnya cakupan pelayanan sampah, tahun 2012 hanya 35%;
 - e. Kurangnya Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), tahun 2012 hanya 27 TPS;
 - f. Keterbatasan armada pengangkut sampah, tahun 2012 hanya 29 unit;
 - g. Alat penghancur sampah Bahan Beracun Berbahaya (B3) dan limbah medis belum tersedia;

- h. TPA di Ciangir menggunakan sistem semi-control landfill, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan TPA harus menggunakan sanitary landfill;
 - i. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) belum tersedia;
 - j. Terdapat dampak negatif terhadap masyarakat akibat adanya TPA.
2. Pengendalian Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan air tanah;
- a. Banyaknya penambang tidak memiliki izin/penambang liar;
 - b. Tidak dilaksanakannya reklamasi pasca tambang;
 - c. Terjadi kerusakan lingkungan yang menyebabkan terganggunya ketersediaan air bagi masyarakat;
 - d. Perlindungan Keselamatan Kesehatan Tenaga Kerja pertambangan tidak terjamin;
 - e. Sosialisasi pengendalian pemakaian air tanah dan air permukaan yang berlebihan belum optimal.
3. Penyediaan Air Bersih;
- a. Cakupan pelayanan air bersih perpipaan masih rendah, hanya 28,56%;
 - b. Ketersediaan sumber air baku sangat terbatas;
 - c. Pencemaran terhadap air baku sangat tinggi;
 - d. Belum memiliki sistem pengolahan air bersih skala kota;
 - e. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan air minum.
4. Pengolahan Lumpur Tinja dan Air Limbah;
- a. Keterbatasan armada sedot tinja;
 - b. Kebiasaan masyarakat untuk membuang tinja ke sungai sangat tinggi;
 - c. IPLT Singkup belum optimal;
 - d. Belum adanya regulasi pengelolaan limbah;
 - e. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah.

4.1.3.6. Komunikasi dan Informatika

- 1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 2. Sarana dan Prasarana teknologi informasi belum memadai;

3. Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi informasi terbatas;
4. Sistem informasi yang menggunakan perangkat lunak (*software*) berlisensi belum optimal;
5. Pelayanan informasi masyarakat masih terbatas.

4.1.3.7. Energi Dan Sumber Daya Mineral

1. Rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan sambungan listrik masih banyak, tahun 2012 sejumlah 9.085 rumah tangga;
2. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai energi alternatif belum dikembangkan.

4.1.4. Bidang Pemerintahan

4.1.4.1. Perencanaan Pembangunan

1. Ketersediaan dan Konsistensi Data untuk Perencanaan Pembangunan;
 - a. Validitas dan akurasi data untuk perencanaan pembangunan masih rendah;
 - b. Kesepahaman akan pentingnya data belum ada;
 - c. Institusi/bidang yang spesifik mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data, belum ada;
 - d. Penyediaan data berbasis teknologi informasi belum optimal.
2. Konsistensi dalam Perencanaan dan Penganggaran
 - a. Inkonsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan antara perencanaan dengan penganggaran;
 - b. Terbatasnya kemampuan anggaran dibandingkan dengan usulan kebutuhan;
 - c. Pendekatan teknokratik, partisipatif, *top-down*, *bottom-up* dengan pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan belum sinergi;
 - d. Ego sektoral dalam perencanaan pembangunan masih tinggi.

4.1.4.2. Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Pengelolaan administrasi kependudukan belum optimal, dibuktikan data tahun 2012, yaitu rasio penduduk berkartu tanda penduduk/berkartu keluarga per satuan penduduk sebesar 95%, rasio bayi berakte kelahiran sebesar 58,44%, kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk sebesar 611;
- b. Pemanfaatan database kependudukan skala kota belum optimal;

- c. Arus urbanisasi dan migrasi masuk belum terkendali;
- d. Kesadaran masyarakat dalam mentaati tertib administrasi kependudukan masih lemah.

4.1.4.3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1. Kerukunan Antar Umat Beragama dan Rawan Konflik Sosial
 - a. Konflik menyangkut agama masih terjadi seperti kasus penyerangan sarana milik kelompok Ahmadiyah;
 - b. Potensi gesekan kelompok sosial masih besar seperti adanya berandalan bermotor.
- 2. Penertiban dan Pembinaan, Partai Politik, LSM dan Ormas
 - a. Fungsi partai politik belum efektif sebagai wadah pendidikan politik, pengelola konflik, kaderisasi, agregasi kepentingan masyarakat, dan komunikasi politik;
 - b. Penertiban dan pembinaan organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) masih kurang.

4.1.4.4. Pemerintahan Umum

- 1. Sarana Prasarana Pemerintahan
 - a. Sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi pemerintah daerah masih kurang. Berdasar data tahun 2012, beberapa SKPD belum menempati tanah dan atau bangunan yang definitif dan representative;
 - b. Keberadaan tata letak sarana dan prasarana pemerintahan belum memberikan akses kemudahan bagi masyarakat, termasuk bagi yang berkebutuhan khusus;
 - c. Standarisasi bangunan gedung pemerintahan belum sesuai ketentuan;
 - d. Pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung pemerintahan belum optimal.
- 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
 - a. Tingkat ketergantungan terhadap dana Pusat dan Provinsi masih tinggi;
 - b. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD masih relatif kecil yaitu hanya 11,47%;
 - c. Inovasi penggalian sumber pendapatan daerah baru belum optimal;

- d. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan asli daerah belum optimal.
- 3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - a. Sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah belum optimal;
 - b. Penyelesaian masalah aset antara Kota dan Kabupaten Tasikmalaya belum tuntas, berakibat kepada tidak optimalnya pelayanan publik;
 - c. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum tercapai.
- 4. Penataan dan Penegakan Peraturan Daerah
 - a. Penataan dan penegakan atas peraturan daerah belum efektif, contohnya banyak pihak menggunakan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
 - b. Sumber daya manusia penegak Perda (PPNS) terbatas;
 - c. Kesadaran masyarakat atas Perda masih lemah;
 - d. Sosialisasi atas Perda masih kurang;
 - e. Terdapat peraturan yang tumpang tindih dan sering berubah.
- 5. Pelayanan Perijinan
 - a. Tingkat kesadaran masyarakat atas kepemilikan ijin relatif rendah;
 - b. Mekanisme dan prosedur pelayanan perijinan belum sederhana dan tepat waktu;
 - c. Sumber daya manusia pengelola pelayanan perijinan masih terbatas;
 - d. Tindak lanjut pengaduan masyarakat atas pelayanan perijinan belum optimal;
 - e. Sarana dan prasarana pelayanan perijinan masih terbatas;
 - f. Pendelegasian sebagian kewenangan pelayanan perijinan pada kecamatan belum dilaksanakan.
- 6. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - a. Kelembagaan yang efektif dan efisien serta ramping struktur kaya fungsi belum terwujud;
 - b. Terjadi tumpang tindih kewenangan kelembagaan dan belum tepat ukuran;
 - c. Standar pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan *e-government* masih rendah. Tahun 2012, baru 14 unit kerja

yang telah mendapatkan fasilitasi penyusunan *Standard Operating Procedur* (SOP) atau 1,26% dari 177 target unit kerja;

- d. Penanganan urusan pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, penanaman modal, dan penanggulangan bencana belum optimal karena belum ditangani oleh SKPD tersendiri.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- a. Nilai akuntabilitas dan manajemen kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya masih rendah, ditunjukkan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Tasikmalaya Tahun 2009 sebesar 37,5 atau agak kurang, dan berdasar evaluasi Inspektorat terhadap LAKIP SKPD menunjukkan nilai rata-rata 50 atau kurang;
- b. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku masih rendah.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Standar Pelayanan belum berkembang. Sampai tahun 2012 dari 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus ditetapkan baru 11 SPM yang tuntas. Dari 146 unit kerja yang harus memiliki Standar Pelayanan, baru 2 yang sudah punya. Sedangkan untuk pengembangan *International Standard Operation* (ISO) baru 6 unit kerja;
- b. Operasionalisasi dari SPM masih belum optimal;
- c. Sumber daya manusia yang memberi pelayanan publik belum memuaskan;
- d. Mentalitas pelayan publik masih ingin dilayani daripada melayani.

4.1.4.5. Kepegawaian;

- a. Proses rekrutmen PNS masih belum optimal.
- b. Data basis kepegawaian belum sepenuhnya tersusun dengan baik.
- c. Pembinaan kepegawaian berupa hukuman dan ganjaran (*reward and punishment*) belum sepenuhnya dilaksanakan.
- d. Kompetensi pegawai Pemerintah Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
- e. Kualitas sumber daya aparatur masih rendah, diindikasikan dengan pendidikan Strata 1 ke atas berjumlah 3.826 orang

(41,03%) dan yang berpendidikan kurang dari Strata 1 berjumlah 5.500 orang (58,97%).

- f. Belum tersusun dokumen analisis jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan sebagai dasar pengembangan PNS yang rasional, profesional, dan akuntabel.

4.1.4.6. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

- a. Sumber daya manusia pengelola pemberdayaan masyarakat belum optimal;
- b. Program pemberdayaan masyarakat masih ada yang kurang tepat sasaran;
- c. Akuntabilitas dan mekanisme pelaporan masih lemah;
- d. Partisipasi masyarakat belum merata dan terbatas pada kelompok tertentu.

4.1.4.7. Kearsipan dan Perpustakaan

- a. Manajemen kearsipan belum optimal;
- b. Kurangnya sumber daya pengelola dan sarana pendukung kearsipan;
- c. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip masih lemah;
- d. Minat baca rendah;
- e. Kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan terbatas;
- f. Tenaga fungsional arsiparis dan pustakawan masih terbatas.

2.2. Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan kompleks seperti diuraikan di atas, maka untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu diidentifikasi terlebih dulu isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang diidentifikasi, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu Strategis			
Dinamika Global	Dinamika Nasional	Dinamika Regional (Jawa Barat)	Lokal (Kota Tasikmalaya)
I. Tujuan Pembangunan Milleium/ <i>Millenium Development Goals</i> (MDGs); 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan 2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua 3. Mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan II. Pemberlakuan ASEAN <i>Economic Community</i> tahun 2015	Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan; 5. Ketahanan pangan; 6. Infrastruktur; 7. Iklim investasi dan usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan hidup dan Bencana; 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik 11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.	Tujuan Inti Pembangunan Jawa Barat (<i>Common Goals</i>) dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat: 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan 3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat 4. Kemandirian Pangan 5. Peningkatan Kinerja Aparatur 6. Pengembangan Infrastruktur Wilayah 7. Kemandirian Energi Dan Kecukupan Air Baku 8. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup 9. Pembangunan Perdesaan 10. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata	Prioritas Pembangunan Tahap-2 dalam RPJPD: 1. Peningkatan dan Pemerataan pembangunan infrastruktur 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan 4. Penangulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih 6. Peningkatan daya saing, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 7. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah 8. Peningkatan pengelolaan tata ruang dan lingkungan 9. Peningkatan Pendapatan dan Daya beli (Purchasing Power Parity) masyarakat

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi di tingkat global, nasional, regional dan lokal, melalui pendekatan analisis keterkaitan (*linkages analysis*) dan pembobotan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) maka isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Tasikmalaya dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur Daerah;

Infrastruktur ke PU-an saat ini belum memadai dan merata ke seluruh wilayah dalam mendukung infrastruktur pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perekonomian dan kemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya tingkat kemantapan, jaringan dan kualitas jalan (termasuk trotoar, marka jalan, dan rambu lalu lintas), kurangnya saluran drainase, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah dan air limbah, infrastruktur air bersih belum memadai/tergantung pihak lain, infrastruktur irigasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu perlu adanya sarana prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, perekonomian dan kemasyarakatan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan dan Kesehatan);

Kualitas SDM dipengaruhi tingkat pendidikan dan kesehatan. Secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, terlihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 9,1, artinya rata-rata pendidikan masyarakat Kota Tasikmalaya baru tingkat SMP. Dari aspek kesehatan, derajat kesehatan masyarakat masih kurang, terbukti dari Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu dan Angka Kesakitan Penduduk masih tinggi dan Angka Harapan Hidup belum optimal.

3. Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan;

Penyimpangan pemanfaatan ruang ditunjukkan oleh tingginya alih fungsi lahan produktif. Alih fungsi lahan produktif untuk kegiatan investasi industri, jasa maupun permukiman yang tidak sejalan dengan pola perencanaan menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan dan penurunan daya dukung/degradasi lingkungan. Perkembangan penduduk yang pesat, tidak diimbangi tingkat kesejahteraan, menyebabkan banyak rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, sanitasi buruk, rendahnya pelayanan

persampahan, semuanya perlu mendapat perhatian pembangunan kedepan.

4. Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat;

Untuk memantau perkembangan daya beli secara riil bisa digunakan PDRB perkapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2011 mencapai Rp. 6.372.651,87. Berdasarkan survei IPM Kota Tasikmalaya tahun 2011, IPM Kota Tasikmalaya tahun 2011 mencapai 74,82; terdiri dari indeks kesehatan sebesar 75,05, indeks pendidikan sebesar 86,62 dan indeks paritas daya beli sebesar 62,80 (setara paritas daya beli/*purchasing power parity* sebesar Rp. 631.750,00 perbulan perkapita). Dari ketiga komponen tersebut, indeks daya beli menempati urutan terakhir dengan laju pertumbuhan yang lambat.

5. Tata Kelola Pemerintahan;

Isu mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (amanah) saat ini belum dijawab dengan pembuktian yang nyata. Hal ini dapat dilihat dari kelembagaan pemerintah yang masih belum sepenuhnya efektif, efisien dan proporsional sehingga sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai tanggung jawab dan beban kerja. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi melemahkan disiplin, etos, dan produktivitas kerja. Praktek yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (KKN) belum teratasi, pelayanan publik belum sesuai tuntutan dan harapan masyarakat, termasuk opini pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah belum meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

6. Penanggulangan Kemiskinan;

Angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2011 mencapai 19,89%, lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Barat yang hanya 10,57% dan Nasional sebesar 12,36%. Secara nasional sesuai target MDGs dan RPJMN 2009-2014, angka kemiskinan harusnya berada pada kisaran 8-10% pada tahun 2014.

7. Tata Nilai dan Kebudayaan Daerah.

Menurunnya moral, tata nilai, kesalehan sosial dan akhlak masyarakat serta masih rendahnya apresiasi, ketahanan dan pelestarian budaya masyarakat akibat imbas perubahan global perlu menjadi perhatian pembangunan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa yang dimaksud Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

5.1. Visi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang terangkum pada isu strategis yang telah diuraikan pada Bab IV dan mengacu pada arah pembangunan tahap kedua pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum Kepala Daerah, juga sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah dimasa mendatang, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah periode 2013-2017 adalah sebagai berikut:

“ Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani “

Penjelasan Visi

Iman menurut bahasa adalah membenarkan. Menurut istilah yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dalam perilaku sehari-hari. Taqwa adalah secara sadar menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. Secara harfiah taqwa mengandung 3 (tiga) makna yaitu tawadhu (sikap rendah hati); qona'ah (sikap ikhlas); dan wara' (sikap menjaga diri dan hati).

Kemandirian Ekonomi adalah kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian yang sebesar mungkin mempergunakan daya/ kekuatan sendiri, berdaya saing, semakin terbuka dan tetap terintegrasi dengan perekonomian regional, nasional dan global. Secara

operasional kemandirian ekonomi dibangun melalui material (sandang, pangan, papan); intelektual (memiliki pola pikir kritis dan sistematis); dan manajemen komunitas (kemampuan kolektif mengkombinasikan potensi keberdayaan kader/ pelaku usaha). Membangun kemandirian bersifat totalitas mencakup banyak aspek, bertahap, fokus berdasar tematik yang disepakati dengan konsistensi pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Daya Saing adalah segenap kemampuan/ daya tarik dalam membentuk atau menawarkan tingkat produktifitas dan bakat/ keterampilan masyarakat yang mendorong tumbuhnya investasi dan pergerakan sektor perekonomian dengan kinerja yang berkelanjutan.

Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing adalah kemampuan dalam mengembangkan perekonomian daerah, khususnya ekonomi kreatif yang mengutamakan sebesar mungkin sumber daya/ kekuatan sendiri dengan tidak membatasi kesempatan dan peluang dari luar melalui mekanisme pasar yang terbuka dan terintegrasi dengan perekonomian regional, nasional dan global.

Masyarakat Madani adalah suatu masyarakat yang berbudaya, maju dan modern, setiap warganya menyadari dan mengetahui kewajiban dan haknya terhadap negara, bangsa dan agama serta terhadap sesama dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian Visi “Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani” adalah bahwa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan landasan fundamental religius yang menjadi inspirasi, motivasi, filosofi dan dasar berpijak serta arah dan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan pemerintah dalam mengemban amanah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang mengutamakan sumberdaya sendiri tanpa membatasi peluang dari luar, dengan mengembangkan potensi khas daerah untuk sebesar-besarnya mewujudkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang berbudaya, maju dan modern dimana setiap warganya menyadari kewajiban dan haknya terhadap negara, bangsa dan agamanya.

5.2. Misi

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan merujuk ketentuan yang sama seperti di awal Bab ini, Misi adalah rumusan umum mengenai

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi.

Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan Peningkatan Ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat;

Misi ini mengandung 2 aspek yang dituju, yakni Penyelenggaraan Pemerintahan dalam sistem pemerintahan (kelembagaan, SDM/ aparatur dan regulasi/ mekanisme) dan kehidupan Masyarakat dalam sistem sosial yang komplek.

Secara harfiah amanah bermakna tenteram, aman, selamat dan harmoni. Makna amanah ialah tanggungjawab yang diterima oleh seseorang yang kepadanya diberikan kepercayaan bahwa ia dapat melaksanakannya sebagaimana yang dituntut, tanpa mengabaikannya. Makna amanah dalam misi ini adalah gambaran integritas moral aparatur yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kewajiban berdasar koridor ketentuan yang berlaku sebagai abdi negara dan pengayom masyarakat.

Ketaatan dan Kesalehan Sosial menggambarkan keutamaan bersikap dalam mematuhi hukum yang berlaku (hukum positif), sekaligus mengembangkan ketaatan terhadap aturan yang bersumber dari tata nilai keagamaan, adat istiadat, budaya dan hak asasi manusia secara universal dalam sistem sosial di lingkungannya dengan memelihara gotong royong, solidaritas dan kesetiakawanan sosial serta kerukunan antar komponen masyarakat.

Misi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan Peningkatan Ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat mempunyai pengertian segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat serta menjalankan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain sikap masyarakat yang penuh kesadaran untuk mematuhi hukum dan mendukung kebijakan pemerintah serta menjunjung tinggi tata nilai religius dengan memelihara budaya gotong royong, solidaritas dan kesetiakawanan sosial serta kerukunan antar sesama komponen masyarakat.

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.

Meningkatkan berarti melakukan perbaikan atau pemeliharaan terhadap infrastruktur dan suprastruktur sehingga peran dan fungsinya sesuai yang diharapkan. Menyediakan berarti melakukan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang belum tersedia sesuai urgensi kebutuhannya.

Infrastruktur Ekonomi adalah sumber daya alam, sarana, alat/fasilitas produksi yang mendukung terhadap aktifitas perekonomian. Suprastruktur Ekonomi adalah unsur non fisik, mencakup regulasi, organisasi/ kelembagaan, mekanisme pasar, manajemen distribusi barang dan jasa, termasuk sistem perekonomian.

Pemberdayaan Masyarakat yang Berbasis Lingkungan berarti kegiatan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur ekonomi yang dilaksanakan selalu memberi ruang dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mengembangkan potensi khas daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan demikian makna misi Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumberdaya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya (sufrastuktur) yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.

Misi 3 : Meningkatkan dan Menyediakan Infrastruktur dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya Lokal.

Meningkatkan mengandung pengertian melakukan pemeliharaan dan atau rehabilitasi terhadap infrastruktur yang telah rusak/ menurun fungsinya. Menyediakan berarti membangun dan atau menyediakan infrastruktur yang belum ada/ tersedia.

Infrastruktur mencakup sarana fisik seperti bangunan sekolah, rumah sakit, puskesmas, rumah singgah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), gedung kesenian dan lain-lain, termasuk peningkatan jalan/ jembatan yang menuju dari dan ke layanan pendidikan, kesehatan, sarana sosial dan wahana pengembangan budaya.

Mutu adalah kualitas pelayanan yang diberikan aparatur terhadap masyarakat yang membutuhkan seperti mutu tenaga pendidik, mutu bahan pelajaran, layanan tenaga medis, layanan fasilitas/ peralatan kesehatan, layanan obat-obatan dan kefarmasian, layanan kesejahteraan sosial (termasuk regulasi sistem pengelolaan), layanan pengembangan budaya lokal (termasuk sistem pengembangan seni dan budaya), dan lain-lain.

Makna Misi Meningkatkan dan Menyediakan Infrastruktur dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya Lokal adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumberdaya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan budaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas, handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya lokal.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Misi 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan Peningkatan Ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat, mempunyai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel.
- Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi.
- Sasaran 2 : Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
- Sasaran 3 : Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan.
- Sasaran 4 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
- Sasaran 5 : Meningkatnya pelayanan publik.
- Sasaran 6 : Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat.
- Sasaran 7 : Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat.
- Tujuan 2 : Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, teratur, disiplin dan religious
- Sasaran 1 : Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Sasaran 2 : Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan, mempunyai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:
- Tujuan 1 : Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
- Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan.
- Sasaran 2 : Optimalisasi infrastruktur pengairan dalam upaya penyediaan air baku.
- Sasaran 3 : Meningkatnya sarana prasarana perhubungan yang memadai serta tersedia sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- Tujuan 2 : Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan berdasarkan pola tata ruang daerah.
- Sasaran 1 : Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan.
- Sasaran 2 : Tersedianya permukiman dan lingkungan yang tertib dan sehat sesuai dengan pola tata ruang.
- Sasaran 3 : Pengendalian sumber daya alam (SDA), lingkungan dan penyediaan energi.

- Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan daya beli masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi lokal.
- Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
- Sasaran 2 : Meningkatnya UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya.
- Sasaran 3 : Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya Lokal, mempunyai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
- Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan
- Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- Sasaran 1 : Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
- Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Sasaran 3 : Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
- Sasaran 4 : Menjamin perlindungan anak dan perempuan.
- Sasaran 5 : Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan.
- Sasaran 6 : Pelestarian seni budaya dan olahraga.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapainya melalui strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah selama lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kota Tasikmalaya mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kota Tasikmalaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu :

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Walikota/ Wakil Walikota ke dalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Berkenaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1.

Strategi dan Arah Kebijakan Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017

VISI	: Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani
MISI I	:Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan Peningkatan Ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1.Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel	1. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi	Meningkatkan budaya aparatur yang disiplin, berintegritas dan kompeten	1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan 2. Optimalisasi manajemen kepegawaian
	2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Optimalisasi organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pembangunan	1. Penataan organisasi perangkat daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan
		2. Meningkatkan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel	2. Membangun sistem kerja dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi
	3. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan	Menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai sampai ke tingkat kelurahan
	4. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis	1. Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan asli daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	akuntabel	teknologi informasi	(PAD) dan optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan daerah lainnya secara akuntabel berbasis teknologi informasi 2. Pengelolaan anggaran daerah yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi
	5. Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan transparan	1. Membangun sistem informasi disemua pelayanan publik 2. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik menuju cyber city 3. Optimalisasi penataan data dan administrasi kependudukan
	6. Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat	Meningkatkan penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat	1. Menata sistem hukum dan regulasi daerah yang adil dan bermartabat 2. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan demokrasi
	7. Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan memberikan ruang	Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif 2. Peningkatan kapasitas dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	untuk partisipasi masyarakat		kualitas sistem pengawasan
1.Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, teratur, disiplin dan religius	1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Mendorong aparaturnya dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan
	2. Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1. Melakukan pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat 2. Peningkatan sarana prasarana keagamaan dan sosial kemasyarakatan dengan mendorong peran swadaya masyarakat

MISI II : Meningkatkan dan Menyediakan Infrastruktur dan Suprastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan	1. Meningkatkan rasio jalan dan jembatan dalam kondisi baik (kualitas dan kapasitasnya) 2. Meningkatkan rasio saluran drainase dan trotoar yang	1. Meningkatkan infrastruktur jalan dengan kapasitas dan kualitas untuk aksesibilitas pergerakan kegiatan antar wilayah guna mendukung kegiatan perekonomian dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		berkualitas	layanan pemerintahan 2. Meningkatkan rasio saluran drainase dan trotoar yang berkualitas
	2. Optimalisasi infrastruktur pengairan dalam upaya penyediaan air baku	3. Meningkatkan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air	1. Peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk mendukung pembangunan bidang pertanian dan menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat
	3. Meningkatnya sarana prasarana perhubungan yang memadai serta tersedia sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Meningkatkan sarana prasarana perhubungan dan transportasi umum yang layak, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi	1. Meningkatkan sarana prasarana perhubungan dan transportasi umum yang aman dan memadai 2. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
1. Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan berdasarkan pola tata ruang daerah	1. Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan	Menyediakan air bersih bagi seluruh warga dan meningkatkan sanitasi dan meningkatkan layanan persampahan	1. Meningkatkan cakupan layanan melalui PDAM dan penyediaan sumur air permukaan 2. Meningkatkan sarana prasarana sanitasi dan pengelolaan persampahan yang menjangkau sebagian besar wilayah kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	2. Tersedianya permukiman dan lingkungan yang tertib dan sehat sesuai dengan pola tata ruang	Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan;	1. Mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang dan data spasial 2. Mewujudkan rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh semua 3. Meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang
	3. Pengendalian sumber daya alam, lingkungan dan penyediaan energi	Pemanfaatan SDA, lingkungan dan energi yang seimbang dan berkelanjutan	1. Mengendalikan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan 2. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan penyediaan energi bagi masyarakat
1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan daya beli masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi lokal	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat	Mendorong aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang perdagangan, jasa, industri kreatif dan pariwisata	1. Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang perdagangan, jasa, dan industri kreatif berbasis potensi lokal 2. Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang pariwisata melalui wisata kuliner dan ekowisata
		Meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan	1. Meningkatkan produktivitas pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		daerah	2. Meningkatkan ketahanan pangan daerah
	2. Meningkatnya UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya	Mengembangkan UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya	1. Mengembangkan jiwa wirausaha dan usaha mikro, kecil serta menengah 2. Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan lainnya, terutama lembaga keuangan mikro sampai tingkat kelurahan
	3. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja	Meningkatkan jaminan keamanan dan kepastian iklim investasi	Melakukan promosi daerah dan pemberian insentif bagi investor

MISI III : Meningkatkan Infrastruktur dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya Lokal			
1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang.	1. Akselerasi penyeleenggaraan pendidikan di kecamatan yang angka partisipasi pendidikannya masih rendah 2. Peningkatan dan pemerataan daya tampung pendidikan setiap jenis dan jenjang pendidikan 3. Penguatan dan pengembangan pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			non formal dan informal.
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif	1. Meningkatkan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan 2. Meningkatkan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat
2. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	1. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	1. Meningkatkan jaminan perlindungan sosial	1. Meningkatkan jaminan perlindungan sosial dibidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan dan sosial lainnya 2. Mitigasi bencana dan rehabilitasi pasca bencana
		2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha	1. Meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
		3. Mendorong terbukanya kesempatan berkerja dan berusaha	1. Memperluas lapangan pekerjaan melalui penciptaan wiras usaha baru 2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
	2. Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah	Meningkatkan penanganan PMKS secara menyeluruh	Meningkatkan penanganan PMKS secara menyeluruh

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	Kesejahteraan Sosial (PMKS)		dengan melibatkan masyarakat
	3. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Optimaliasi pengendalian kependudukan	Mendorong keluarga berencana yang kecil, mandiri dan sejahtera
	4. Menjamin perlindungan anak dan perempuan	Meningkatkan advokasi perlindungan anak dan perempuan	Meningkatkan jaminan perlindungan anak dan perempuan
	5. Meningkatkan peran gender dan pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan peran gender, dan pemuda dalam pembangunan	Mendorong peran perempuan dan pemuda untuk lebih aktif dalam pembangunan
	6. Pelestarian seni budaya dan olahraga	Mengembangkan seni budaya dan olahraga	1. Meningkatkan apresiasi terhadap pelaku seni budaya dan olahraga 2. Meningkatkan sarana dan prasarana seni budaya dan olahraga

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas dengan upaya melalui strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung oleh kebijakan yang bersifat umum dan dikaitkan dengan prioritas pembangunan serta program yang akan dilaksanakan. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas pembangunan. Adapun prioritas dan program pembangunan pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah
 - a. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan;
 - d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong;
 - e. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong;
 - f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
 - g. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
 - h. Program Pendidikan Menengah;
 - i. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Bidang Pendidikan;

- j. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - k. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata;
 - l. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan;
 - m. Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah;
 - n. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - o. Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar;
 - p. Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian.
2. Peningkatan kualitas SDM yang didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Duabelas Tahun;
 - b. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - d. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
 - e. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
 - f. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan Kesehatan;
 - g. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
 - h. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS;
 - i. Program Peningkatan Kesejahteraan SDM Rumah Sakit;
 - j. Program Keluarga Berencana.
3. Pengendalian tata ruang, permukiman dan lingkungan yang berkelanjutan
- a. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Program Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota);
 - c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - d. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pertamanan dan Pemakaman;
 - e. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman;

- f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
 - g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
 - h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - i. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
 - j. Program Pengendalian Banjir;
 - k. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - l. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
4. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat
- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
 - b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah);
 - c. Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
 - d. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
 - e. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 - f. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
 - g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
 - i. Program Peningkatan Produksi Perikanan;
 - j. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
 - k. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar;
 - l. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;
 - m. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
 - n. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
 - o. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
 - p. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - q. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - r. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan amanah

- a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Program Pengembangan Data/ Informasi;
 - c. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah;
 - d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - g. Program Perencanaan Sosial Budaya;
 - h. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - i. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
 - k. Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - l. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah;
 - m. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - n. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
 - o. Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah;
 - p. Program Peningkatan Pelayanan Publik;
 - q. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan;
 - r. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
 - s. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
 - t. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
 - u. Program Peningkatan SDM Pertanian;
 - v. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
6. Penanggulangan kemiskinan
- a. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

- b. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya;
 - c. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan;
 - d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
 - e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
 - g. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
 - h. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
 - i. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
 - j. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
 - k. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan (bantuan listrik untuk rumah tangga pra KS).
7. Pelestarian tata nilai dan kebudayaan daerah
- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Program Pengembangan Nilai Budaya;
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
 - d. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
 - e. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
 - f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
 - g. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Program prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya tahun 2013-2017, secara spesifik menjadi perhatian khusus yakni:

1. Peningkatan Infrastruktur berkualitas kota melalui Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong, Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;

2. Pembangunan pusat pasar ekonomi kreatif produk unggulan daerah (kerajinan, makanan, olahan dll) sebagai pusat pemasaran, promosi dan objek wisata belanja dan kuliner Tasikmalaya, melalui Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar;
3. Pendidikan berbasis ahlak, melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun;
4. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat melalui Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan Kesehatan; Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya;
5. Rintisan pengembangan lapangan terbang komersial, melalui Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Selain itu, disamping melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihannya, Pemerintah Kota Tasikmalaya akan mendukung terhadap program-program Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat serta inisiatif masyarakat, diantaranya adalah upaya percepatan penegerian Universitas Siliwangi dan memfasilitasi terlaksananya pembangunan Asrama Haji Tasikmalaya.

Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan lima tahun kedepan dan untuk optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas program serta pencapaian target kinerja pembangunan, maka perlu dirumuskan suatu kebijakan umum pembangunan tahunan secara bertahap. Perumusan pembangunan tahunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis, prioritas pembangunan dan berdasarkan kemendesakan kebutuhan serta limitasi kemampuan keuangan daerah.

Dengan pentahapan ini diharapkan *output* dan *outcome* pembangunan secara cepat dan nyata dapat dirasakan oleh kelompok sasaran pembangunan khususnya, serta seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya

pada umumnya. Pentahapan pembangunan dimaksud selanjutnya disebut “Fokus Pembangunan Kota Tasikmalaya”. Fokus pembangunan ini menggambarkan sasaran utama pembangunan yang akan dijadikan prioritas pembangunan pada tahun bersangkutan dengan tidak mengabaikan pembangunan urusan dan sasaran pembangunan yang lain.

1. Fokus Pembangunan Tahun 2013-2015

“Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah”

Fokus pembangunan periode ini merupakan upaya penyediaan infrastruktur sebagai modal dasar untuk pelaksanaan pada fokus pembangunan tahun 2016-2017. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah adalah upaya untuk menyediakan infrastruktur daerah yang mempunyai daya tampung sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi standar sesuai dengan kelas dan fungsinya. Pembangunan infrastruktur daerah meliputi infrastruktur pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta kemasyarakatan yang didukung oleh infrastruktur ke-PU-an yang berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pada tahap awal, prioritas pembangunan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase terutama yang menuju pada pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, menggambarkan kondisi jaringan jalan yang memenuhi standar konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsinya.

Tahap selanjutnya pembangunan difokuskan pada pengembangan infrastruktur lainnya antara lain:

- a. Infrastruktur pemerintahan seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor pemerintahan.
- b. Infrastruktur kesehatan seperti pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, pustu, dan pengembangan RSUD serta penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan.
- c. Infrastruktur pendidikan seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan termasuk kelengkapannya (perpustakaan, toilet, laboratorium, dll).

- d. Infrastruktur perekonomian seperti pemeliharaan irigasi, pembangunan / revitalisasi pasar tradisional, pembangunan sentra usaha mikro dan kecil, industri kreatif dengan konsep *One Village One Product* serta terminal peti kemas.
 - e. Infrastruktur kemasyarakatan seperti penyediaan taman kota, pembangunan dan rehabilitasi sarana olah raga, dan keagamaan.
2. Fokus Pembangunan Tahun 2016-2017

”Mendorong Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”

Fokus pembangunan pada periode ini merupakan lanjutan dari fokus pembangunan sebelumnya. Pada periode ini pembangunan diprioritaskan pada upaya mendorong kemandirian ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang ditandai oleh meningkatnya daya beli masyarakat dan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan membayar dalam memperoleh barang/jasa yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh masyarakat. Upaya peningkatan daya beli diantaranya melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan produktivitas usaha, pengendalian inflasi, penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Peningkatan kesejahteraan sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Langkah utama yang menjadi prioritas diantaranya dengan mutu layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berdampak langsung pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Tasikmalaya yang sehat, produktif, mandiri dan dapat bersaing baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun global.

Dalam rangka mewujudkan fokus pembangunan yang terukur, maka disajikan tabel kebijakan dan program pembangunan sebagai berikut:

Tabel 7.1.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Tasikmalaya

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1.	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi	1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan 2. Optimalisasi manajemen kepegawaian	1. Tingkat pelanggaran disiplin aparatur (% x total PNS Pemkot) 2. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat /Bimtek (orang)	0,13	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	1. Program peningkatan disiplin aparatur 2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Semua SKPD
2.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Penataan organisasi perangkat daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan 2. Membangun sistem kerja dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi	1. Jumlah unit kerja yang menerapkan SOP (unit) 2. Kesesuaian struktur perangkat daerah dengan peraturan yang berlaku (%) 3. Nilai efisiensi organisasi perangkat daerah (%)	-	14	33	102	123	155	177	1. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah 2. Program pelayanan administrasi perkantoran 3. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 4. Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan 5. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Semua SKPD

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
3.	Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai sampai ke tingkat kelurahan	Persentase tanah dan bangunan gedung SKPD milik sendiri (%)	73	73	73	85	90	100	100	1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2. Program peningkatan fasilitas pendukung kerja pemerintahan 3. Program pengembangan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan 4. Program pengembangan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	Semua SKPD
4.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan daerah lainnya secara akuntabel berbasis teknologi informasi 2. Pengelolaan anggaran daerah yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi	1. Peningkatan pendapatan daerah (triliun) 2. Opini laporan keuangan pemerintah daerah	0,916 WDP	1,067 WDP	1.115 WTP	1.180 WTP	1.258 WTP	1.334 WTP	1.412 WTP	1. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD) 2. Program pengendalian pendapatan daerah 3. Program pengendalian, monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	1. Dinas Pendapatan 2. Sekretariat Daerah 3. Semua SKPD

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
5.	Meningkatnya pelayanan publik	1. Membangun sistem informasi disemua pelayanan publik 2. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik menuju cyber city 3. Optimalisasi penataan data dan administrasi kependudukan	1. Jumlah unit pelayanan yang bersertifikat ISO 2. Indek Kepuasan Masyarakat 3. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda (buah) 4. Rasio penduduk ber-KTP (%) 5. Kepemilikan akte kelahiran (per 1000) 6. Ketersediaan database kependudukan skala kota	-	5	7	8	9	10	11	1. Program pengembangan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 2. Program peningkatan pelayanan publik 3. Program peningkatan pelayanan perijian 4. Program fasilitasi prasarana pelayanan publik 5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 6. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah. 7. Program penataan administrasi kenendudukan 8. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 2. Kependudukan dan catatan sipil	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.	Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat	1. Menata sistem hukum dan regulasi daerah yang adil dan bermartabat	1. Jumlah Peraturan Daerah yang dibentuk (buah)	8	8	8	10	10	10	10	1. Program penataan peraturan perundang-undangan	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi	1. Sekretrariat Daerah

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
		2. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan demokrasi	2. Jumlah Peraturan Walikota yang dibentuk (buah) 3. Penegakan Peraturan Daerah (%) 4. Partisipasi pada Pemilu (%)	48 90 -	43 92 81,38	15 93 80	25 94 80	25 96 -	25 98 -	25 100 80	2. Program sosialisasi peraturan perundang-undangan 3. Program perlakuan dan perlindungan hukum yang tidak diskriminatif 4. Program pengembangan wawasan kebangsaan 5. Program pendidikan politik masyarakat		2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7.	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat	1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem pengawasan	1. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang (%) 2. Jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan (buah) 3. Nilai Akuntabilitas dan Kinerja SKPD (%) 4. Ketepatan waktu perencanaan dengan regulasi (Ya / Tidak)	80 5 - Ya	82 6 50 Ya	84 4 55 Ya	86 4 60 Ya	88 3 65 Ya	90 2 70 Ya	92 1 75 Ya	1. Program perencanaan pembangunan daerah 2. Program perencanaan kerja 3. Program perencanaan pembangunan ekonomi 4. Program perencanaan sosial budaya 5. Program perencanaan tata ruang dan tata bangunan (tata kota) 6. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 7. Program pengembangan data / informasi	1. Perencanaan pembangunan 2. Statistik 3. Penataan ruang	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kecamatan 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi 6. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
											8. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 9. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 10. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 11. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturng pengawasan		8. Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah 9. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 11. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 12. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 13. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 16. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 17. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
8.	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Mendorong aparatur dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan	1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja (per 10.000 penduduk) 2. Jumlah Linmas per Jumlah (per 10.000 penduduk) 3. Angka kriminalitas (per 10.000 penduduk) 4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	1,7 44 5 84	1,1 37 7 84	3,1 39 6 84	4,1 40 5 85	5,1 41 4 85	6,1 42 3 86	7,1 43 2 86	1. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 2. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian	1. Sekretariat Daerah 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
9.	Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	1. Melakukan pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat 2. Peningkatan sarana prasarana keagamaan dan sosial kemasyarakatan dengan mendorong peran swadaya masyarakat	1. Konflik antar pemeluk agama (kasus) 2. Konflik masyarakat 3. Penanganan konflik masyarakat (kasus)	1 2 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	1. Program peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2. Program fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	1. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 2. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	1. Sekretariat Daerah 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
10.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan	1. Meningkatkan infrastruktur jalan dengan kapasitas dan kualitas untuk aksesibilitas pergerakan kegiatan antar wilayah guna mendukung kegiatan perekonomian dan layanan pemerintahan	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (point)	0,52	0,52	0,62	0,68	0,77	0,9	1	1. Program pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan umum	1. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
		2. Meningkatkan rasio saluran drainase dan trotoar yang berkualitas	2. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air/ 1,5 meter (%)	-	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	2. Program peningkatan jalan dan jembatan 3. Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 4. Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan 5. Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong 6. Program rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong 7. Program pembangunan / rehabilitasi/ pemeliharaan trotoar 8. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 9. Program pembangunan infrastruktur perdesaan		2. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
											10. Program fasilitasi pengadaan tanah pemerintah		
11.	Optimalisasi infrastruktur pengairan dalam upaya penyediaan air baku	1. Peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk mendukung pembangunan bidang pertanian dan menjaga ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat	1. Rasio Jaringan Irigasi (point)	0,01	0,01	0,011	0,012	0,013	0,014	0,015	1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya 2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya 3. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya 4. Program pengendalian banjir	Pekerjaan Umum	1. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi 2. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
12.	Meningkatnya sarana prasarana perhubungan yang memadai serta tersedia sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	1. Meningkatkan sarana prasarana perhubungan dan transportasi umum yang aman dan memadai 2. Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	1. Rasio ijin trayek (per 10.000) 2. Jumlah terminal angkutan darat / bis (unit) 3. Jumlah jaringan komunikasi (unit) 4. Web site pemerintah daerah/SKPD	0,00211 5 0,078 Ada	0,00215 5 0,059 Ada	0,00216 5 0,061 Ada	0,00216 5 0,062 Ada	0,00217 6 0,063 Ada	0,00217 6 0,064 Ada	0,00217 6 0,066 Ada	1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 3. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 4. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
											5. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 6. Program peningkatan pelayanan angkutan 7. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 8. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 9. Program peningkatan pelayanan lalu lintas 10. Program peningkatan optimalisasi perhubungan 11. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 12. Program kerjasama informasi dan media massa 13. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa		
13.	Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan	1. Meningkatkan cakupan layanan melalui PDAM dan penyediaan sumur air permukaan 2. Meningkatkan sarana prasarana sanitasi dan pengelolaan persampahan yang menjangkau sebagian besar wilayah kota	1. Persentase Penduduk berakses air minum (%) 2. Persentase rumah tangga ber-Sanitasi (%) 3. Persentase penanganan sampah (%)	27,08 55,57 28	28,56 64,41 38	30,56 67,64 42	32,56 70,97 48	34,56 74,3 52	37,56 76,93 60	39,56 79,56 65	1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 2. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Pekerjaan Umum	Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
14.	Tersedianya permukiman dan lingkungan yang tertib dan sehat sesuai dengan pola tata ruang	1. Mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang dan data spasial 2. Mewujudkan rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh semua 3. Meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang	1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (point) 2. Persentase luas pemukiman yang tertata (%)	21,35 66,95	21,85 67,52	22,85 67,09	24,85 67,51	26,85 67,94	29,85 73,94	30,85 74,64	1. Program pengendalian dan pemanfaatan ruang 2. Program pengelolaan areal pemakaman 3. Program peningkatan kualitas lingkungan pemukiman 4. Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pertamanan dan Pemakaman 5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Penataan Ruang 2. Perumahan Rakyat	Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
15.	Pengendalian sumber daya alam, lingkungan dan penyediaan energi	1. Mengendalikan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan 2. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan penyediaan energi bagi masyarakat	1. Penegakan hukum lingkungan (%) 2. Rumah tangga pengguna listrik (%)	100	100	100	100	100	100	100	1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 2. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. Lingkungan Hidup 2. Penataan ruang 3. Energi dan sumber daya mineral	1. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan 2. Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi 3. Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
											4. Program peningkatan pengendalian polusi 5. Program rehabilitasi hutan dan lahan 6. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 7. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan		4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
16.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat	1. Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang perdagangan, jasa, dan industri kreatif berbasis potensi lokal 2. Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing dibidang pariwisata melalui wisata kulier dan ekowisata 3. Meningkatkan produktivitas pertanian 4. Meningkatkan ketahanan pangan daerah	1. Pertumbuhan PDRD/ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 2. PDRB Perkapita (juta Rp.) 3. Laju Inflasi Kota (%) 4. Indek Daya Beli (point) 5. Index Gini (point)	5,81	5,85	5,9	5,95	6,05	6,2	6,35	1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2. Program peningkatan fasilitas pelayanan pasar 3. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 4. Program peningkatan dan pengembangan ekspor 5. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 6. Program pengembangan destinasi pariwisata	1. Perdagangan 2. Industri 3. Pariwisata 4. Pertanian 5. Kehutanan 6. Kelautan dan perikanan	1. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
											7. Program pengembangan kemitraan pariwisata 8. Program pengembangan pemasaran pariwisata 9. Program peningkatan kesejahteraan petani 10. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 11. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 12. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 13. Program peningkatan produksi hasil peternakan 14. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 15. Program peningkatan ketahanan pangan 16. Program penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian 17. Program peningkatan SDM pertanian 18. Program pemanfaatan potensi sumber daya kehutanan 19. Program pengembangan budidaya perikanan 20. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 21. Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar 22. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	7. Ketahanan Pangan	

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
											23. Program Peningkatan Produksi Perikanan		
17.	Meningkatnya UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya	1. Mengembangkan jiwa wirausaha dan usaha mikro, kecil serta menengah 2. Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan lainnya, terutama lembaga keuangan mikro sampai tingkat Kelurahan	1. Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%) 2. Persentase koperasi aktif (%)	88,13 66,16	86,49 67,49	88,49 70,49	90,90 75,49	92,5 79,49	94,97 84,49	95,35 89,49	1. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 2. Program pengembangan industri kecil dan menengah 3. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 4. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1. Koperasi dan usaha kecil dan menengah 2. Perdagangan 3. Industri	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
18.	Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja	1. Melakukan promosi daerah dan pemberian insentif bagi investor	1. Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA (buah) 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA (Milyar Rp.)	2 228,94	2 230	2 230	2 230	2 230	2 230	2 230	1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	1. Penanaman modal 2. Ketenagakerjaan	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
19.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1. Meningkatkan aksesibilitas dan sarana prasarana pendidikan formal dan non formal berbasis teknologi informasi	1. Angka melek huruf (%)	99,59	99,61	99,65	99,7	99,76	99,82	99,9	1. Program pendidikan anak usia dini	1. Pendidikan	1. Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
		2. Meningkatkan mutu layanan pendidikan, tenaga kependidikan serta tata kelola pendidikan dengan pengembangan kurikulum berbasis akhlakul karimah dan lifeskill	2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,10	9,32	9,45	9,59	9,74	9,90	10,07	2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan dan dua belas tahun	2. Perpustakaan	2. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
		3. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana perpustakaan yang mudah diakses	3. Indeks Pendidikan (point)	86,62	87,32	87,63	87,95	88,29	88,65	89,03	3. Program pendidikan menengah		
			4. Angka kelulusan per jenjang pendidikan (%)								4. Program pendidikan non formal		
			<i>SD / MI</i>	100	100	100	100	100	100	100	5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan		
			<i>SMP / MTs</i>	100	100	100	100	100	100	100	6. Program manajemen pelayanan pendidikan		
			<i>SMA / MA / SMK</i>	99,95	99,97	99,98	99,98	99,99	100	100	7. Program peningkatan fasilitas pendukung kerja bidang pendidikan		
			5. Persentase pendidikan yang ditamatkan (%)								8. Program pelayanan administrasi persekolahan		
			<i>SD / MI</i>	46,22	47,19	48,16	49,13	50,1	51,07	52,04	9. Program fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)		
			<i>SMP / MTs</i>	16,14	17,11	18,08	19,05	20,02	20,99	21,96			
			<i>SMA / MA /SMK</i>	17,94	18,91	19,88	20,85	21,82	22,79	23,76	10. Program peningkatan mutu dan prestasi belajar		
			6. Angka Partisipasi Kasar (%)								11. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		
			<i>SD / MI</i>	111,44	112,77	113,23	113,24	113,25	113,26	113,27	12. Program pengembangan budaya baca dan perpustakaan		
			<i>SMP / MTs</i>	100,75	101,89	102,45	102,46	102,47	102,48	102,49			

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
			<i>SMA / MA / SMK</i>	91,94	93,37	94,49	95,31	96,56	97,78	99,91			
			7. Angka Partisipasi Murni (%)										
			<i>SD / MI</i>	99,4	99,34	99,28	99,22	99,16	99,1	99,04			
			<i>SMP / MTs</i>	93,57	93,51	93,45	93,39	93,33	93,27	93,21			
			<i>SMA / MA / SMK</i>	74,95	74,89	74,83	74,77	74,71	74,65	74,59			
20.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan 2. Meningkatkan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis pemberdayaan	1. Angka Kematian Bayi Registrasi (per 1.000) 2. Angka usia harapan hidup (tahun) 3. Indek Kesehatan (point) 4. Angka Kematian Ibu Registrasi (per 100.000) 5. Persentase balita gizi buruk (%)	10,46 70,03 75,05 202,2 0,149	10,37 70,26 75,33 182,2 0,19	10,28 70,5 75,58 162,2 0,41	10,19 70,77 75,80 142,2 0,36	10,1 71,05 75,98 122,2 0,31	10,01 71,27 76,15 102,2 0,26	9,92 71,79 76,3 82,2 0,21	1. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya 2. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan Kesehatan 3. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan 4. Program upaya kesehatan masyarakat 5. Program perbaikan gizi masyarakat 6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 7. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 8. Program pengembangan lingkungan sehat 9. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 10. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 11. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 12. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Kesehatan	1. Dinas Kesehatan 2. RSUD 3. Kecamatan

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
											13. Program obat dan perbekalan kesehatan 14. Program peningkatan pelayanan rumah sakit 15. Program standarisasi administrasi kesehatan 16. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata 17. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata 18. Program peran serta peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat 19. Program standarisasi pelayanan kesehatan 20. Program peningkatan kesejahteraan SDM rumah sakit 21. Program peningkatan pengelolaan keuangan rumah sakit		
21.	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	1. Meningkatkan jaminan perlindungan sosial dibidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan dan sosial lainnya	1. Angka Kemiskinan (%)	19,98	18,9	17,88	16,84	15,78	14,72	13,66	1. Program penanggulangan kemiskinan perkotaan	1. Sosial	1. Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
		2. Mitigasi bencana dan rehabilitasi pasca bencana 3. Meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi dunia usaha dunia 4. Memperluas lapangan pekerjaan melalui penciptaan wiras usaha baru 5. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3. Rasio penduduk yang bekerja (point) 4. Tingkat Partisipasi Angka Kerja (%)	9,14	9,13	9,11	9,09	9,07	9,04	9,01	2. Program peningkatan kesempatan kerja 3. Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 4. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 5. Program transmigrasi regional 6. Program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	2. Pemberdayaan masyarakat dan desa 3. Ketenagakerjaan 4. Ketransmigrasian	2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Dinas Ciptakarya, Tata Ruang dan Kebersihan
22.	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan penanganan PMKS secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat	1. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	3,15	4,1	4,85	5,1	5,75	6,25	7	1. Program pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya 2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3. Program pembinaan anak terlantar 4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 5. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Sosial	1. Sekretariat Daerah 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
											6. Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 7. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		
23.	Pengendalian laju pertumbuhan penduduk	1. Mendorong keluarga berencana yang kecil, mandiri dan sejahtera	1. Total Fertility Rate (TFR)	2,55	2,54	2,53	2,52	2,51	2,5	2,49	1. Program keluarga berencana 2. Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga 3. Program kesehatan reproduksi	1. Kependudukan dan catatan sipil 2. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	1. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
24.	Menjamin perlindungan anak dan perempuan	1. Meningkatkan jaminan perlindungan anak dan perempuan	1. Jumlah KDRT yang dilaporkan (kasus)	12	38	20	19	18	17	16	1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan 2. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 2. Dinas Kebudayaan , Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
25.	Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan	1. Mendorong peran perempuan dan pemuda untuk lebih aktif dalam pembangunan	1. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 2. Jumlah organisasi kepemudaan (buah)	41,08 64	42,06 64	43,04 67	444,02 72	45 76	45,98 81	46,96 86	1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 3. Program peningkatan peran serta kepemudaan	1. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Pemuda dan olah raga	1. Dinas Kebudayaan , Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 2. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
26.	Pelestarian seni budaya dan olahraga	1. Meningkatkan apresiasi terhadap pelaku seni budaya dan olahraga	1. Jumlah grup kesenian (buah)	163	172	175	177	179	181	183	1. Program pengembangan nilai budaya	1. Pemuda dan olah raga	Dinas Kebudayaan , Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran	Kebijakan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja							Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana seni budaya dan olahraga	2. Jumlah gedung kesenian (buah)	1	1	1	1	1	1	1	2. Program pengelolaan kekayaan budaya	2. Kebudayaan	
			3. Jumlah klub olahraga (buah)	200	210	215	220	225	230	235	3. Program pengelolaan keragaman budaya		
			4. Jumlah gedung olahraga (buah)	42	44	47	54	58	63	68	4. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga		
											5. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga		
											6. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga		

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 Pemerintah Kota Tasikmalaya melaksanakan semua urusan pemerintahan, dengan mengalokasikan belanja langsung dan tidak langsung termasuk belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja langsung dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan daerah dan program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, maka disusun berbagai program yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah sekaligus memuat penjabaran dari program unggulan dan andalan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Tasikmalaya. Program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang akan dilaksanakan oleh semua SKPD yang ada. Berikut tabel 8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017, sebagai berikut:

Tabel 8.1.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM PADA SETIAP SKPD			100%	109.472.914.089,71		110.950.320.818,81		117.920.793.604,54		124.214.516.660,53		127.866.398.418,85		590.424.943.592,44	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%	100%	45.372.532.610,29	100%	46.291.761.045,43	100%	49.502.166.685,09	100%	52.032.913.093,90	100%	54.146.600.202,54	100%	247.345.973.637,25	Semua SKPD
		Cakupan pelayanan administrasi pemeliharaan kesehatan TTK	121 orang	107 Orang		97 Orang		80 Orang		69 Orang		67 Orang		420 orang		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	31.423.650.650,81	100%	32.274.242.818,35	100%	34.529.890.669,30	100%	36.741.895.239,14	100%	36.796.299.025,77	100%	171.765.978.403,37	Semua SKPD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	1.641.467.872,53	100%	1.682.850.720,73	100%	1.780.424.391,80	100%	1.917.758.117,51	100%	2.059.314.348,72	100%	9.081.815.451,29	Dinas Pendidikan, RSUD, Dinas Cipta Karya, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Capil, KPLH, Dinas KUMKM Perindag, Setda, Sekretariat DPRD, Kec. Tamansari, Kecamatan Kopo
		Cakupan pembinaan disiplin aparatur melalui penyediaan pakaian dinas dan pakaian khusus	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	Pindah / Purna Tugas PNS		1 Orang	10.000.000,00		-		-		-	1 Orang	10.000.000,00	2 Orang	20.000.000,00	KPLH
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Rutin)	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur	100%	100%	4.955.038.074,77	100%	5.317.781.268,53	100%	5.692.765.029,46	100%	6.011.293.058,42	100%	6.295.891.389,53	100%	28.272.768.820,71	RSUD, Bappeda, KPLH, KUMKMPerindag, Setda, Sekretariat DPRD, Kec.Tamansari, Dinas Pendapatan, Inspektorat, Satpol PP, Kantor Arsip
		Cakupan peningkatan kapasitas aparatur melalui Diklat Formal	514 Orang	468 Orang		723 Orang		648 Orang		715 Orang		848 Orang		3.402 orang		
		Tersedianya Aparatur yang berkualitas dan kompeten di bidangnya	80 orang	85 orang		90 orang		95 orang		100 orang		105 orang		80 orang		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel	99 dokumen	99 dokumen	575.392.183,21	99 dokumen	615.689.077,94	99 dokumen	696.280.491,48	99 dokumen	751.874.241,97	99 dokumen	821.578.315,36	495 dokumen	3.460.814.309,96	Semua SKPD
	Program Pelayanan Administrasi Persekolahan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Persekolahan	100%	100%	13.517.202.967,00	100%	12.709.651.216,16	100%	13.345.133.776,95	100%	14.012.390.465,78	100%	14.713.009.988,94	100%	68.297.388.414,83	Dinas Pendidikan
	Program Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya	Terlaksananya pelayanan puskesmas dan jaringannya	100%	100%	4.590.430.000,00	100%	4.590.430.000,00	100%	4.590.430.000,00	100%	4.590.430.000,00	100%	4.590.430.000,00	100%	22.952.150.000,00	Dinas Kesehatan
		Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 1000)	0,15	0,15		0,15		0,16		0,16		0,17		0,17		
	Program Pengembangan Fasilitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	100%	100%	5.957.460.000,00	100%	6.269.757.999,78	100%	6.514.882.799,38	100%	6.808.729.053,62	100%	7.004.045.077,07	100%	32.554.874.929,85	Kecamatan
	Program Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan Kesehatan	Terselenggaranya Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan Kesehatan	100%	100%	75.800.000,00	100%	83.380.000,00	100%	91.718.000,00	100%	100.889.800,00	100%	110.978.780,00	100%	462.766.580,00	Dinas Kesehatan
	Program Perencanaan Kerja	Tersedianya RPJMD		1 dokumen	577.496.380,13		384.720.002,31		410.542.258,04		441.456.111,98		473.119.438,82	1 dokumen	2.287.334.191,29	Semua SKPD
		Tersedianya RKPd	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 Dokumen		
		Tersedianya Renstra		33 Dokumen										33 Dokumen		
		Tersedianya Renja	33 Dokumen	33 Dokumen		33 Dokumen		33 Dokumen		33 Dokumen		33 Dokumen		165 Dokumen		
	Program Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)	100%	100%	776.443.350,97	100%	730.056.669,57	100%	766.559.503,05	100%	804.887.478,20	100%	845.131.852,10	100%	3.923.078.853,89	Dinas Pendidikan

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	PROGRAM MENURUT URUSAN				308.639.822.657,91		333.786.399.386,03		360.460.130.046,41		385.846.761.339,49		414.460.435.957,71		1.803.193.549.387,54	
1	URUSAN WAJIB				289.630.675.425,86		314.565.638.432,88		335.254.308.154,41		349.224.439.279,66		375.122.636.661,77		1.663.797.697.954,57	
1	URUSAN PENDIDIKAN				29.199.112.005,41		30.246.338.448,00		31.758.655.369,90		33.346.588.138,52		35.013.917.545,41		159.564.611.507,25	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	74,01%	76,23%	139.384.968,45	78,45%	131.057.759,37	80,67%	137.610.647,34	82,89%	144.491.179,71	84,01%	151.715.738,69	8401,00%	704.260.293,56	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah TK	67,12%	69,34%		71,56%		73,78%		76,00%		78,22%		78,22%		
	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK	76,43%	78,65%	2.189.855.124,13	80,87%	2.059.027.663,46	82,87%	2.161.979.046,63	84,19%	2.270.077.998,96	86,64%	2.383.581.898,89	86,64%	11.064.521.732,07	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	93,37%	94,49%		95,31%		96,56%		97,78%		99,91%		99,91%		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	74,89%	74,83%		74,77%		74,71%		74,65%		74,59%		74,59%		
		Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	1/395	1/395		1/395		1/395		1/395		1/395		1/395		
		Rasio Guru terhadap Murid	1 : 12	1 : 12		1 : 11		1 : 11		1 : 10		1 : 10		1 : 10		
		Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-rata	1 : 12	1 : 12		1 : 11		1 : 11		1 : 10		1 : 10		1 : 10		
		Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf (tidak Buta Aksara)	99,67%	99,75%		99,83%		99,91%		99,99%		100,00%		100,00%		
		Sekolah Pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik	87,42%	89,48%		91,83%		93,35%		95,57%		97,71%		97,71%		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK	0,25	0,19		0,14		0,10		0,09		0		0		
		Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK	99,97%	99,98%		99,98%		99,99%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMA/MA/SMK ke Perguruan Tinggi	68,00%	71,00%		74,00%		77,00%		80,00%		83,00%		83,00%		
	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lulusan Kesetaraan Kelompok belajar Paket A	100,00%	100,00%	219.546.050,97	100,00%	206.429.816,91	100,00%	216.751.307,76	100,00%	227.588.873,15	100,00%	238.968.316,80	100,00%	1.109.284.365,58	Dinas Pendidikan
		Jumlah Lulusan Kesetaraan Kelompok belajar Paket B	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Jumlah Lulusan Kesetaraan Kelompok belajar Paket C	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Angka Melek Huruf	99,61%	99,65%		99,70%		99,76%		99,82%		99,90%		99,90%		
		Jumlah Lulusan LPK														
	Program Pendidikan Luar Biasa				-		-		-		-		-		-	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	79,00%	84,00%	412.318.193,28	89,00%	387.685.265,91	94,00%	407.069.529,20	98,00%	427.423.005,66	100,00%	448.794.155,94	100,00%	2.083.290.150,00	Dinas Pendidikan
		Guru yang sudah Tersertifikasi	67,00%	72,00%		77,00%		82,00%		87,00%		92,00%		92,00%		

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terwujudnya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Sosialisasi, Pembinaan perpustakaan, fasilitas perpustakaan kelurahan/ OPD, Penyediaan bhn pustaka, Pemasyarakatan minat baca, pengembangan minat baca, Koordinasi pengembangan perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	243.836.627,00									Sosialisasi, Pembinaan perpustakaan, fasilitas perpustakaan kelurahan/ OPD, Penyediaan bhn pustaka, Pemasyarakatan minat baca, pengembangan minat baca, Koordinasi pengembangan perpustakaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	243.836.627,00	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tersusunnya Database Pendidikan	89,00%	89,00%	882.468.029,24	89,00%	829.747.166,52	89,00%	871.234.524,84	89,00%	914.796.251,08	89,00%	960.536.063,63	89,00%	4.458.782.035,32	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Mutu dan Prestasi Belajar	Prestasi yang dicapai tingkat Internasional			642.573.807,70		604.184.829,99		634.394.071,49		666.113.775,06		699.419.463,81		3.246.685.948,05	Dinas Pendidikan
Prestasi yang Dicapai Tingkat Nasional		2	2	3	4	4	5	18								
Prestasi yang dicapai tingkat Provinsi		8	10	12	14	16	18	70								
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	92,00%	93,00%	23.826.555.396,93	94,00%	25.424.021.115,85	95,00%	26.695.222.171,16	96,00%	28.029.983.279,84	97,00%	29.431.482.443,85	97,00%	133.407.264.407,62	Dinas Pendidikan
Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		89,00%	90,00%		91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	94,00%							
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI		99,94%	99,95%		99,96%	99,97%	99,98%	99,99%	99,99%							
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs		98,99%	99,11%		99,12%	99,13%	99,14%	99,15%	99,15%							
Angka Partisipasi Kasar SD/MI		112,77%	113,23%		113,24%	113,25%	113,26%	113,27%	113,27%							
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs		101,89%	102,45%		102,46%	102,47%	102,48%	102,49%	102,49%							
Angka Partisipasi Murni SD/MI		99,34%	99,28%		99,22%	99,16%	99,10%	99,04%	99,04%							
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs		93,51%	93,45%		93,39%	93,33%	93,27%	93,21%	93,21%							
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
Angka Kelulusan (AL) SD/MI		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		99,74%	99,75%		99,76%	99,77%	99,78%	99,79%	99,79%							
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK		99,59%	99,60%		99,61%	99,62%	99,63%	99,64%	99,64%							
	Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Bidang Pendidikan	Jumlah Gedung Terbangun	2	3	642.573.807,70	4	604.184.829,99	5	634.394.071,49	6	666.113.775,06	7	699.419.463,81	25	3.246.685.948,05	Dinas Pendidikan
Jumlah Gedung Terehabilitasi		50	55	60	65	70	75	325								
2	URUSAN KESEHATAN				88.876.058.274,00		89.525.463.174,00		93.735.346.805,96		98.419.766.293,40		103.022.727.997,90		473.579.362.545,26	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat	50%	60%	2.500.000.000,00	90%	2.500.000.000,00	100%	3.039.000.000,00	100%	3.190.950.000,00	100%	3.573.864.000,00	100%	14.803.814.000,00	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Kebutuhan Obat Pelayanan Dasar	100%	100%		100%	100%	100%	100%							

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana			
				2013		2014		2015		2016		2017		Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan BUMIL K-4	88,06	90,00	2.000.000.000,00	93,00	2.000.000.000,00	95,00	1.900.000.000,00	95,00	1.995.000.000,00	96,00	1.995.000.000,00	96,00	9.890.000.000,00	Dinas Kesehatan			
		Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	94,71	76,00		78,00		80,00		82,00		85,00		85,00					
		Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi	91,00	86,00		88,00		90,00		90,00		91,00		91,00					
		Cakupan Pelayanan Nifas	92,00	86,00		88,00		90,00		90,00		91,00		91,00					
		Cakupan Peserta KB Aktif	74,99	82,50		82,50		82,50		83,00		83,00		83,00					
		Cakupan Desa/Kelurahan UCI	90,00	87,00		90,00		92,00		95,00		97,00		97,00					
		Cakupan Penjangkaran Kesehatan siswa SD	98,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
		Angka Kelangsungan Hidup Bayi	989,63	989,72		989,81		989,90		989,99		990,08		990,08					
		Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	44,43	45,00		48,00		50,00		52,00		54,00		54,00					
		Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	62,40	63,00		65,00		70,00		72,00		75,00		75,00					
		Cakupan Penderita DBD yang ditangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
		Cakupan Penemuan Penderita Diare	59,10	60,00		62,00		65,00		67,00		69,00		69,00					
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	% Rumah Tangga yang ber PHBS	65,00	70,00	89.425.000,00	75,00	95.000.000,00	80,00	120.000.000,00	82,00	120.000.000,00	83,00	125.000.000,00		83,00	549.425.000,00	Dinas Kesehatan, Kecamatan Indihiang
				Terwujudnya pelayanan dan pembinaan kesehatan		100%		100%		100%		100%		100%			100%		
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	30,86	100,00	450.000.000,00	100,00	450.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	557.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	2.557.000.000,00	Dinas Kesehatan			
		Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
		Persentase balita ditimbang berat badannya	0,19	0,18		0,17		0,16		0,15		0,14		0,14					
		Persentase balita gizi buruk	0,19	0,41		0,36		0,31		0,26		0,21		0,21					
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Rumah tangga pengguna air bersih	65,00	66,00	808.800.000,00	68,00	772.010.000,00	70,00	815.894.999,96	72,00	882.502.926,42	74,00	908.665.740,90	74,00	4.187.873.667,28	Dinas Kesehatan, Kecamatan			
		Cakupan rumah tangga pengguna jamban sehat	62,00	63,00		65,00		67,00		69,00		71,00		71,00					
		Frekuensi pengembangan lingkungan sehat	1 kali	344 kali		344 kali		344 kali		344 kali		344 kali		1.720 kali					

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana		
				2013		2014		2015		2016		2017						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100,00		737.826.067,00	100,00	737.826.067,00	100,00	738.000.000,00	100,00	760.140.000,00	100,00	836.154.000,00	100,00	3.809.946.134,00	Dinas Kesehatan		
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TBC	85,01	85,00		85,00		87,00		89,00		90,00		90,00				
		AFP rate > 2/100.000 pdik<15 tahun	7,40	7,60		7,80		8,00		8,20		8,40		8,40				
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%	208.372.731,00	100%	5.702.593.736,00	100%	5.972.370.266,00	100%	6.287.109.594,00	100%	6.584.538.240,00	100%	24.754.984.567,00	RSUD		
		% kepuasan pelanggan	89%	90%		90%		90%		90%		90%		90%				
		Terbentuk dan berfungsi gugus penjamin mutu RS	1 Tim	1 Komite		1 Lap periodik komite mutu		1 Lap periodik komite mutu		1 Lap periodik komite mutu		1 Lap periodik komite mutu		1 Komite Mutu RS dan 4 dok laporan periodik komite mutu				
		Kejadian Infeksi Nosokomial	7,49%	maks 1.5 %		maks 1.5 %		maks 1.5 %		maks 1.5 %		maks 1.5 %		maks 1.5 %				
		Terakreditasinya RS	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
		BOR	99,30%	70 - 85%		70 - 85%		70-85%		70 - 85%		70 - 85%		70 - 85%				
		ALOS	4,3 hari	7-10 hari		7-10 hari		7-10 hari		7-10 hari		7-10 hari		7-10 hari				
		BTO	63,89 kali	40-50 kali		40-50 kali		40-50 kali		40-50 kali		40-50 kali		40-50 kali				
		TOI	0,08 hari	1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari				
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00	100,00		10.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	% resep yang terlayani	0,00%	100,00%	44.383.391.735,00	100,00%	44.788.070.270,00	100,00%	46.906.890.517,00	100,00%	49.378.847.472,00	100,00%	51.714.846.795,00		100,00%	237.172.046.789,00
Penulisan resep sesuai formularium	0,00%			100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
% tingkat pemenuhan alat-alat kesehatan sesuai standar	70,00%			80,00%		80,00%		85,00%		85,00%		90,00%		90,00%				
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	89,00%	maks 80 %	1.416.934.572,00	maks 80 %	1.429.853.887,00	maks 80 %	1.497.496.974,00	maks 80 %	1.576.413.910,00	maks 80 %	1.650.990.414,00	maksimal 80 %	7.571.689.757,00	RSUD		
		Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
		Peralatan Lab dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Misikin	100	100	4.709.204.813,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	165.000.000,00	100	181.500.000,00	100	5.305.704.813,00	Dinas Kesehatan, RSUD		
		Jumlah Kemitraan	6	2		2		1		1		1		7				
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80,00	80,00	187.000.000,00	80,00	187.000.000,00	80,00	189.000.000,00	82,00	198.450.000,00	85,00	218.295.000,00	85,00	979.745.000,00	Dinas Kesehatan		
		Cakupan kunjungan bayi	94,78	95,00		95,50		96,00		96,50		97,00		97,00				
		Cakupan Pelayanan Anak Balita	88,00	90,00		90,00		90,00		92,00		93,00		93,00				
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Usila	12,52	17,00	103.210.000,00	20,00	103.210.000,00	25,00	113.531.000,00	30,00	119.207.550,00	35,00	119.207.550,00	35,00	558.366.100,00	Dinas Kesehatan		
	Program Peningkatan Kesejahteraan SDM Rumah Sakit	Pemberian Jasa Pelayanan	12 bulan	12 bulan	22.429.240.781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	22.429.240.781,00	RSUD		

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peran Serta Peningkatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	% RW Siaga Aktif	40,00	50,00	66.669.818,00	55,00	50.000.000,00	60,00	75.000.000,00	70,00	75.000.000,00	80,00	75.000.000,00	80,00	341.669.818,00	Dinas Kesehatan, RSUD
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Bangunan Puskesmas Kondisi baik	62,50	75,00	5.202.350.000,00	87,50	5.202.350.000,00	92,50	5.203.256.699,00	100,00	5.307.321.832,98	100,00	5.411.982.008,00	100,00	26.327.260.539,98	Dinas Kesehatan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan	70,00	75,00		80,00		90,00		100,00		100,00		100,00		
	Program Standarisasi Administrasi Kesehatan	Pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	1 dokumen	1 dokumen	66.679.274,00	1 dokumen	67.287.242,00	1 dokumen	70.470.446,00	1 dokumen	74.184.184,00	1 dokumen	77.693.667,00	5 dokumen	356.314.813,00	RSUD
	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya instalasi PKRS dan Kehumasan	1 Tim PKRS	1 Instalasi PKRS & Kehumasan	666.792.740,00	-	22.482.349.640,00	-	23.545.937.719,00	-	24.786.790.478,00	-	25.959.396.335,00	1 Instalasi PKRS & Kehumasan	97.441.266.912,00	RSUD
		Tersedianya Informasi layanan Rumah Sakit melalui website	tersedia belum memuat informasi layanan	100,00%									100,00%			
		Respon penanganan komplain	< 24 jam	<1 x 24 jam		<1x24 jam		<1x24 jam		<1x24 jam		<1x24 jam		<1x24 jam		
	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit	Billing system berfungsi	50%	100%	850.160.743,00	100%	857.912.332,00	100%	898.498.185,00	100%	945.848.346,00	100%	990.594.248,00	100%	4.543.013.854,00	RSUD
		% Penggunaan pendapatan untuk belanja	0%	<80%		<80%		<80%		<80%		<80%		<80%		
		% piutang perorangan yang diproses dengan tepat waktu (sesuai Agreement)	0%	70%		70%		70%		80%		90%		90%		
3	PEKERJAAN UMUM				65.256.137.204,93		58.746.133.777,70		68.083.746.306,88		85.937.005.292,08		96.080.717.141,90		374.103.739.723,49	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersediannya jalan yang menghubungkan PPK , SPK dan PL di wilayah Pemerintah Kota Tasikmalaya dan antar Pemerintah Daerah (Kab Ciamis dan Kab Tasikmalaya)			-		500.000.000,00	5 Unit Jembatan Mangin	10.500.000.000,00	3 Unit Jembatan Mangin	5.500.000.000,00	1 Unit Jembatan Ciloseh	5.500.000.000,00	8 unit jembatan Mangin dan 1 unit jembatan Ciloseh	22.000.000.000,00	Dinas Bina Marga
		Tersusunnya rencana teknis Jalan dan jembatan yang komprehensif				1 paket dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan, DED untuk 2 kecamatan		1 paket dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan, DED untuk 2 kecamatan		1 paket dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan, DED untuk 2 kecamatan		1 paket dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan, DED untuk 2 kecamatan		4 paket dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan, DED untuk 8 kecamatan		
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Prosentase drainase/ gorong-gorong terbangun	35,00	37,00	4.645.287.594,36	40,00	4.750.000.000,00	42,00	5.250.000.000,00	45,00	5.750.000.000,00	48,00	5.492.852.914,94	48,00	25.888.140.509,30	Dinas Cipta Karya, Dinas Bina Marga
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharannya kondisi jalan dan jembatan		60 km	11.009.497.219,33	60 km	29.593.756.314,08	60 km	31.067.460.168,48	60 km	53.710.109.956,74	60 km	56.733.115.454,46	300 km	182.113.939.113,09	Dinas Bina Marga
		Tersediannya Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Menjamin Kendaraan dapat bergerak dengan nyaman				23,732 km		25,085 km		45,877 km		48,653 km		143,35 km		
	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	Tesediannya data Aktual	-	1 dokumen	197.434.511,32		-		-		-		-	1 dokumen	197.434.511,32	Dinas Bina Marga
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersediannya Sarana Prasarana Kebinamargaan			-	2 unit	2.500.000.000,00		-		-		-	2 unit	2.500.000.000,00	Dinas Bina Marga
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada		65,00%	9.910.656.899,26	70,00%	7.556.551.342,88	72,00%	7.578.403.521,71	73,5 %	4.301.969.362,31	75,00%	4.394.984.916,08	75,00%	33.742.566.042,24	Dinas Bina Marga

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air baku	Cakupan pelayanan air baku			-		-		-		-		-		-	
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya sarana pelestarian air tanah		5 titik	50.000.000,00	5 titik	52.500.000,00	5 titik	57.750.000,00	5 titik	63.525.000,00	5 titik	66.701.250,00	5 titik	290.476.250,00	KPLH
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih	35,00	40,00	5.763.848.000,00	45,00	6.007.728.000,00	50,00	6.252.108.000,00	55,00	6.465.939.000,00	58,00	19.507.705.972,40	58,00	43.997.328.972,40	Dinas Cipta Karya, KPLH
		Persentase layanan air limbah	23,50	23,50		25,00		32,00		35,00		36,80		36,80		
		Tersedianya fasilitas pengelolaan air limbah				1 paket							1 paket			
	Program Pengendalian Banjir	Tertanganinnya Daerah Rawan Banjir di Daerah Aliran Sungai Cikalang, Sungai Cihideug Sungai Cinutut		Sungai Cihideung - Sungai Ciromban	1.224.912.650,47	Sungai Cihideung - Sungai Ciromban	3.086.478.717,52	Sungai Cikalang	2.827.762.508,10	Sungai Cikalang	5.813.472.111,23	Sungai Cikalang	610.414.571,68	Sungai Cihideung - Sungai Ciromban, Sungai Cikalang	13.563.040.558,99	Dinas Bina Marga
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase jalan lingkungan/jalan setapak/drainase	38,00	50,00	354.629.938,42	55,00	356.313.718,26	60,00	372.701.429,35	70,00	377.842.138,72	74,00	336.657.010,12	74,00	1.798.144.234,87	Dinas Cipta Karya
	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Tersediannya Jaringan Jalan dan Jembatan Yang Menjamin Kendaraan dapat bergerak dengan nyaman	232,098 km	19,162 km	27.465.772.985,22	-	-	-	-	-	-	-	-	19,162 km	27.465.772.985,22	Dinas Bina Marga
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Persentase terpeliharanya saluran drainase	35,00	40,00	1.834.097.406,55	45,00	1.842.805.684,96	50,00	1.927.560.679,24	65,00	1.954.147.723,09	68,00	1.741.143.886,25	68,00	9.299.755.380,09	Dinas Cipta Karya
	Program Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar	Persentase terbangunnya dan terpeliharanya trotoar	3,96	24,00	2.800.000.000,00	22,00	2.500.000.000,00	19,00	2.250.000.000,00	17,00	2.000.000.000,00	17,00	1.697.141.165,98	17,00	11.247.141.165,98	Dinas Cipta Karya
4	PERUMAHAN				21.226.488.610,76		22.051.669.013,16		21.988.106.048,31		22.596.240.224,74		19.872.571.763,14		107.735.075.660,11	
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	20,00	20,00	101.322.839,55	25,00	101.803.919,50	35,00	106.486.122,67	40,00	107.954.896,78	60,00	96.187.717,18	60,00	513.755.495,68	Dinas Cipta Karya
	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase area pemakaman yang refresentatif	20,00	45,00	475.000.000,00	70,00	475.000.000,00	77,00	225.000.000,00	100,00	475.000.000,00	0,00	75.000.000,00	100,00	1.725.000.000,00	Dinas Cipta Karya, Dinsosnakertrans
		Terpeliharanya areal TMP	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pertamanan dan Pemakaman	Pemeliharaan Pertamanan dan Pemakaman	50,00	58,00	535.000.000,00	76,00	1.250.000.000,00	83,00	500.000.000,00	92,00	550.000.000,00	100,00	509.142.349,79	100,00	3.344.142.349,79	Dinas Cipta Karya
	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman	Rasio permukiman layak huni	35,10	35,10	20.115.165.771,21	50,00	20.224.865.093,66	60,00	21.156.619.925,64	65,00	21.463.285.327,97	70,00	19.192.241.696,17	70,00	102.152.177.814,64	Dinas Cipta Karya, Bappeda
		Tersedianya dokumen perencanaan sarana dan prasarana kesehatan lingkungan perumahan serta permukiman	3 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		10 Dokumen		
5	PENATAAN RUANG				2.111.959.381,40		1.626.410.319,32		803.980.835,29		707.929.877,05		723.183.429,21		5.973.463.842,27	
	Program Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota)	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penataan Ruang Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.061.959.381,40	3 Dokumen	1.551.410.319,32	3 Dokumen	728.980.835,29	3 Dokumen	607.929.877,05	3 Dokumen	638.326.370,91	15 Dokumen	5.588.606.783,97	Dinas Cipta Karya, Bappeda
	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Dokumen pengendalian pemanfaatan Ruang	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	75.000.000,00	1 dokumen	75.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	84.857.058,30	5 dokumen	384.857.058,30	Dinas Cipta Karya
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN				5.133.817.703,50		4.019.575.780,35		3.963.954.636,53		4.510.634.289,50		4.714.071.710,37		22.342.054.120,25	

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Program Pengembangan Data / Informasi	Tersedianya peta pembiayaan kesehatan	100,00%	100,00%	1.623.403.003,67									100,00%	1.623.403.003,67	Dinas Kesehatan, Bappeda, Disbudparpora, Kecamatan Tamansari
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daaerah	5 Dokumen	4 Dokumen									3 Dokumen			
		Tersedianya dan tersusunnya data dan Informasi		1 Dokumen									1 Dokumen			
		Kecamatan dalam Angka	1 dokumen	1 dokumen								1 dokumen				
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	132 Orang	150 Orang	25.000.000,00	150 Orang	28.295.147,80	150 Orang	29.709.905,19	150 Orang	31.195.400,45	150 Orang	32.755.170,47	150 Orang	146.955.623,91	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	1 Dokumen		3.083.827.352,43		3.307.366.206,45		3.216.134.583,94		3.725.423.234,28		3.889.600.102,39		17.222.351.479,50	Bappeda, Kecamatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas cipta Karya, Satpol PP, Kantor Arsip, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, KUMKM Perindag, Kantor Kesbang, KPLH, Disdukcapil, KBPP, Dinsosnakertrans, Disbudparpora
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen			
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Walikota	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen			
		Tersedianya dokumen hasil Musrenbang		26 Dokumen		26 Dokumen		26 Dokumen		26 Dokumen		26 Dokumen	130 Dokumen			
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi			-	1 Dokumen	297.444.114,68	1 Dokumen	312.316.320,41	1 Dokumen	327.932.136,43	1 Dokumen	344.328.743,25	4 Dokumen	1.282.021.314,78	Bappeda
	Program Perencanaan Sosial Budaya	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	401.587.347,41	1 Dokumen	386.470.311,42	1 Dokumen	405.793.826,99	1 Dokumen	426.083.518,34	1 Dokumen	447.387.694,25	5 Dokumen	2.067.322.698,40	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana				-		-		-		-		-		-	
7	PERHUBUNGAN				5.422.553.000,00		5.582.738.674,05		5.760.014.535,00		6.919.242.347,00		7.112.325.992,00		30.796.874.548,05	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	60%	65%	500.000.000,00	70%	200.000.000,00	72%	265.765.910,00	75%	290.952.270,00	77%	300.000.000,00	77%	1.556.718.180,00	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	PJU Kondisi baik	50%	55%	855.000.000,00	60%	855.916.000,00	64%	880.935.365,00	66%	1.051.559.668,00	70%	1.079.143.439,00	70%	4.722.554.472,00	Dinas Perhubungan
		Rambu lalu Lintas	70%	75%		77%		78%		80%		80%		80%		
		Kondisi baik				95%		95%		98%		98%		98%		
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	5.909.715	6.027.909	896.031.000,00	6.148.467	1.125.252.000,00	6.271.437	1.153.799.665,00	6.396.866	1.348.490.599,00	6.524.803	1.379.964.165,00	6.524.803	5.903.537.429,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah orang melalui terminal	325.356	331.863		338.500		345.270		352.176		359.219		359.219		
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	647.501	660.451		673.660		687.133		700.876		714.893		714.893		
		Rasio Ijin Trayek	0,00215	0,00216		0,00216		0,00217		0,00217		0,00217		0,00217		
		Jumlah Terminal Bis	5	5		5		6		6		6		6		
		Angkutan Darat	0,428%	0,428%		0,429%		0,430%		0,431%		0,432%		0,432%		
		Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perhubungan	60%	65%	200.000.000,00	70%	147.408.000,00	72%	100.000.000,00	75%	200.000.000,00	77%	211.192.084,00	77%	858.600.084,00	
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Pemasangan PJU	178	530	2.326.130.000,00	300	2.272.970.674,05	400	2.324.047.380,00	400	2.622.668.063,00	500	2.676.616.549,00	2.130	12.222.432.666,05	Dinas Perhubungan, Setda
		Jumlah Keseluruhan PJU Terpasang	3.343	3.873		4.173		4.573		4.973		5.473		5.473		

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas	246	61		50		50		50		50		261		
		Jumlah Keseluruhan Rambu Lalu Lintas Terpasang	1.424	1.485		1.535		1.585		1.635		1.685		1.685		
		Jumlah Pemasangan APILL	-	4		4		5		6		6		25		
		Jumlah Keseluruhan APILL Terpasang	50	54		58		63		69		75		75		
		Koordinasi dan fasilitasi Keamanan dan Kenyamanan lalu lintas		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		5 Tahun		
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	13.834	14.111	421.253.000,00	14.393	482.920.000,00	14.681	503.053.120,00	14.974	640.348.210,00	15.274	662.545.111,00	15.274	2.710.119.441,00	Dinas Perhubungan
Kepemilikan KIR angkutan umum		16,71%	15,88%	15,08%		14,33%		13,61%		12,93%						
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)		40	40	40		40		40								
Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum		85.000	85.000	85.000		85.000		85.000								
	Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas	Jumlah SDM Pengamanan	45	45	154.200.000,00	45	296.221.000,00	45	313.908.360,00	45	434.520.880,00	45	454.021.443,00	45	1.652.871.683,00	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Optimalisasi Perhubungan	Penghargaan Bidang Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Kota (WTN)	1	1	69.939.000,00	1	202.051.000,00	1	218.504.735,00	1	330.702.657,00	1	348.843.201,00	5	1.170.040.593,00	Dinas Perhubungan
8	LINGKUNGAN HIDUP				4.841.230.346,00		4.383.730.516,00		6.605.904.018,59		7.325.951.795,92		12.898.905.228,35		36.055.721.904,86	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Persatuan Penduduk	34,42	32,25	2.186.000.000,00	35,08	2.195.684.185,00	38,98	2.398.026.102,00	43,69	2.607.028.713,00	44,67	2.223.992.252,11	44,67	11.610.731.252,11	KPLH, Dinas Cipta Karya
Persentase Penanganan Sampah		38,00	39,80	43,29		47,50		52,03		56,56						
Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan			1 paket	1 paket		1 paket		1 paket								
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL		40 objek, 2 unit IPAL, 10% proses akreditasi lab., 30 objek SBL	984.815.000,00	40 objek, 2 unit IPAL, 10% proses akreditasi lab., 30 objek SBL	984.815.000,00	40 objek, 2 unit IPAL, 10% proses akreditasi lab., 30 objek SBL	1.031.789.450,00	40 objek, 2 unit IPAL, 10% proses akreditasi lab., 30 objek SBL	1.041.812.923,00	40 objek, 2 unit IPAL, 10% proses akreditasi lab., 30 objek SBL	1.052.231.053,00	40 objek, 2 unit IPAL, 50% proses akreditasi lab., 30 objek SBL	5.095.463.426,00	KPLH
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah sempadan sungai/ situ dan sumber mata air		1 paket	190.000.000,00	1 paket	202.000.000,00	1 paket	1.119.734.002,59	1 paket	1.740.120.248,92	1 paket	7.438.078.295,79	5 paket	10.689.932.547,31	KPLH, Dinas Bina Marga
Pengawasan terhadap rehabilitasi akibat kegiatan yang merusak lingkungan SDA			1 paket	1 paket		1 paket		5 paket								
Tersedianya jaringan air dari kawah gunung galunggung sepanjang 17 KM				1,6 km		2,7 km		12,7 km		17 km						
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tersedianya informasi status lingkungan hidup, kajian lingkungan dan KLHS		1 Dokumen	181.700.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	-	-	1 Dokumen	150.000.000,00	4 Dokumen	581.700.000,00	KPLH
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Cakupan pemantauan kualitas udara ambien dan emisi gas buang kendaraan dan industri		5 titik	19.715.346,00	5 titik	21.686.881,00	5 titik	23.855.569,00	5 titik	26.241.126,00	5 titik	27.553.182,00	5 titik	119.052.104,00	KPLH

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	50,00	58,00	1.279.000.000,00	63,00	879.544.450,00	74,00	1.882.498.895,00	86,00	1.910.748.785,00	100,00	2.007.050.445,45	100,00	7.958.842.575,45	Dinas Cipta Karya, KPLH
		Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH)		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket		
9	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				2.918.937.946,00		2.991.326.718,00		3.179.968.863,00		3.371.020.213,00		3.587.216.800,00		16.048.470.540,00	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya tertib administrasi kependudukan	83,72%	85,67%	2.918.937.946,00	87,67%	2.991.326.718,00	89,67%	3.179.968.863,00	91,67%	3.371.020.213,00	93,67%	3.587.216.800,00	93,67%	16.048.470.540,00	Disdukcapil
		Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	85,00%	86,00%		88,00%		90,00%		92,00%		95,00%		95,00%		
		Rasio bayi berakte kelahiran	58,44%	61,44%		64,44%		66,44%		68,44%		70,44%		70,44%		
		Kepemilikan KTP	410.660 orang	421.724 orang		438.005 orang		454.679 orang		471.754 orang		494.445 orang		494.445 orang		
10	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.226.881.000,00		845.000.000,00		906.336.423,00		976.112.134,00		1.010.000.000,00		4.964.329.557,00	
	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Peningkatan SDM dan Stakeholder dalam peningkatan kualitas anak dan perempuan	0%	100 orang	150.000.000,00	100 orang	150.000.000,00	100 orang	150.000.000,00	120 orang	160.000.000,00	125 orang	170.000.000,00	545 orang	780.000.000,00	KBPP
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Tercapainya pelaksanaan sosialisasi Pengarusutamaan Gender Tingkat Kota	100%	100%	250.000.000,00	100%	250.000.000,00	100%	260.000.000,00	100%	270.000.000,00	100%	280.000.000,00	100%	1.310.000.000,00	KBPP
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Optimalisasi lembaga P2TP2A 100 %	100%	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	360.000.000,00	100%	396.112.134,00	100%	400.000.000,00	100%	1.856.112.134,00	KBPP
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Terwujudnya Pembinaan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan		629 kali	476.881.000,00	12 kali	95.000.000,00	12 kali	136.336.423,00	12 kali	150.000.000,00	12 kali	160.000.000,00	677 Kali	1.018.217.423,00	KBPP, Setda, Kecamatan
11	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA				1.187.556.933,00		1.683.197.805,19		1.776.788.932,99		1.868.380.125,34		1.978.936.830,69		8.494.860.627,21	
	Program Keluarga Berencana	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	100%	100%	405.945.000,00	100%	450.000.000,00	100%	480.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	520.000.000,00	100%	2.355.945.000,00	KBPP
	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga			581.611.933,00	558 kali	1.014.206.055,19	558 kali	1.066.788.932,99	558 kali	1.128.380.125,34	558 kali	1.185.019.090,69	2.232 kali	4.976.006.137,21	Kecamatan, KBPP, Setda
		Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB 70%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Terlaksananya kegiatan pelatihan dan workshop bagi kader.	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Kesehatan Reproduksi	PUS Istri dibawah usia 20 tahun 3,5 %	100%	100%	200.000.000,00	100%	218.991.750,00	100%	230.000.000,00	100%	240.000.000,00	100%	273.917.740,00	100%	1.162.909.490,00	KBPP
12	SOSIAL				2.766.411.718,57		5.243.986.701,08		4.663.653.919,72		4.838.689.615,71		4.922.147.846,49		22.434.889.801,57	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		19,63	650.000.000,00	35,00	1.400.000.000,00	48,13	1.020.000.000,00	59,13	1.070.000.000,00	66,5	1.070.000.000,00	66,5	5.210.000.000,00	Dinsosnakertrans
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Penanganan Anak Terlantar		-	50 Orang	200.000.000,00	50 Orang	200.000.000,00	50 Orang	200.000.000,00	50 Orang	200.000.000,00	100 Orang	800.000.000,00	Dinsosnakertrans	
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya aksesibilitas para penyandang cacat dan trauma		1,01	100.000.000,00	2,01	100.000.000,00	3,02	100.000.000,00	4,03	100.000.000,00	5,04	100.000.000,00	5,04	500.000.000,00	Dinsosnakertrans

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Cakupan Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo			-	100 Orang	100.000.000,00	100 Orang	100.000.000,00	100 Orang	100.000.000,00	100 Orang	100.000.000,00	400 Orang	400.000.000,00	Dinsosnakertrans
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	Meningkatnya kemandirian dan kesadaran para eks penyandang penyakit sosial		100 Orang	150.000.000,00	150 Orang	500.000.000,00	150 Orang	500.000.000,00	150 Orang	500.000.000,00	150 Orang	500.000.000,00	700 Orang	2.150.000.000,00	Dinsosnakertrans
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Tersedianya Instrumen kebijakan Hibah dan Bantuan Sosial		1 Dokumen	1.702.000.000,00	-	1.926.354.396,58	-	1.722.640.000,00	-	1.794.125.000,00	-	1.873.855.000,00	1 Dokumen	9.018.974.396,58	Dinsosnakertrans, Setda
		Pemahaman masyarakat akan mekanisme fasilitasi kelembagaan kesejahteraan Sosial		1.606 Penerima		1.700 Penerima		1.725 Penerima		1.800 Penerima		1850 Penerima		8.681 penerima		
		Akurasi data lembaga/ organisasi yang memperoleh bantuan pemberdayaan		450 organisasi		475 organisasi		500 organisasi		525 organisasi		550 organisasi		2.500 organisasi		
		Akurasi data lembaga/ organisasi penerima bantuan pemberdayaan bidang keagamaan		1.000 lokasi		1.200 lokasi		1.250 lokasi		1.275 lokasi		1290 lokasi		6.015 Lokasi		
		Apresiasi terhadap masyarakat berprestasi		350 orang		375 orang		390 orang		390 orang		390 orang		1.895 orang		
		Akurasi data RTLH yang akan memperoleh bantuan		276 unit		300 unit		350 unit		375 unit		400 unit		1.701 unit		
		Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan (Bhakti Siliwangi dan Bhakti Gotongroyong)		1 Kecamatan/ 69 Kelurahan		1 Kecamatan/ 69 Kelurahan		1 Kecamatan/ 69 Kelurahan		1 Kecamatan/ 69 Kelurahan		1 Kecamatan/ 69 Kelurahan		5 Kecamatan/ 69 Kelurahan		
		Fasilitasi penunjang kegiatan HUT RI		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		5 kegiatan		
		Meningkatnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial		69 Orang		238 Orang		169 Orang		169 Orang		169 Orang		814 Orang		
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Menurunnya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Wilayah Kota Tasikmalaya		2,01	164.411.718,57	8,84	1.017.632.304,50	11,65	1.021.013.919,72	14,46	1.074.564.615,71	17,27	1.078.292.846,49	17,27	4.355.915.404,99	Dinsosnakertrans, Bappeda
		Fasilitasi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
13	KETENAGAKERJAAN				675.000.000,00		2.235.000.000,00		2.235.000.000,00		2.460.000.000,00		2.460.000.000,00		10.065.000.000,00	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio lulusan S1/S2/S3	0,11	0,19	100.000.000,00	0,27	700.000.000,00	0,35	700.000.000,00	0,43	700.000.000,00	0,51	700.000.000,00	0,51	2.900.000.000,00	Dinsosnakertrans
		Rasio ketergantungan	51,75	51,2		50,65		50,1		49,55		49,00		49,00		
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)	9,13	9,11	375.000.000,00	9,09	975.000.000,00	9,07	975.000.000,00	9,04	1.200.000.000,00	9,01	1.200.000.000,00	9,01	4.725.000.000,00	Dinsosnakertrans
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,15	63,65		65,15		67,15		69,15		71,15		71,15		
		Rasio penduduk yang bekerja	90,87	90,89		90,91		90,93		90,96		90,99		90,99		
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Pembinaan Ketenagakerjaan	-	200 orang	200.000.000,00	600 orang	560.000.000,00	600 orang	560.000.000,00	600 orang	560.000.000,00	600 orang	560.000.000,00	2.600 orang	2.440.000.000,00	Dinsosnakertrans
14	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				360.000.000,00		1.220.000.000,00		2.105.000.000,00		1.105.000.000,00		1.255.000.000,00		6.045.000.000,00	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang aktif pada "Imah Tasik"	10	10	-	15	680.000.000,00	20	1.605.000.000,00	25	705.000.000,00	30	1.005.000.000,00	100	3.995.000.000,00	KUMKM Perindag
		Meningkatnya volume usaha koperasi	-	-		0,06		0,03		0,03		0,03		0,15		
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi		0,1	350.000.000,00	0,09	525.000.000,00	0,09	500.000.000,00	0,04	400.000.000,00	0,04	250.000.000,00	0,36	2.025.000.000,00	KUMKM Perindag

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	Pembinaan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat		1 kali	10.000.000,00	1 kali	15.000.000,00		-		-		-	2 kali	25.000.000,00	Kecamatan Cibeureum
15	PENANAMAN MODAL				1.215.655.344,00		1.086.924.044,30		1.183.300.000,00		1.272.080.000,00		1.368.588.000,00		6.126.547.388,30	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	-	1 Sektor /Bidang Usaha /Tahun	1.215.655.344,00	2 Sektor /Bidang Usaha /Tahun	1.086.924.044,30	2 Sektor /Bidang Usaha /Tahun	1.183.300.000,00	2 Sektor /Bidang Usaha /Tahun	1.272.080.000,00	2 Sektor /Bidang Usaha /Tahun	1.368.588.000,00	9 Sektor	6.126.547.388,30	KUMKM Perindag, Setda
		Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	2 kali/tahun	4 kali/tahun		6 kali/tahun		8 kali/tahun		10 kali/tahun		12 kali/tahun		40 kali		
		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	-	2 kali/tahun		2 kali/tahun		2 kali/tahun		2 kali/tahun		3 Kali/Tahun		11 kali		
		Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	-	2 kali/tahun		2 kali/tahun		2 kali/tahun		2 kali/tahun		3 Kali/Tahun		11 kali		
		Jumlah event pameran yang diikuti	3	5		5		6		6		7		29		
		Jumlah investor berskala nasional PMDN	2	2		2		2		2		2		2		
	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah				-		-		-		-		-		-	
16	KEBUDAYAAN				366.391.000,00		1.140.769.346,31		1.105.152.942,89		1.118.338.387,76		1.494.271.325,62		5.224.923.002,58	
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya Pengembangan Nilai Budaya	1 kali	1 kali	16.391.000,00	1 kali	16.391.000,00	1 kali	17.210.549,99	1 kali	18.338.387,76	1 kali	19.271.325,62	4 kali	87.602.263,37	Kecamatan Cihideung
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cagar Budaya Kondisi Baik	2 Buah	-	-	2 Buah	115.913.769,39	-	-	-	-	-	-	2 Buah	115.913.769,39	Disbudparpora
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Group Kesenian	8 Group	9 Group	350.000.000,00	10 Group	1.008.464.576,92	11 Group	1.087.942.392,90	11 Group	1.100.000.000,00	12 Group	1.475.000.000,00	53 Group	5.021.406.969,82	Disbudparpora
17	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				1.227.203.442,00		1.712.815.234,40		4.125.653.403,00		2.906.154.574,00		3.561.041.868,00		13.532.868.521,40	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terpilainya Putra dan putri terbaik sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota	20 orang	20 orang	490.000.000,00		474.192.692,95		1.225.000.000,00		920.000.000,00		1.270.000.000,00	20 orang	4.379.192.692,95	Disbudparpora, Dinsosnakertrans
		Terselenggaranya Kegiatan Kepemudaan	2 Kali	2 Kali		17 Kali		12 Kali		12 Kali		14 Kali		61 Kali		
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Terlaksananya Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga			-	2 Kali	52.688.076,99	3 Kali	1.100.000.000,00	2 Kali	300.000.000,00		-	7 Kali	1.452.688.076,99	Disbudparpora
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Keikutsertaan dalam Pekan Olahraga Pegawai Pemerintah Daerah Se-Jawa Barat		1 kali	592.203.442,00	1 kali	1.033.139.041,18	1 kali	1.100.653.403,00	1 kali	1.186.154.574,00	1 kali	1.291.041.868,00	5 kali	5.203.192.328,18	Disbudparpora, Sekretariat Dewan Korpri, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu, Kec. Bungursari
		Terselenggaranya Kegiatan Keolahragaan	4 kali	5 kali		11 kali		7 kali		7 kali		7 kali		37 kali		
		Jumlah cabang olahraga														
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga	2 Unit	3 Unit	145.000.000,00	7 Unit	152.795.423,28	4 Unit	700.000.000,00	5 Unit	500.000.000,00	5 Unit	1.000.000.000,00	24 Unit	2.497.795.423,28	Disbudparpora
18	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI				3.969.555.000,00		4.579.823.675,57		4.615.957.000,00		4.585.165.200,00		4.942.279.210,00		22.692.780.085,57	

[illegible]

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Akurasi administrasi verifikasi		1 Tahun Anggaran		1 Tahun Anggaran		1 Tahun Anggaran		1 Tahun Anggaran		1 Tahun Anggaran		5 Tahun Anggaran		
		Optimalisasi penganggaran daerah		1 (Satu) Tahun		1 (Satu) Tahun		1 (Satu) Tahun		1 (Satu) Tahun		1 (Satu) Tahun		5 Tahun		
		Tersedianya sarana Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket		
		Penatausahaan Keuangan Setda yang akurat dan akuntabel		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen		
		Koordinasi Antar Stakeholders Perekonomian dan		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		5 Tahun		
		Dokumen bahan penyusunan neraca pemerintahan daerah		6 dokumen (KIB A,B,C,D,E,F)		6 dokumen (KIB A,B,C,D,E,F)		6 dokumen (KIB A,B,C,D,E,F)		6 dokumen (KIB A,B,C,D,E,F)		6 dokumen (KIB A,B,C,D,E,F)		30 dokumen (KIB A,B,C,D,E,F)		
		Tersedianya dokumen pencatatan aset		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen		
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				-		-		-		-		-		-	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	100%	1.808.349.400,00	100%	1.978.996.455,78	100%	1.993.705.213,23	100%	2.088.288.232,52	100%	2.186.429.261,38	100%	10.055.768.562,91	Inspektorat
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan fungsional	100%	100%	51.329.000,00	100%	56.172.722,53	100%	56.590.222,49	100%	59.274.909,31	100%	62.060.588,27	100%	285.427.442,60	Inspektorat
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersedianya perlengkapan akses informasi		1 paket	898.555.651,08		526.489.786,00		531.493.437,49		591.307.997,50		612.241.456,00	1 paket	3.160.088.328,07	Dinas Kesehatan, Kecamatan, Bappeda, KBPP, Setda, Disbudparpora, BPPT
		Tersedianya akses informasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Data Laporan Pembangunan Daerah yang Up to Date berbasis Teknologi Informasi		33 OPD		33 OPD		33 OPD		33 OPD		33 OPD		33 OPD		
		Meningkatnya data & informasi kesehatan yang lengkap, akurat dan mutakhir	14,28	50		60,00		70,00		85,00		100,00		100,00		
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Daerah yang ditetapkan		8 Dokumen Perda	1.262.800.000,00	10 Dokumen Perda	688.320.734,93	10 Dokumen Perda	1.000.000.000,00	10 Dokumen Perda	1.100.000.000,00	10 Dokumen Perda	1.200.000.000,00	48 Dokumen Perda	5.251.120.734,93	Setda
		Peraturan Walikota yang ditetapkan		15 Dokumen Peraturan Walikota		25 Dokumen Peraturan Walikota		25 Dokumen Peraturan Walikota		25 Dokumen Peraturan Walikota		25 Dokumen Peraturan Walikota		115 Dokumen Peraturan Walikota		
		Data Perundang-undangan Tingkat Pusat		-		1(satu) paket Data Perundang-undangan Pusat dan 100 (seratus) aparatur Organisasi Perangkat Daerah		1(satu) paket Data Perundang-undangan Pusat dan 100 (seratus) aparatur Organisasi Perangkat Daerah		1(satu) paket Data Perundang-undangan Pusat dan 100 (seratus) aparatur Organisasi Perangkat Daerah		1(satu) paket Data Perundang-undangan Pusat dan 100 (seratus) aparatur Organisasi Perangkat Daerah		4(empat) paket Data Perundang-undangan Pusat dan 100 (seratus) aparatur Organisasi Perangkat Daerah		
		Cakupan Peraturan yang disosialisasikan, Cakupan Peserta Sosialisasi		2 buah Perda, 2 buah Undang undang										2 buah Perda, 2 buah Undang undang		

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana			
				2013		2014		2015		2016		2017							
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		Cakupan Peserta Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pertanahan		100 Orang										100 Orang					
		Cakupan penyediaan dan distribusi sarana informasi peraturan perundang-undangan		300 CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tk Pusat , 300 CD Himpunan Produk Hukum Daerah dan Peraturan walikota, 300 buah Buku Produk Hukum Daerah 45 buah Penjilidan Peraturan Perundang-undangan, 1 CD Peraturan Perundang-undangan Tk Pusat 1945-2013									300 CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tk Pusat , 300 CD Himpunan Produk Hukum Daerah dan Peraturan walikota, 300 buah Buku Produk Hukum Daerah 45 buah Penjilidan Peraturan Perundang-undangan, 1 buah CD Peraturan Perundang-undangan Tk Pusat 1945-2013						
		Cakupan penyelesaian permasalahan hukum litigasi dan non litigasi serta penyelesaian perkara/sengketa.		4 permasalahan hukum									4 permasalahan hukum						
		Cakupan peningkatan kesadaran dan perilaku taat hukum		10 Kelompok pada 10 kelurahan								10 Kelompok pada 10 kelurahan							
	Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)			1.865.145.000,00		1.942.278.737,42		2.550.774.289,98		2.688.964.722,54		2.972.824.043,78		12.019.986.793,72	Setda, Inspektorat, Satpol PP, Kecamatan			
		LAKIP Kota Tasikmalaya	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen				1 Dokumen					1 Dokumen		5 Dokumen
		LAKIP OPD	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen				1 Dokumen					1 Dokumen		5 Dokumen
		Penetapan Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen				1 Dokumen					1 Dokumen		5 Dokumen
		Road Map Reformasi Birokrasi	-	-				1 Dokumen		-		-					-	-	-
		Terwujudnya Pengadaan barang dan jasa yang tertib dan akuntabel	100%	100%				100%		100%		100%					100%	100%	100%
		Terciptanya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%				100%		100%		100%					100%	100%	100%
		Cakupan peserta yang memahami Peraturan Pengadaan Barang/Jasa	150 Orang	150 Orang				150 Orang		150 Orang		150 Orang					150 Orang	150 Orang	750 Orang
		Kesesuaian RKA OPD dengan KUA-PPAS dan ketentuan yang berlaku	1 tahun/33 OPD	1 tahun/33 OPD				1 tahun/33 OPD		1 tahun/33 OPD		1 tahun/33 OPD					1 tahun/33 OPD	1 tahun/33 OPD	5 tahun/33 OPD
		Cakupan pengendalian Pembangunan Bantuan Provinsi	15 OPD	15 OPD				15 OPD		15 OPD		15 OPD					15 OPD	15 OPD	15 OPD
		Dokumen laporan pengendalian pembangunan bantuan provinsi di Kota Tasikmalaya	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	-	-				1 tahun		1 tahun		1 tahun					1 tahun	1 tahun	1 tahun
		Buku Pengantar RT	-	69 Kelurahan				69 Kelurahan		69 Kelurahan		69 Kelurahan					69 Kelurahan	69 Kelurahan	69 Kelurahan

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Buku administrasi Kelurahan	-	69 Kelurahan		69 Kelurahan		69 Kelurahan		69 Kelurahan		69 Kelurahan		69 Kelurahan		
		Cakupan evaluasi Kinerja Kelurahan	-	69 Kelurahan		69 Kelurahan		69 Kelurahan		69 Kelurahan						
		Cakupan evaluasi Kinerja Kecamatan	-	-		10 Kecamatan		10 Kecamatan		10 Kecamatan		10 Kecamatan				
		Cakupan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	-	10 Kecamatan/ 69 Kelurahan		10 Kecamatan/ 69 Kelurahan		10 Kecamatan/ 69 Kelurahan		10 Kecamatan/ 69 Kelurahan						
		Cakupan penataan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	-	69 Kelurahan		69 Kelurahan		69 Kelurahan		69 Kelurahan						
		Data profil Kelurahan	-	69 Kelurahan		69 Kelurahan		69 Kelurahan		69 Kelurahan						
		Dokumen LPPD dan IKK	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen						
		Dokumen Memori	-	-		-		-		1 Dokumen		1 Dokumen				
		Terwujudnya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan	313 lembaga	315 lembaga		315 lembaga		315 lembaga		315 lembaga		1.575 kali				
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
	Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan	Cakupan peresmian hasil-hasil pembangunan	1 tahun/10 Kecamatan	1 tahun/10 Kecamatan	9.254.772.874,14	1 tahun/10 Kecamatan	9.313.440.417,89	1 tahun/10 Kecamatan	9.772.618.937,94	1 tahun/10 Kecamatan	9.937.072.130,16	1 tahun/10 Kecamatan	8.935.917.512,67	5 tahun/10 Kecamatan	47.213.821.872,79	Setda, Dinas Cipta Karya, Kec. Purbaratu
		Terwujudnya Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan	6 kelurahan	6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan		6 kelurahan						
		Rasio Gedung Pemerintahan														
	Program Fasilitas Pengadaan Tanah Pemerintah	Tersedianya daerah resapan air		45,872 M2	1.980.193.893,48	46,235 M2	23.425.686.137,75	47,452 M2	18.021.970.444,63	50,875 M2	2.165.908.966,86	55,954 M2	2.250.046.363,19	55,954 M2	47.843.805.805,91	KPLH, Dinas Bina Marga, Dinas Pendidikan
		Tersedianya lahan guna keperluan sarana pendidikan		2.565 m2		3.365 m2		4.165 m2		4.965 m2		5.765 m2		20.825 m2		
		Tersediannya Lahan untuk Jalan lingkar Utara	0,00%	0,00%		1,5 Ha		1,5 Ha		0,00%		0,00%		3 Ha		
		Pembebasan Kekurangan Lahan Jalan Mangkubumi - Indihiang	13,1 Ha	0,00%		0,6 Ha								0,6 Ha		
		Pembebasan Lahan untuk Work Shop dan Laboratorium	0,00%	0,00%		1 Ha								1 Ha		
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan	Dokumen evaluasi Kelembagaan	1 Dokumen	-	865.000.000,00	-	920.506.312,97	1 Dokumen	1.130.250.000,00	-	1.225.800.000,00	1 Dokumen	2.256.550.000,00	2 Dokumen	6.398.106.312,97	Setda, Kantor Kesbangpol
		Terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah	-	1 dokumen Perda		1 Dokumen Perda		-		1 Dokumen Perda		2 Dokumen Perda				
		Standar Operasional Prosedur	14 Unit Kerja	19 Unit Kerja		69 Unit Kerja		21 Unit Kerja		32 Unit Kerja		22 Unit Kerja		177 Unit Kerja		
		Dokumen Tugas pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unit	-	-		35 Dokumen		-		-		15 Dokumen		50 Dokumen		
		Dokumen Evaluasi Tugas Pokok, Fungsi dan UTU	-	-		1 Dokumen		-		-		1 Dokumen		2 Dokumen		
		Pemahaman atas penerapan Tata Naskah Dinas	-	-		43 Unit Kerja		-		-		-		43 Unit Kerja		
		koordinasi unsur pemerintahan daerah (Forkomda)	4 Kegiatan	12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		12 Kegiatan		60 Kegiatan				
		Koordinasi antar pemerintah Kota (APEKSI)	4 Kegiatan	4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		20 Kegiatan				
		Fasilitasi Pemilu	-	-		-		-		-		1 Kegiatan		1 Kegiatan		

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Terwadahnya pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan Narkotika	-	1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		1 Unit		
		Terlaksananya Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Terwujudnya pelayanan perijinan		100%	177.300.000,00		-		-		-		-	100%	177.300.000,00	BPPT, Kec. Indihiang, Kec. Bungursari
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat			240.000.000,00		672.539.235,44		792.679.999,99		925.640.167,12		805.941.720,92		3.436.801.123,46	BPPT, Kecamatan
	Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	Cakupan pemenuhan kebutuhan dasar / beras bagi Keluarga Miskin	37.252 RTS	54.051 RTS	841.667.400,00	54.051 RTS	880.732.113,89	54.051 RTS	1.018.417.554,00	54.051 RTS	1.120.259.329,00	54.051 RTS	1.232.285.261,00	54.051 RTS	5.093.361.657,89	Setda
	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase PAD	0,00%	8,37%	1.980.712.312,79	6,52%	1.977.369.000,72	12,11%	2.133.027.201,51	7,68%	2.248.753.561,58	6,37%	2.371.173.739,66	48,23%	10.711.035.816,26	Dispenda, Setda
		Peningkatan Kinerja BUMD Pasar Resik	1 Tahun	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun				
		Rintisan BUMD baru		2 BUMD		3 BUMD		4 BUMD		5 BUMD		6 BUMD				
	Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	persentase pendapatan daerah	0,00%	4,45%	217.688.959,58		-		-		-		-	4,45%	217.688.959,58	Dispenda, Setda
		Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib dan akuntabel melalui Penatausahaan Dana Transfer		32 OPD						32 OPD						
	Program Pengendalian Pendapatan Daerah	persentase pendapatan daerah			-	5,85%	222.188.246,36	6,61%	247.895.717,74	6,03%	273.600.503,62	5,84%	302.587.028,80	32,29%	1.046.271.496,52	Dispenda, Setda
		Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib dan akuntabel melalui Penatausahaan Dana Transfer				32 OPD		32 OPD		32 OPD		32 OPD				
	Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Peraturan yang disosialisasikan, Cakupan Peserta Sosialisasi			-	2 buah Perda, 2 buah Undang undang	329.734.483,80	2 buah Perda, 2 buah Undang undang	450.000.000,00	2 buah Perda, 2 buah Undang undang	450.000.000,00	2 buah Perda, 2 buah Undang undang	550.000.000,00	8 buah Perda, 8 buah Undang undang	1.779.734.483,80	Setda, Satpol PP
		Cakupan Peserta Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Pertanahan				100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		400 Orang		
		Cakupan penyediaan dan distribusi sarana informasi peraturan perundang-undangan				300 CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat , 300 CD Himpunan Produk Hukum Daerah dan Peraturan walikota, 300 buah Buku Produk Hukum Daerah 45 buah Penjilidan Peraturan Perundang-undangan, 1 buah CD Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat 1945-2014		300 CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat , 300 CD Himpunan Produk Hukum Daerah dan Peraturan walikota, 300 buah Buku Produk Hukum Daerah 45 buah Penjilidan Peraturan Perundang-undangan, 1 buah CD Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat 1945-2015		300 CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat , 300 CD Himpunan Produk Hukum Daerah dan Peraturan walikota, 300 buah Buku Produk Hukum Daerah 45 buah Penjilidan Peraturan Perundang-undangan, 1 buah CD Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat 1945-2016		300 CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat , 300 CD Himpunan Produk Hukum Daerah dan Peraturan walikota, 1200 buah Buku Produk Hukum Daerah 180 buah Penjilidan Peraturan Perundang-undangan, 4 buah CD Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat 1945-2017		1200 CD Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat , 1200 CD Himpunan Produk Hukum Daerah dan Peraturan walikota, 1200 buah Buku Produk Hukum Daerah 180 buah Penjilidan Peraturan Perundang-undangan, 4 buah CD Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat 1945-2017		

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Terlaksananya kegiatan keagamaan	26 kali	23 kali	2.855.825.600,00	167 kali	3.944.070.443,96	167 kali	4.778.880.442,42	167 kali	4.960.981.473,59	167 kali	5.063.478.481,98	691 kali	21.603.236.441,95	Setda, Kecamatan
		meningkatkan upaya internalisasi nilai-nilai keagamaan		8 kegiatan		9 kegiatan		8 kegiatan		8 kegiatan		8 kegiatan		41 kegiatan		
		meningkatkan partisipasi dan prestasi dalam kegiatan keagamaan		433 orang		775 orang		433 orang		775 orang		433 orang		2.849 orang		
		Apresiasi terhadap masyarakat yang berprestasi dalam keagamaan		-		50 orang		60 orang		60 orang		60 orang		280 orang		
		Instrumen kebijakan untuk penerapan tata nilai keagamaan		-		1 dokumen		-		-		-		1 dokumen		
	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat	67 Kali	121 Kali	704.620.000,00		20.000.000,00		20.999.999,99		22.376.167,12		23.514.520,92	121 Kali	791.510.688,02	Kecamatan
		Upaya Pencegahan Konflik Antar Umat	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		10 kali		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas aparatur		385 Orang	89.146.000,00		-		-		-		-	385 Orang	89.146.000,00	Kecamatan Kawalu, Cibeureum,
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terbinanya aparatur			1.531.075.000,00	497 Orang	1.746.283.520,44	497 Orang	2.624.284.599,99	497 Orang	2.596.734.482,19	497 Orang	2.290.652.162,30	1.988 Orang	10.789.029.764,92	Setda, Kecamatan Kawalu, Cibeureum, Cihideung, Cipedes
		Dokumen Anjab dan	-	2 Dokumen		-		2 Dokumen		-		-		4 Dokumen		
		Dokumen Evaluasi Jabatan	-	-		1 Dokumen		-		1 Dokumen		-		2 Dokumen		
		Cakupan peningkatan pemahaman penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan/kelurahan	-	10 Kecamatan/69 Kelurahan		-		10 Kecamatan/69 Kelurahan		10 Kecamatan/69 Kelurahan		10 Kecamatan/69 Kelurahan		4 Kali/10 Kecamatan/69 Kelurahan		
		Ckupan pembinaan dan pengembangan aparatur melalui ujian dinas	100 orang	100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		100 orang		500 orang		
		Cakupan pengembangan aparatur melalui rekrutmen CPNS	75 Orang dari tenaga honorer	-		-		67 Orang		200 orang		200 orang		467 orang		
		Cakupan pengembangan aparatur melalui pemrosesan tenaga honorer menjadi CPNS	-	180 Orang		180 Orang		180 Orang		180 Orang		-		720 orang		
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian	-	Karis Karsu 500 buah, usulan penghargaan styalencana 10 , 20 dan 30 tahun sebanyak 150 Orang,perbaikan konversi NIP, usulan permohonan ijin cerai		Karis Karsu 500 buah, usulan penghargaan styalencana 10 , 20 dan 30 tahun sebanyak 150 Orang,perbaikan konversi NIP, usulan permohonan ijin cerai		Karis Karsu 500 buah, usulan penghargaan styalencana 10 , 20 dan 30 tahun sebanyak 150 Orang,perbaikan konversi NIP, usulan permohonan ijin cerai		Karis Karsu 500 buah, usulan penghargaan styalencana 10 , 20 dan 30 tahun sebanyak 150 Orang,perbaikan konversi NIP, usulan permohonan ijin cerai		Karis Karsu 500 buah, usulan penghargaan styalencana 10 , 20 dan 30 tahun sebanyak 150 Orang,perbaikan konversi NIP, usulan permohonan ijin cerai		Karis Karsu 2500 buah, usulan penghargaan styalencana 10 , 20 dan 30 tahun sebanyak 750 Orang,perbaikan konversi NIP, usulan permohonan ijin cerai		
		Peningkatan kualitas pelayanan adminitrasi kepegawaian melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian	-	1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		5 Tahun		
		Cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur melalui pengambilan keputusan/keputusan dinas	170 Orang	-		75 Orang		180 Orang		180 Orang		247 orang		682 orang		
		Cakupan pembinaan dan pengembangan aparatur melalui Perpanjangan Kontrak	130 Orang	126 Orang		116 orang		99 Orang		88 Orang		86 Orang		515 Orang		

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Data Base PNS Mutakhir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Dokumen Analisis Kebutuhan PNS	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	-		
		Terlaksananya proses Mutasi secara umum	4.651 orang	4.413 orang	4.755 orang	4.730 orang	4.847 orang	4.943 orang	23.698 orang							
		Terisinya formasi jabatan struktural dan jabatan fungsional sesuai dengan syarat	721 orang	800 orang	800 orang	800 orang	800 orang	800 orang	4.000 orang							
	Program Fasilitas Prasarana Pelayanan Publik	Fasilitasi pembentukan yayasan asrama haji		1 buah yayasan	75.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 buah yayasan	75.000.000,00	Setda	
	Program Perlakuan dan Perlindungan Hukum yang Tidak Diskriminatif	Cakupan penyelesaian permasalahan hukum litigasi dan non litigasi serta penyelesaian perkara/sengketa.			-	4 permasalahan hukum	303.355.725,09	5 permasalahan hukum	425.000.000,00	5 permasalahan hukum	475.000.000,00	5 permasalahan hukum	550.000.000,00	19 permasalahan hukum	1.753.355.725,09	Setda
		Cakupan peningkatan kesadaran dan perilaku taat hukum			-	10 Kelompok pada 10 kelurahan	10 Kelompok pada 10 kelurahan	10 Kelompok pada 10 kelurahan	10 Kelompok pada 10 kelurahan	40 Kelompok pada 40 kelurahan						
	Program Pengembangan Fasilitas dan Penyelenggaraan	Data batas wilayah		1 Dokumen	100.000.000,00		-	1 Dokumen	100.000.000,00		-	1 Dokumen	100.000.000,00	3 Dokumen	300.000.000,00	Setda
		Tertatanya Batas Wilayah		80 titik			80 titik					80 titik		80 titik		
20	KETAHANAN PANGAN			-	-	221.392.404,43	236.300.000,00	299.930.000,00	154.073.000,00	911.695.404,43						
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rasio Ketersediaan pangan utama			76,67%	221.392.404,43	76,10%	236.300.000,00	75,43%	299.930.000,00	74,77%	154.073.000,00	74,77%	911.695.404,43	Dinas Pertanian, Setda	
		Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat yang aktif			61 Gapoktan	61 Gapoktan	61 Gapoktan	61 Gapoktan								
21	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			27.700.000,00	47.000.000,00	47.800.000,00	52.640.000,00	142.522.000,00	317.662.000,00							
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Terselenggaranya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	7 Kali	2 Kali	27.700.000,00	3 Kali	47.000.000,00	3 Kali	47.800.000,00	3 Kali	52.640.000,00	9 Kali	142.522.000,00	20 Kali	317.662.000,00	Kecamatan Kawalu, Mangkubumi, Indihiang
22	STATISTIK			-	1.143.198.747,40	1.190.705.184,77	1.286.757.055,01	1.338.777.077,21	4.959.438.064,38							
	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Tersedianya Data Statistik Daerah		3 Dokumen	1.143.198.747,40	4 Dokumen	1.190.705.184,77	3 Dokumen	1.286.757.055,01	4 Dokumen	1.338.777.077,21	14 Dokumen	4.959.438.064,38	Bappeda, Dinas Kesehatan, Disbudparpora, Kecamatan Tamansari		
23	KEARSIPAN			72.225.000,00	85.000.000,00	125.000.000,00	155.047.650,00	222.982.650,00	660.255.300,00							
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Terwujudnya Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		1 kegiatan pembinaan kearsipan	50.000.000,00	1 Sistem Jaringan Kearsipan, 1 Paket Sarana Kearsipan , 1 Perda	60.000.000,00	1 Sistem Jaringan Kearsipan, 1 Paket Sarana Kearsipan, 1 Keg Penyusutan Arsip	100.000.000,00	1 Sistem Jaringan Kearsipan, 1 Paket Sarana Kearsipan, 1 Keg Penyusutan Arsip	125.047.650,00	1 Sistem Jaringan Kearsipan, 1 Paket Sarana Kearsipan ,	132.982.650,00	1 Sistem Jaringan Kearsipan, 1 Paket Sarana Kearsipan , 1 Perda, 2 kali kegiatan penyusutan arsip dan 1 kali pembinaan kearsipan	468.030.300,00	Kantor Arsip
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Terwujudnya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Sejarah		-	-	-	-	-	-	1 dokumen Arsip Sejarah dalam bentuk digital	60.000.000,00	1 dokumen Arsip Sejarah dalam bentuk digital	60.000.000,00	Kantor Arsip		
	Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Terwujudnya Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan		100%	22.225.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	132.225.000,00	Kantor Arsip
24	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2.696.931.621,79	2.758.464.761,92	2.955.058.279,00	3.356.747.392,00	3.544.838.275,00	15.312.040.329,71							

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	75,00	76,50	681.000.000,00	78,03	880.701.293,86	79,59	915.038.056,00	81,18	1.089.526.897,00	82,81	1.124.547.872,00	82,81	4.690.814.118,86	Dinas Perhubungan, Setda
Jumlah Jaringan Komunikasi		0,059	0,061		0,062		0,063		0,064		0,066		0,066			
Jumlah Wartel/ Warnet		0,309	0,316		0,322		0,328		0,335		0,342		0,342			
Jumlah Website Milik Pemerintah Daerah		16	25		33		33		33		33		33			
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Dokumen Kajian Bidang KOMINFO	1 Dokumen	1 Dokumen	86.069.327,00		-		-	1 Dokumen	46.852.473,00	1 Dokumen	64.025.579,00	3 Dokumen	196.947.379,00	Dinas Perhubungan
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan	14	20	100.000.000,00	10	34.064.000,00	10	40.640.203,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	80	374.704.203,00	Dinas Perhubungan
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah Surat Kabar Nasional/ Lokal	21	25	1.829.862.294,79	30	1.843.699.468,06	35	1.999.380.020,00	40	2.120.368.022,00	45	2.256.264.824,00	45	10.049.574.628,85	Setda, Sekretariat DPRD
Jumlah Penyiaran Radio/ TV Lokal		34	34		34		35		36		37		37			
Pameran/ Expo		1	2		2		2		3		4		4			
Penyebarluasan Informasi		12 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		60 Kali			
Dokumentasi Kegiatan Pemerintah		-	72 Kegiatan		96 Kegiatan		120 Kegiatan		168 Kegiatan		192 Kegiatan		648 Kegiatan			
25	PERPUSTAKAAN				-		233.298.420,00		222.486.772,00		245.000.000,00		231.406.044,00		932.191.236,00	
	Program Pengembangan Budaya Baca	Terwujudnya Pengembangan Budaya Baca			-	Sosialisasi, Pembinaan perpustakaan, Otomasi perpustakaan, Penyediaan bahan pustaka, Pemasyarakatan minat baca, Pengembangan minat baca, Koordinasi pengembangan perpustakaan, dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	233.298.420,00	Sosialisasi, Pembinaan perpustakaan, Otomasi perpustakaan, Penyediaan bhn pustaka, Pemasyarakatan minat baca, Pengembangan minat baca, Koordinasi pengembangan perpustakaan, dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	222.486.772,00	Sosialisasi, Pembinaan perpustakaan, Otomasi perpustakaan, Penyediaan bahan pustaka, Pemasyarakatan minat baca, Pengembangan minat baca, Koordinasi pengembangan perpustakaan, dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	245.000.000,00	Sosialisasi, Pembinaan perpustakaan, Otomasi perpustakaan, Penyediaan bahan pustaka, Pemasyarakatan minat baca, Pengembangan minat baca, Koordinasi pengembangan perpustakaan, dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	231.406.044,00	4 Sosialisasi, 4 Pembinaan perpustakaan, 4 Otomasi perpustakaan, 4 Penyediaan bahan pustaka, 4 Kegiatan Pemasyarakatan minat baca, 4 pengembangan minat baca, 4 x Koordinasi pengembangan perpustakaan, 4 dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	932.191.236,00	Kantor Arsip
II	URUSAN PILIHAN				19.009.147.232,05		19.220.760.953,16		25.205.821.892,00		36.622.322.059,83		39.337.799.295,94		139.395.851.432,98	
1	PERTANIAN				4.650.000.000,00		4.615.000.000,00		3.999.000.000,00		4.650.000.000,00		4.590.000.000,00		22.504.000.000,00	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan	-	55 Gapoktan	50.000.000,00	61 Gapoktan	50.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	69 Gapoktan	330.000.000,00	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Terlaksananya penerapan teknologi pertanian	4 unit	15 unit	200.000.000,00	12 unit	120.000.000,00	12 unit	120.000.000,00	12 unit	120.000.000,00	12 unit	120.000.000,00	63 unit	680.000.000,00	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	0,00%	5,00%	400.000.000,00	5,00%	635.000.000,00	5,00%	729.000.000,00	5,00%	870.000.000,00	5,00%	870.000.000,00	25,00%	3.504.000.000,00	Dinas Pertanian
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	100,00%	100,00%	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	100.000.000,00	100,00%	400.000.000,00	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan produksi hasil peternakan		5,00%	530.000.000,00	5,00%	490.000.000,00	5,00%	670.000.000,00	5,00%	680.000.000,00	5,00%	760.000.000,00	25,00%	3.130.000.000,00	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	0,00%	3 kegiatan	290.000.000,00	3 kegiatan	250.000.000,00	3 kegiatan	270.000.000,00	3 kegiatan	300.000.000,00	3 kegiatan	300.000.000,00	15 kegiatan	1.410.000.000,00	Dinas Pertanian

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Terlaksananya penerapan teknologi peternakan	1 paket	3 paket 150.000.000,00	3 paket 150.000.000,00	3 paket 150.000.000,00	3 paket 150.000.000,00	3 paket 150.000.000,00	3 paket 150.000.000,00	3 paket 150.000.000,00	3 paket 150.000.000,00	15 paket 750.000.000,00	Dinas Pertanian			
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rasio Ketersediaan pangan utama	73,58%	77,35%	260.000.000,00							77,35%	260.000.000,00	Dinas Pertanian, Setda		
		Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat yang aktif		61 Gapoktan						61 Gapoktan						
	Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian		25 paket 2.500.000.000,00	25 paket 2.500.000.000,00	17 paket 1.700.000.000,00	21 paket 2.100.000.000,00	20 paket 2.000.000.000,00	108 paket 10.800.000.000,00	Dinas Pertanian						
	Program Peningkatan SDM Pertanian	Peningkatan kualitas SDM pertanian		2 kegiatan 220.000.000,00	3 kegiatan 370.000.000,00	2 kegiatan 200.000.000,00	2 kegiatan 250.000.000,00	2 kegiatan 200.000.000,00	3 kegiatan 1.240.000.000,00	Dinas Pertanian						
2	KEHUTANAN				1.597.103.000,00		1.629.266.000,00		2.383.274.000,00		1.960.299.000,00		2.122.629.000,00		9.692.571.000,00	
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	125 Ha	197,75 Ha 1.497.103.000,00	198,67 Ha 1.529.266.000,00	212,36 Ha 2.263.274.000,00	160 Ha 1.760.299.000,00	160 Ha 1.772.629.000,00	928,78 Ha 8.822.571.000,00	Dinas Pertanian						
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan	Pengembangan hasil hutan non kayu		10.000 log jamur kayu 100.000.000,00	20 ha PLBTH 100.000.000,00	10.000 log jamur kayu 120.000.000,00	200 stup lebah madu 200.000.000,00	20 ha PLBTH 350.000.000,00	20.000 log jamur kayu, 200 stup lebah madu, 40 Ha PLBTH 870.000.000,00	Dinas Pertanian						
3	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				3.409.644.232,05		3.555.511.216,00		3.770.347.719,00		3.889.096.571,00		4.083.551.349,00		18.708.151.087,05	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan	38,84 %	34,84 % 239.383.652,28	30,84 % 254.043.292,00	26,84 % 261.660.000,00	22,84 % 282.418.474,00	18,84 % 296.539.394,00	0,00% 1.334.044.812,28	Dinas Bina Marga						
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah Keluarga Pra KS yang menikmati Fasilitas Listrik		1.400 KK 3.170.260.579,76	2.000 KK 3.301.467.924,00	2.000 KK 3.508.687.719,00	2.000 KK 3.606.678.097,00	1.685 KK 3.787.011.955,00	9.085 KK 17.374.106.274,76	Dinas Bina Marga						
		Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik														
4	PARIWISATA				716.900.000,00		755.441.647,95		5.825.000.000,00		8.200.408.171,83		9.705.000.000,00		25.202.749.819,78	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	1 Kali	2 Kali 191.900.000,00	7 Kali 202.216.839,50	5 Kali 1.300.000.000,00	2 Kali 650.000.000,00	2 Kali 650.000.000,00	18 Kali 2.994.116.839,50	Disbudparpora						
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Objek Daya Tarik Wisata	2 Kali	2 Kali 460.000.000,00	12 Kali 484.730.308,35	10 Kali 3.995.000.000,00	6 Kali 7.070.408.171,83	6 Kali 8.635.000.000,00	38 Kali 20.645.138.480,18	Disbudparpora						
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelaku Pariwisata	1 Kali	1 Kali 65.000.000,00	10 Kali 68.494.500,09	8 Kali 530.000.000,00	6 Kali 480.000.000,00	5 Kali 420.000.000,00	30 Kali 1.563.494.500,09	Disbudparpora						
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.700.000.000,00		3.690.000.000,00		3.965.750.000,00		4.888.000.000,00		5.925.250.000,00		22.169.000.000,00	
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pengembangan komoditas unggulan perikanan	3 pokdakan	10 pokdakan 150.000.000,00	20 pokdakan 150.000.000,00	22 pokdakan 210.750.000,00	25 pokdakan 193.000.000,00	25 pokdakan 185.250.000,00	105 pokdakan 889.000.000,00	Dinas Pertanian						
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Peningkatan sarana penyuluh perikanan dan SDM penyuluh perikanan	2 orang, 1 paket	9 orang 60.000.000,00	12 orang, 1 paket 160.000.000,00	15 orang 70.000.000,00	15 orang 1 paket 220.000.000,00	20 orang 70.000.000,00	71 orang, 2 paket 580.000.000,00	Dinas Pertanian						
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Peningkatan pemasaran hasil produksi perikanan	0,00%	10,00% 490.000.000,00	10,00% 510.000.000,00	10,00% 610.000.000,00	10,00% 650.000.000,00	10,00% 850.000.000,00	50,00% 3.110.000.000,00	Dinas Pertanian						
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Berkembangnya kawasan budidaya air tawar	6 lokasi	4 lokasi 2.700.000.000,00	5 lokasi 2.600.000.000,00	5 lokasi 2.600.000.000,00	6 lokasi 3.300.000.000,00	6 lokasi 4.140.000.000,00	26 lokasi 15.340.000.000,00	Dinas Pertanian						
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Pencapaian target daerah	95,00%	100,00% 300.000.000,00	100,00% 270.000.000,00	100,00% 475.000.000,00	100,00% 525.000.000,00	100,00% 680.000.000,00	100,00% 2.250.000.000,00	Dinas Pertanian						
6	PERDAGANGAN				919.000.000,00		780.000.000,00		1.215.000.000,00		5.960.000.000,00		4.817.852.914,94		13.691.852.914,94	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah kasus pengaduan konsumen yang diselesaikan		100 889.000.000,00	150 630.000.000,00	200 565.000.000,00	250 710.000.000,00	300 425.000.000,00	- 3.219.000.000,00	KUMKM Perindag						
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor (dalam US\$)	14377134,57	15095991,3	-	16605590,43	50.000.000,00	19096428,99	50.000.000,00	22915714,79	50.000.000,00	28644643,49	50.000.000,00	0,70	200.000.000,00	KUMKM Perindag

NO	URUSAN / PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Pelaksana
				2013		2014		2015		2016		2017				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah PKL yang dibina	-	-	-	2 kecamatan	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	200.000.000,00	-	100.000.000,00	2 kecamatan	500.000.000,00	KUMKM Perindag
		Sosialisasi Perda Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%	-	
		Relokasi PKL	-	-	-	-	-	-	-	1 lokus	-	-	-	1 lokus	-	
		Pengawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	100,00%	-	
	Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar	Inventarisasi dan verifikasi piutang pasar tradisional		7 Pasar tradisional	30.000.000,00		-		500.000.000,00		5.000.000.000,00		4.242.852.914,94	7 Pasar tradisional	9.772.852.914,94	KUMKM Perindag
		Tersusunnya DED Pusat Pasar Ekonomi Kreatif Produk Unggulan Daerah						1 dokumen		-		-		1 dokumen		
		Terbangunnya Pusat Pasar Ekonomi Kreatif Produk Unggulan Daerah						-		1 unit (Tahap Pertama)		1 unit (Tahap Kedua)		1 unit		
7	INDUSTRI				3.916.500.000,00		4.045.542.089,21		3.872.450.173,00		6.874.518.317,00		7.843.516.032,00		26.552.526.611,21	
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				-		-		-		-		-		-	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang dibina		63 IKM	3.896.500.000,00	118 IKM	3.275.542.089,21	145 IKM	2.902.450.173,00	151 IKM	6.104.518.317,00	263 IKM	7.073.516.032,00	740 IKM	23.252.526.611,21	KUMKM Perindag, Setda
		Fasilitasi penciptaan dan promosi alat/teknologi tepat guna		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		5 Kegiatan		
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Terwujudnya Pengembangan sentra-sentra industri potensial		3 sentra	20.000.000,00	8 sentra	770.000.000,00	8 sentra	970.000.000,00	8 sentra	770.000.000,00	8 sentra	770.000.000,00	35 sentra	3.300.000.000,00	KUMKM Perindag
8	KETRANSMIGRASIAN				100.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		875.000.000,00	
	Program Transmigrasi Regional	Transmigrasi Umum		25 KK	100.000.000,00	30 KK	150.000.000,00	35 KK	175.000.000,00	40 KK	200.000.000,00	45 KK	250.000.000,00	175 KK	875.000.000,00	Dinsosnakertrans

BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Daerah dalam RPJM Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 meliputi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjelaskan tentang pencapaian setiap Misi RPJM Daerah, serta Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta arahan RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya daerah.

Tabel 9.1.

Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kota Tasikmalaya 2013-2017

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal		Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pertumbuhan PDRB (%)	5,81	5,85	5,90	5,95	6,05	6,20	6,35
1.2.	Laju inflasi Kota (%)	4,17	4,07	4,30	4,50	4,90	4,40	4,30
1.3.	PDRB per kapita adh konstan (Rp)	6.372.651,87	6.616.012,88	6.859.373,90	7.102.734,91	7.346.095,92	7.589.456,94	7.832.817,95
1.4.	Indeks Gini (point)	0,375	0,35	0,345	0,335	0,325	0,315	0,305
1.5.	Indeks Pembangunan Manusia / IPM (point)	74,82	75.33	75.78	76.25	76.72	77.22	77.74
1.5.1	Indeks Kesehatan	75,05	75.33	75.58	75.80	75.98	76.15	76.30
1.5.2	Indeks Pendidikan	86,62	87,32	87,63	87,95	88,29	88,65	89,03
1.5.3	Indeks Daya Beli	62,80	63,54	64,33	65,16	66,04	66,96	67,95
1.5.3.1	Purchasing Power Parity/PPP (Ribu Rupiah)	631,75	634.95	638.35	641.95	645.75	649.75	654.05
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka melek huruf (%)	99,59	99,61	99,65	99,70	99,76	99,82	99.90

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal		Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (thn)	9,10	9,32	9,45	9,59	9,74	9,90	10,07
1.3.	Angka partisipasi kasar							
1.3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	111,44	112,77	113,23	113,24	113,25	113,26	113,27
1.3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	100,75	101,89	102,45	102,46	102,47	102,48	102,49
1.3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	91,94	93,37	94,49	95,31	96,56	97,78	99,91
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan							
1.4.1.	Angka pendidikan yang ditamatkan (%) SD/MI/Paket A (%)	46,22	47,19	48,16	49,13	50,1	51,07	52,04
1.4.2.	Angka pendidikan yang ditamatkan (%) SMP/MTs/Paket B (%)	16,14	17,11	18,08	19,05	20,02	20,99	21,96
1.4.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan (%) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	17,94	18,91	19,88	20,85	21,82	22,79	23,76
1.5.	Angka Partisipasi Murni							
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	99,40	99,34	99,28	99,22	99,16	99,1	99,04
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	93,57	93,51	93,45	93,39	93,33	93,27	93,21
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C (%)	74,95	74,89	74,83	74,77	74,71	74,65	74,59
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000) Registrasi	989,54	989,63	989,72	989,81	989,90	989,99	990,08
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000) Survai	965,36	965,57	965,78	965,99	966,12	966,33	966,45
2.3.	Angka usia harapan hidup (thn)	70,03	70,26	70,5	70,77	71,05	71,27	71,79
2.4.	Persentase balita gizi buruk (%)	0,149	0,19	0,41	0,36	0,31	0,26	0,21
2.5	Angka Kematian Bayi (per 1.000) Registrasi	10,46	10,37	10,28	10,19	10,10	10,01	9,92
2.6.	Angka Kematian Bayi (per 1.000) Survai	34,64	34,43	34,22	34,01	33,88	33,67	33,55
2.7	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	202,2	182,2	162,2	142,2	122,2	102,2	82,2
3.	Ketenagakerjaan							
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja	90,86	90,87	90,89	90,91	90,93	90,96	90,99
Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1.	Kebudayaan							
1.1.	Jumlah grup kesenian (buah)	163	173	175	177	179	181	183
1.2.	Jumlah gedung (unit)	1	1	1	1	1	1	1
2.	Pemuda dan Olahraga							
2.1.	Jumlah klub olahraga (buah)	200	210	215	220	225	230	235
2.2.	Jumlah gedung olahraga (unit)	42	44	41	54	58	65	68
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Fokus Layanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah							

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal		Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah SD/MI/Paket A (%)	99,91	99,93	99,95	99,96	99,97	99,98	99,99
1.1.1.2	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs/Paket B (%)	98,63	98,73	98,83	98,93	99,03	99,13	99,23
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (per 10.000)	43,29	46,08	46,51	46,93	48,36	49,76	51,18
1.1.3.	Rasio guru/murid (per 10.000)							
1.1.3.1	Rasio guru/murid SD/MI/Paket A (per 10.000)	535,80	543,70	551,50	559,20	567,10	575,10	583,30
1.1.3.2	Rasio guru/murid SMP/MTs/Paket B (per 10.000)	783,63	786,05	789,48	791,9	795,33	799,73	804,15
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata (per 1.000)							
1.1.4.1	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI/Paket A (per 1.000)	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29
1.1.4.2	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs/Paket B (per 1.000)	0,79	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,81
1.2.	Pendidikan menengah:							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah SMA/SMK/MA/Paket C (%)	89,08	89,19	89,31	89,44	89,67	89,91	90,16
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (per 10.000)	25,32	25,32	25,32	25,32	25,33	25,33	25,34
1.2.3.	Rasio guru/murid SMA/SMK/MA/Paket C (per 10.000)	933,93	944,14	954,36	964,59	974,83	985,08	995,08
1.2.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMA/SMK/MA/Paket C (per 1.000)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	0,94
1.2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	99,65	99,75	99,80	99,85	99,90	99,95	99,99
1.3.	Fasilitas Pendidikan:							
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	1802	1852	1902	1952	2052	2152	2302
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	1554	1654	1754	1854	1954	2054	2154
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
1.4.1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	70,89	70,72	73,06	75,40	77,74	80,08	82,42
1.5.	Angka Putus Sekolah:							
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,46	0,35	0,28	0,21	0,14	0,07	0,00
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,25	0,46	0,39	0,32	0,25	0,18	0,11
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	0,38	0,31	0,28	0,25	0,22	0,19	0,16
1.6.	Angka Kelulusan:							
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	99,95	99,97	99,98	99,98	99,99	100	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal		Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	99,79	99,83	99,86	99,89	99,92	99,95	99,98
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	99,62	99,79	99,82	99,85	99,88	99,91	99,94
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	68,68	72,11	73,34	74,57	75,69	76,92	78,15
2.	Kesehatan							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita (per 1.000)#	15,28	14,86	16,09	17,42	18,85	20,28	21,81
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 1.000)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 1.000)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1.000)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56
2.5.	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk (per 1.000)	2,49	2,49	2,50	2,50	2,51	2,51	2,52
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	64,71	74	76	78	80	82	85
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	90,49	86,85	86	88	90	90	91
2.8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	85,51	90	100	100	100	100	100
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	85,01	85,01	85,00	85,00	87,00	89,00	90,00
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100	100	100
2.13.	Cakupan kunjungan bayi (%)	90,00	94,78	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00
2.14.	Cakupan puskesmas (%)	200	200	200	200	200	200	200
2.15.	Cakupan puskesmas pembantu (%)	30,43	30,43	44,93	52,17	59,42	66,67	73,91
3.	Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (point)	0,50	0,52	0,62	0,68	0,77	0,90	1,00
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi (point)	0,01	0,01	0,011	0,012	0,013	0,014	1,015
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (per 1.000)	5,46	5,46	5,61	5,61	5,76	5,87	5,96
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	55,57	64,41	67,64	70,97	74,30	76,93	79,56
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum milik Pemerintah per satuan penduduk (per 1.000)	86,66	85,25	83,90	82,59	81,32	80,08	78,89
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (M³ per per 1.000)	277,74	267,07	282,00	304,00	319,00	319,00	341,00
3.7.	Rasio rumah layak huni (point)	0,19	0,19	0,39	0,69	1,09	1,59	2,19
3.8.	Rasio permukiman layak huni (point)	0,99	0,99	1,19	1,49	1,89	2,39	2,99

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal		Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4 (km/orang)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
3.10.	Persentase pemukiman penduduk yang belum dilalui mimal roda 4 (%)	0	0	0	0	0	0	0
3.11.	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	91,00	100	100	100	100	100	100
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	-	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3
3.13.	Panjang jalan yang memiliki trotoar (%)	23	25	27,5	30	32,5	35	37,5
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	39,90	39,91	39,67	39,31	38,83	38,23	37,51
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tersumbat (%)	50	50	60	65	70	70	70
3.16.	Luas irigasi Kota dalam kondisi baik (%)	63	64	69,5	74,9	80,3	83,0	85,7
3.17.	Lingkungan Pemukiman (%)	0,34	0,32	0,30	0,28	0,27	0,26	0,25
4.	Perumahan							
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	96	97	97,5	98	98,5	99	99,5
4.2.	Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	55,92	61,78	63,78	65,78	67,78	69,78	71,78
4.3.	Lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,33	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23	0,21
4.4.	Rumah layak huni (%)	94,75	95,32	95,88	96,44	97	97,56	98,12
5.	Penataan Ruang							
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (point)	21,35	21,85	22,85	24,85	26,85	29,85	30,85
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	45,38	49,87	59,87	74,87	79,87	84,87	89,87
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	2,5	2,5	5	5	5	5	5
6.	Perencanaan Pembangunan							
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Perhubungan							
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	713.367	647.501	660.451	673.660	687.133	700.876	714.893
7.2.	Rasio ijin trayek (per 10.000 penduduk)	21,1	21,5	21,6	21,6	21,7	21,7	21,7
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum (buah)	13.361	13.834	14.111	14.393	14.681	14.974	15.274
7.4.	Jumlah Terminal Bis (unit)	5	5	5	5	6	6	6
7.5.	Angkutan darat (%)	0,377	0,428	0,428	0,429	0,43	0,431	0,432

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal		Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum (%)	19,36	16,71	15,88	15,08	14,33	13,61	12,93
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (menit)	40	40	40	40	40	40	40
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp)	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7.9.	Pemasangan Rambu-rambu (%)	4,47	16,40	4,07	3,33	3,33	3,33	3,33
8.	Lingkungan Hidup							
8.1.	Persentase penanganan sampah (%)	28	38	42	48	52	60	65
8.2.	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	27,08	28,56	30,56	32,56	34,56	37,56	39,56
8.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata (%)	66,95	67,52	67,09	67,51	67,94	73,94	74,64
8.4.	Pemantauan pencemaran status mutu air (%)	55	60	55	50	44	38	33
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah Sumber Mata Air (%)	-	26,78	20	25	25	30	30
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	100	100	100	100	100	100	100
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	28	27	28	28	30	32	34
8.8.	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100	100	100	100
9.	Pertanahan							
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	35	38	39	39	40	40	45
9.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	100	100	100	100	100
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil							
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	80	85	86	88	90	92	95
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	62,63	58,44	61,44	64,44	66,44	68,44	70,44
10.3.	Jumlah pasangan yang membuat akte nikah non muslim (buah)	132	136	140	145	150	155	160
10.4.	Kepemilikan KTP (orang)	326.335	410.660	421.724	438.005	454.679	471.754	494.445
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (per 1.000)	599	611	646	686	736	786	846
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
11.1.	Persentase partisipasi PNS perempuan Pemkot per angkatan kerja perempuan (%)	2,37	2,37	2,37	2,37	2,38	2,38	2,38
11.2.	Jumlah KDRT yang dilaporkan (kasus)	12	38	20	19	18	17	16
11.3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	41,08	42,06	43,04	44,02	45,00	45,98	46,96
11.4.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	100	100	100	100

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal		Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
12.1.	Total Fertility Rate (TFR) (point)	2,55	2,54	2,53	2,52	2,51	2,50	2,49
12.2.	Rasio akseptor KB (%)	74,75	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00	76,25
12.3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	74,75	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00	76,25
12.4.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KK)	70.419	63.377	57.040	51.335	46.202	41.582	37.423
13.	Sosial							
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (%)	5,21	5,42	5,92	6,42	6,92	7,42	7,92
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%)#	4,91	5,61	6,11	6,75	7,25	7,75	8,25
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	3,15	4,10	4,85	5,10	5,75	6,25	7,00
14.	Ketenagakerjaan							
14.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	61,15	62,15	63,65	65,15	67,15	69,15	71,15
14.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	4,50	2,25	2,17	2,10	2,05	2,00	1,91
14.3.	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	4,18	6,67	7,25	7,50	8,25	9,25	10,50
14.4.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	9,14	9,13	9,11	9,09	9,07	9,04	9,01
14.5.	Keselamatan dan perlindungan (%)	2,1	5,6	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4
14.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	0	0	0	0	0	0	0
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
15.1.	Persentase koperasi aktif (%)	66,16	67,49	70,49	75,49	79,49	84,49	89,49
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit)	5.933	7.131	7.631	8.154	8.686	9.231	9.791
15.3.	Jumlah BPR/LKM (unit)	368	389	392	397	401	406	411
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil (%)	88,13	86,49	88,49	90,90	92,50	94,97	95,35
16.	Penanaman Modal							
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (unit)	2	2	2	2	2	2	2
16.2.	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) (Rp.000)	228.944.769	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000
17.	Kebudayaan							
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	5	5	4	4	6	7	6
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)	8	9	9	10	12	13	15
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	4	13	15	20	23	25	30
18.	Kepemudaan dan Olahraga							
18.1.	Jumlah organisasi pemuda (buah)	64	64	66	68	70	72	74
18.2.	Jumlah organisasi olahraga (buah)	33	33	35	37	39	41	43
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	10	13	14	15	16	17	18

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal		Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga (kali)	3	1	6	7	8	9	10
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah)	1	1	2	3	4	5	6
18.6.	Lapangan olahraga (buah)	78	80	82	84	86	88	90
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)	1	2	4	5	6	7	8
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)	4	4	6	7	8	9	10
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (per 10.000)	1,7	1,1	3,1	4,1	5,1	6,1	7,1
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (per 10.000)	44	37	39	40	41	42	43
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan (%)	24	24	26	27	28	29	30
20.4.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,81	5,89	5,91	5,95	6,01	6,07	6,13
20.5.	Persentase Penduduk Miskin (%)	19,98	18,9	17,88	16,84	15,78	14,72	13,66
20.6.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.7.	Penegakan PERDA (%)	90	92	93	94	96	98	100
20.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	15	14	16	16	18	18	20
20.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota (%)	82	84	84	85	85	86	86
20.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Wilayah Kota (%)	0,0044	0,0037	0,0237	0,0437	0,0637	0,0837	0,1037
20.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%)	6,19	6,09	6,11	6,13	6,15	6,17	6,19
20.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	62,5	43,11	46,33	49,60	55,,29	58,56	65,80
20.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik (%)	42,03	49,28	52,25	54,02	63,38	72,8	80
20.14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda (buah)	6	11	14	17	20	23	26
20.15.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (point)	-	-	65	75	80	82	85
21.	Ketahanan Pangan							
21.1.	Ketersediaan pangan utama (%)	79,28	73,58	77,35	76,67	76,10	75,43	74,77
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (buah)	207	207	207	207	207	207	207
22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (buah)	207	207	207	207	207	207	207
22.3.	Jumlah LSM (buah)	26	18	20	22	25	30	35
22.4.	LPM Berprestasi (%)	13	20	25	25	28	30	35

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal		Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
22.5.	PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100
22.6.	Posyandu aktif (unit)	776	787	805	846	867	898	920
22.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	70	60	70	70	80	90	100
23.	Statistik							
23.1.	Buku "kota dalam angka" (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2.	Buku "PDRB kota" (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24.	Kearsipan							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku (%)	3,03	3,03	18,18	36,36	54,55	72,73	100
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (kegiatan)	-	1	2	4	6	8	10
25.	Komunikasi dan Informatika							
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi (unit)	0,078	0,059	0,061	0,062	0,063	0,064	0,066
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk (per 1.000)	0,309	0,309	0,316	0,322	0,328	0,335	0,342
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal (buah)	21	21	25	30	35	40	45
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (buah)	34	34	34	34	35	36	37
25.5.	Web site milik pemerintah daerah (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
25.6.	Pameran/expo (kali)	1	1	2	2	2	3	4
26.	Perpustakaan							
26.1.	Jumlah perpustakaan (buah)	84	94	100	104	108	112	118
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)	3,67	3,96	4,39	5,09	5,77	6,58	7,38
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%)	35,06	39,91	38,77	39,84	39,84	39,84	39,84
26.4.	Eksemplar buku per jumlah penduduk Kota Tasikmalaya (%)	3,42	3,70	3,96	4,64	5,62	6,88	8,25
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)	61,32	62,05	62,96	63,46	64,04	64,54	65,05
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/tanaman bahan makan terhadap PDRB (%)	2,92	2,90	2,85	2,79	2,75	2,68	2,61
1.3.	Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
1.4.	Cakupan bina kelompok petani (%) (direvisi)	35,56	39,80	44,04	48,28	52,52	56,76	61,00
2.	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	8,55	6,68	11,32	12,82	15,72	15,81	16,69
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan (%)	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3.1.	Pertambangan tanpa ijin (%)	55,94	38,84	35,8	28,84	25,32	22,65	18,73

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal		Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
4.	Pariwisata							
4.1.	Kunjungan wisata (orang)	257.557	328.076	360.884	396.972	436.669	480.336	528.370
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	7,67	7,67	7,68	7,70	7,72	7,74	7,76
5.	Kelautan dan Perikanan							
5.1.	Produksi perikanan (%)	100,01	95,00	100	100	100	100	100
5.2.	Konsumsi ikan (%)	98,05	97,54	100	100	100	100	100
6.	Perdagangan							
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	24,65	25,13	25,89	26,78	27,82	28,9	30
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan (Rp. 000)	226,592 M	51,381 M	227,684 M	341,526 M	512,289 M	768,433 M	1.152,650 M
7.	Perindustrian							
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	17,52	17,58	17,65	17,78	17,89	18,01	18,20
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (%)	17,52	17,58	17,65	17,78	17,89	18,01	18,20
7.3.	Pertumbuhan Industri (%).	2,99	1,42	1,80	2,40	2,90	3,40	4,00
7.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	12,57	12,12	14,12	17,12	20,12	24,12	29,12
8.	Ketransmigrasian							
8.1.	Transmigran swakarsa (%)	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB (%)	-	-	-	-	-	-	-
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	525.337	535.337	545.575	556.013	566.308	576.602	586.795
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (%)	49,16	49,97	50,58	51,50	52,43	53,37	54,32
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur								
1.	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km/buah)	0,00400	0,00402	0,00383	0,00365	0,00347	0,00331	0,00315
1.2.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (ton)	6.078.564	4.924.763	6.027.909	6.148.467	6.271.437	6.396.866	6.524.803
1.3.	Jumlah barang melalui terminal per tahun (ton)	361.507	271.130	331.863	338.500	345.270	352.176	359.219
2.	Penataan Ruang							
2.1.	Luas wilayah industri (%)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Luas wilayah banjir (%)	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Luas wilayah perkotaan (%)	100	100	100	100	100	100	100
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang (buah)	30	44	44	45	45	46	46

NO	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal		Capaian Kinerja				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (buah)	-	8	8	8	9	9	10
3.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (buah)	76	81	86	92	99	107	115
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel (buah)	35	35	36	36	37	39	40
4.	Lingkungan Hidup							
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%)#	27	28,47	29,52	30,67	31,75	32,89	34,00
5.	Komunikasi dan Informatika							
5.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)#	99,51	99,57	99,63	99,71	99,84	99,90	99,98
5.2.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%) #	72,75	75,00	76,5	78,03	79,59	81,18	82,81
Fokus Iklim Berinvestasi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Angka kriminalitas yang tertangani (per 10.000)#	5	7	6	5	4	3	2
1.2.	Jumlah demo (kali)	31	20	18	16	14	10	6
1.3.	Lama proses perijinan (hari)	14	14	14	14	14	14	14
1.4.	Jumlah pajak dan retribusi daerah (buah)	33	26	27	27	27	27	27
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah)	2	2	2	2	2	2	2
Fokus Sumber Daya Manusia								
1.	Ketenagakerjaan							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (per 10.000)#	0,07	0,11	0,19	0,27	0,35	0,43	0,51
1.2.	Rasio ketergantungan (%)	52,3	51,75	51,2	50,65	50,1	49,55	49

BAB X

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Tasikmalaya untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Walikota/ Wakil Walikota, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, serta memperhatikan RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 harus memuat kaidah pelaksanaan. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 harus mencakup pedoman transisi.

10.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis/ Renstra SKPD Tahun 2013-2017.

Setelah dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 ini disusun dan ditetapkan dengan peraturan daerah, maka dokumen ini harus dijabarkan dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh SKPD, dalam bentuk Rencana Strategis/ Renstra SKPD. Selanjutnya Renstra SKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana tahunan yang disebut Rencana Kerja/ Renja SKPD.

2. RPJMD digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 sebagai pedoman untuk penyusunan program-program dan kegiatan tahunan (RKPD). Untuk itu, kegiatan-kegiatan yang diusulkan didalam RKPD harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJMD. Hal ini berarti penetapan prioritas program dan kegiatan dalam RKPD harus sesuai dengan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017. Dengan demikian RKPD dan Renja SKPD harus konsisten karena keduanya berpedoman pada dokumen yang sama yaitu RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017.

3. Penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan RPJMD

Dalam proses penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 tidak hanya menggunakan pendekatan *top down*, politis, dan teknokratis tapi juga melalui pendekatan partisipatif dan *bottom up*. Dengan melalui proses tersebut, diharapkan terjadi sinergi dan sinkronisasi program pembangunan yang diusulkan *stakeholders*, supaya pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efisien dan efektif sehingga hasilnya dapat dirasakan secara optimal dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah lainnya, serta Dunia Usaha untuk mendukung pelaksanaan RPJMD.

Program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 memerlukan pendanaan yang tidak sedikit, sementara pendapatan asli daerah sangat terbatas. Pemerintah Kota Tasikmalaya sangat tergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu diperhatikan. Selain itu koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Dunia Usaha juga menjadi hal strategis dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017.

5. RPJMD merupakan dasar pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan

Dengan adanya dokumen RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 yang memuat indikator yang jelas dan terukur, akan membantu

Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, baik indikator kinerja lima tahunan maupun tahunan.

10.2. Pedoman Transisi dan Perubahan

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 40 ayat (2) huruf j, menyatakan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

Berdasarkan peraturan tersebut maka RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD dan RKPD, akan dipergunakan untuk 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD berakhir, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, pasca berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya pada tahun 2017. Dengan demikian program dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 adalah program sampai dengan tahun 2018 yang akan dilaksanakan oleh Walikota dan Wakil Walikota periode selanjutnya.

Penyusunan perencanaan pembangunan pada masa transisi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, Tahap 3 (tiga) yakni Tahap Menuju Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat, Tahap ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang dititikberatkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa serta diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat

Berkenaan perubahan RPJMD, hanya dilakukan bila terjadi perubahan mendasar seperti terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Yang dimaksud perubahan mendasar untuk merubah RPJMD berdasar kesepakatan Walikota dengan Pimpinan DPRD. RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan selama tidak mengubah pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, penetapan perubahan sasaran RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN